

**EVALUASI PROGRAM MODEL KAWASAN  
RUMAH PANGAN LESTARI DI DESA MENES  
KECAMATAN MENES KABUPATEN  
PANDEGLANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

Mohamad Dodo Widarda

NIM 6661120489

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRAS NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2016**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Mohamad Dodo Widarda  
NIM : 6661120489  
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 11 Januari 1994  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Agustus 2016

Mohamad Dodo Widarda

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Mohamad Dodo Widarda  
 NIM : 6661120489  
 Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM MODEL KAWASAN RUMAH  
 PANGAN LESTARI DI DESA MENES KECAMATAN  
 MENES KABUPATEN PANDEGLANG

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Skripsi di Serang, Tanggal 15 Agustus 2016 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, Agustus 2012

Ketua Penguji

**Yeni Widvastuti, S.Sos., M.Si** .....

NIP. 197602102005012003

Anggota,

**Hasuri, M.Si** .....

NIP. 196202032000121002

Anggota,

**Listyaningsih, S.Sos., M.Si** .....

NIP. 197603292003122001

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Ketua Program Studi

Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si  
 NIP. 197108242005011002

Listyaningsih, S.Sos., M.Si  
 NIP. 197603292003122001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : Mohamad Dodo Widarda  
NIM : 6661120489  
Judul Proposal Skripsi : **EVALUASI PROGRAM MODEL KAWASAN  
RUMAH PANGAN LESTARI DI DESA MENES  
KECAMATAN MENES KABUPATEN  
PANDEGLANG**

Serang, Juli 2016  
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan  
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ayuning Budiati, MPPM

NIP: 196905022005012001

Listyaningsih, S.Sos.,M.Si

NIP: 197603292003122001

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos.,M.Si

NIP: 197603292003122001

## ABSTRAK

**Mohamad Dodo Widarda. NIM 120489. Skripsi. Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pembimbing I: Dr. Ayuning Budiati, MPPM dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si**

Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) merupakan program ketahanan pangan dengan prinsip (i) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, (ii) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (iii) konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan (iv) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahannya yakni belum meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan, tidak adanya sumber benih/bibit, belum adanya kegiatan ekonomi produktif keluarga, kurang aktifnya penyuluh, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menjalankan program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah anggota Kelompok Wanita Tani di Desa Menes. Teori yang digunakan adalah teori William M. Dunn. Dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Dalam menganalisis data digunakan uji hipotesis *t-test* satu sampel. Hasil menunjukkan bahwa persentase Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari hanya mencapai 51.58% dan belum maksimal karena dibawah angka minimal 60%. Saran peneliti adalah Peran pendamping harusnya lebih aktif lagi dalam membimbing ibu-ibu Kelompok Wanita Tani juga Adanya monitoring dan evaluasi secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat dan tim pendamping secara berkala.

**Kata kunci: Ketahanan Pangan, Model Kawasan Rumah Pangan Lestari, Kelompok Wanita Tani.**

## **ABSTRACT**

***Mohamad Dodo Widarda. NIM 120489. Research Paper. Evaluation Program Region Sustainable Food House in Menes Village, District of Menes, Pandeglang Regency. Advisor I: Dr. Ayuning Budiati, MPPM and Advisor II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si.***

*Evaluation Region Sustainable Food House Program is a security food program with the principles: (i) usage area of yard's house with friendly and semaking for sustainable food house also independence food, (ii) with verifications food and foundations local resources, (iii) genetic food of resource conservations (plants, livestock, or fish), and (iv) keep long lasting through seedling from village to rise up income and prosperous society. Those problems are not raise up the skill of society for using the yard's house, there is not source of seedling, there is not activity productive economic of family, there is not activity from educator to society, and aware less from society to keep of Region Sustainable Food House Program. The focus of this research is Evaluation Program Region Sustainable Food House in Menes Village, District of Menes, Pandeglang Regency. This research uses descriptive quantitative method. Subjects were members of Farmer Woman Community. The Theory which used in this research is public policy evaluation model from William M. Dunn. In gathering the data is by distributing questionnaires. In analyzing the data used hypothesis testing one sample t-test. Results showed that the presentation Program Region Sustainable Food House is 51.58% and the value is not maximal because the calculations only 51.58% of the minimum rate of 60%. Suggestions researchers are more active to support group of farm woman. There are monitoring and evaluations togetherness by group of society and team supporting as periodic.*

***Keywords: security food, Region Sustainable Food House, Group of Farm Woman***

**Kamu dan kamu adalah aku dalam jiwa raga yang berbeda.**

**Karenanya aku ingin, karenanya aku akan menjaga diriku dan membuat diriku yang lain dengan sebaik mungkin.**

**Karena laki-laki harus bisa apa saja.**

**Hingga waktunya Allah berkata “saatnya kamu pulang”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak dan Ibuku tercinta yang tak pernah lelah mendukung dan mendoakanku dalam sujudnya. Juga untuk kakak, teteh, dan adikku yang senantiasa memberi semangat dalam kata-katanya. Serta untuk orang-orang yang senantiasa membuatku kuat dengan berbagai caranya. Terima kasih semuanya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari Di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang”

Hasil penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil. Maka dengan ketulusan hati dan dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan dan rasa hormat serta terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Nurokhman, S.Ikom., M.Ikom, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, M.Si, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap bimbingan yang dilakukan selama ini.
7. Riswanda, Ph.D, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si, Ketua Penguji sekaligus Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan konsultasi dengan saya.
9. Dr. Ayuning Budiati, MPPM, Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap bimbingan yang dilakukan selama ini.
10. Dosen dan Staf Tata Usaha Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
11. Bapak Eka Rastiyanto A. selaku staf BPTP Provinsi Banten yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini
12. Ibu Hetty selaku Ketua Kelompok Wanita Tani yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini
13. Bapak Supriantoro Pohan yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini

14. Untuk ayah dan ibu tercinta, Gholib Romansyah dan Tyas Kencana Rukmi yang senantiasa mendoakan anak laki-lakimu tercinta ini serta selalu mendukung baik secara moril maupun materil.
15. Untuk Keluarga saya yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa yang selalu mengiringi tiap langkah saya dalam menyelesaikan skripsi saya hingga tahap ini.
16. Untuk sahabatku dari semester satu Adventure FC (Restu Ramadhan, Fahmy Kurnia Eka Saputra, Didi Rosadi, Didi Suryadi, Pangku Shillazid, Abdul Haris Djiwandono, Damar Aji Nusantara, M. Rafli Maulid, Pradytia Herlyansah) yang selalu memberi dukungan kepada saya.
17. Tidak lupa Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2012 yang selalu berjuang bersama-sama serta saling mendukung satu sama lain dalam mengerjakan tugas akhir.
18. Teman-teman kampusku terutama kelas C angkatan 2012, terima kasih atas solidaritasnya selama perkuliahan.
19. Teman-teman KKM 38 2015, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
20. Serta semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis tak berhenti mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian materi. Oleh karena itu

penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis mengharapkan masukan, baik kritik maupun saran dari pembaca yang membangun.

Serang, Agustus 2016

Penulis

Mohamad Dodo Widarda

NIM. 6661120489

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR ORISINALITAS</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	16
1.3 Batasan Masalah .....	18
1.4 Rumusan Masalah .....	18
1.5 Tujuan Penelitian .....	18
1.6 Kegunaan Penelitian .....	18
1.6.1 Manfaat Praktis .....	18
1.6.2 Manfaat Teoritis .....	19
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	
2.1 Kebijakan Publik.....	20
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	20
2.1.2 Perumusan Kebijakan Publik.....	21
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik .....	23
2.1.4.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	23

2.1.4.2 Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik .....	24
2.1.4.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik.....	26
2.1.4.3.1 Efektivitas .....	28
2.1.4.3.2 Efisiensi.....	29
2.1.4.3.3 Kecukupan .....	29
2.1.4.3.4 Perataan.....	31
2.1.4.3.5 Responsivitas .....	32
2.1.4.3.6 Ketepatan .....	33
2.2 Penelitian Terdahulu .....	34
2.3 Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari .....	36
2.3.1 Konsep M-KRPL .....	36
2.3.2 Tahapan Pelaksanaan M-KRPL.....	39
2.4 Kerangka Berfikir .....	42
2.5 Hipotesis Penelitian .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian .....	46
3.2 Instrumen Penelitian .....	48
3.2.1 Definisi Konseptual .....	49
3.2.2 Definisi Operasional .....	49
3.2.3 Jenis Data .....	52
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.3.1 Metode Kuesioner.....	52
3.4 Populasi.....	52
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	53
3.5.1 Uji Validitas .....	54
3.5.2 Uji Reliabilitas .....	54
3.5.3 Uji T-test .....	55

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	57
--------------------------------------	----

4.1.1 Gambaran Umum Desa Menes .....	57
4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian.....	60
4.2 Uji Validitas Instrumen.....	63
4.3 Uji Reliabilitas Instrumen .....	67
4.4 Uji Hipotesis .....	68
4.5 Analisis Data.....	69
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian .....	166
4.7 Pembahasan.....	167
4.7.1 Efektifitas .....	167
4.7.2 Efisiensi.....	169
4.7.3 Kecukupan .....	171
4.7.4 Perataan .....	172
4.7.5 Responsivitas .....	173
4.7.6 Ketepatan .....	175

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	180
5.2 Saran .....	180

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1 Selisih antara Produksi, Konsumsi, dan Impor beras.....	1
TABEL 1.2 Perbandingan antara Konsumsi Masyarakat dengan total Ketersediaan Pangan .....	5
TABEL 2.1 Kriteria Evaluasi .....	27
TABEL 2.2 Kerangka Berfikir .....	43
TABEL 3.1 Skoring Menggunakan Skala Likert.....	50
TABEL 3.2 Instrumen Penelitian.....	51
TABEL 3.3 Jadwal Penelitian.....	56
TABEL 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.....	65
TABEL 4.2 <i>Case Processing Summary</i> .....	68
TABEL 4.3 <i>Reliability Statistics</i> .....	68

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Grafik 4.2 Responden Berdasarkan Usia .....	62
Grafik 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
Grafik 4.4 Indikator Efektifitas .....	71
Grafik 4.5 Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Efektivitas .....	73
Grafik 4.6 Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Efektivitas .....	74
Grafik 4.7 Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Efektivitas .....	76
Grafik 4.8 Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Efektivitas.....	77
Grafik 4.9 Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Efektivitas .....	78
Grafik 4.10 Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Efektivitas.....	80
Grafik 4.11 Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Efektivitas .....	81
Grafik 4.12 Hasil Pertanyaan Kedelapan Indikator Efektivitas .....	82
Grafik 4.13 Hasil Pertanyaan Kesembilan Indikator Efektivitas .....	84
Grafik 4.14 Hasil Pertanyaan Kesepuluh Indikator Efektivitas .....	85
Grafik 4.15 Indikator Efisiensi .....	86
Grafik 4.16 Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Efisiensi .....	88
Grafik 4.17 Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Efisiensi.....	89
Grafik 4.18 Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Efisiensi.....	91
Grafik 4.19 Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Efisiensi.....	92
Grafik 4.20 Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Efisiensi .....	94
Grafik 4.21 Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Efisiensi .....	95
Grafik 4.22 Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Efisiensi .....	97
Grafik 4.23 Hasil Pertanyaan Kedelapan Indikator Efisiensi .....	98
Grafik 4.24 Hasil Pertanyaan Kesembilan Indikator Efisiensi .....	99
Grafik 4.25 Hasil Pertanyaan Kesepuluh Indikator Efisiensi .....	102
Grafik 4.26 Hasil Pertanyaan Kesebelas Indikator Efisiensi .....	103
Grafik 4.27 Hasil Pertanyaan Keduabelas Indikator Efisiensi.....	104
Grafik 4.28 Hasil Pertanyaan Ketigabelas Indikator Efisiensi .....	106
Grafik 4.29 Hasil Pertanyaan Keempatbelas Indikator Efisiensi.....	108



Grafik 4.30 Hasil Pertanyaan Kelimabelas Indikator Efisiensi .....	110
Grafik 4.31 Hasil Pertanyaan Keenambelas Indikator Efisiensi.....	112
Grafik 4.32 Indikator Kecukupan .....	113
Grafik 4.33 Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Kecukupan .....	114
Grafik 4.34 Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Kecukupan.....	116
Grafik 4.35 Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Kecukupan .....	117
Grafik 4.36 Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Kecukupan.....	119
Grafik 4.37 Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Kecukupan .....	120
Grafik 4.38 Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Kecukupan.....	122
Grafik 4.39 Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Kecukupan .....	124
Grafik 4.40 Hasil Pertanyaan Kedelapan Indikator Kecukupan .....	126
Grafik 4.41 Hasil Pertanyaan Kesembilan Indikator Kecukupan .....	127
Grafik 4.42 Indikator Perataan.....	129
Grafik 4.43 Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Perataan .....	130
Grafik 4.44 Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Perataan .....	132
Grafik 4.45 Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Perataan.....	134
Grafik 4.46 Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Perataan .....	136
Grafik 4.47 Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Perataan.....	137
Grafik 4.48 Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Perataan .....	139
Grafik 4.49 Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Perataan.....	141
Grafik 4.50 Indikator Responsivitas .....	143
Grafik 4.51 Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Responsivitas .....	144
Grafik 4.52 Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Responsivitas.....	145
Grafik 4.53 Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Responsivitas .....	147
Grafik 4.54 Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Responsivitas.....	148
Grafik 4.55 Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Responsivitas .....	149
Grafik 4.56 Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Responsivitas.....	151
Grafik 4.57 Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Responsivitas .....	153
Grafik 4.58 Hasil Pertanyaan Kedelapan Indikator Responsivitas .....	155
Grafik 4.59 Indikator Ketepatan .....	157
Grafik 4.60 Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Ketepatan .....	158

Grafik 4.61 Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Ketepatan.....	160
Grafik 4.62 Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Ketepatan .....	162
Grafik 4.63 Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Ketepatan.....	163
Grafik 4.64 Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Ketepatan .....	165

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik itu di bidang ekonomi, keamanan, politik, dan sosial. Oleh sebab itu ketahanan pangan merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini dan masa mendatang. Namun tak bisa dipungkiri bahwa saat ini Indonesia tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara domestik dan mau tak mau harus tergantung pada ketersediaan pangan dunia. Krisis pangan yang terjadi tersebut dikarenakan Indonesia tidak mampu mengatasi ketergantungan terhadap impor pangan.

**Tabel 1.1**

Selisih antara Produksi, Konsumsi, dan Impor beras

Tahun	Produksi Beras (Juta Ton)	Konsumsi Beras (Juta Ton)*	Impor (Juta Ton)
2005	34,96	35,74	0,54
2006	35,30	35,90	2,00
2007	37,00	36,35	0,35
2008	38,31	37,10	0,25
2009	36,37	38,00	1,15
2010	38,00	38,55	0,95

Sumber : BPS dan \*USDA, 2011 (diolah)

Permasalahan itu semakin diperbesar dengan arus globalisasi yang tidak bisa dihindarkan. Sementara negara maju tetap mempertahankan subsidi pertanian, Indonesia justru melakukan hal yang sebaliknya. Indonesia secara sistematis mengurangi jumlah atau tingkat subsidi. Aktivitas pertanian juga kini lebih banyak dikerjakan oleh petani gurem dan miskin, sementara industri hulu dan hilir dikuasai oleh pemodal besar dan kaya raya. Ketidaksetaraan ini membuat surplus yang terjadi pada pertanian turut tersedot oleh pelaku *off farm*. Pelaku *off farm* adalah orang yang menggeluti aktivitas non pertanian namun terkait dengan ketersediaan atau akses permodalan, manajemen, ilmu teknologi, dan jaringan.

Perubahan iklim juga merupakan faktor eksternal yang bisa mengubah kondisi pertanian secara global. Pemanasan global dan ketidakpastian cuaca akan semakin meningkatkan ketidakpastian yang dihadapi oleh para petani. Disisi lain kebutuhan pangan dunia semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya populasi dan tingkat pendapatan masyarakat.

Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penyediaan pangan pokok seperti beras dan sayur-sayuran tidak bisa mengandalkan dari pasar luar negeri. Produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Disisi lain upaya peningkatan produksi pangan mengalami berbagai tantangan dan kendala terutama

dalam meningkatkan dan mempertahankan areal pertanian, meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta menghadapi terjadinya perubahan iklim.

Luas area pertanian produktif setiap tahun terus berkurang akibat terjadinya konversi ke non-pertanian sedangkan perluasan area pertanian baru semakin sulit karena semakin terbatas. Peningkatan produktivitas hasil pertanian dan indeks penanamannya juga mengalami banyak kendala, selain lambatnya untuk menghasilkan suatu teknologi juga disebabkan karena banyaknya infrastruktur irigasi yang masih rusak serta terganggunya penyediaan benih dan pupuk baik dalam jumlah, mutu, dan ketepatan waktu.

Kementerian Pertanian sering merilis data bahwa setiap tahun terdapat sekitar 110.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Jumlah sawah baru yang dicetak pemerintah (dengan dukungan dana APBN) hanya mencapai 20.000 hingga 40.000 hektare per tahun, tidak sebanding dengan lahan sawah yang terkonversi (Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian dalam <http://wartaekonomi.co.id> dikutip pada tanggal 21 maret pukul 12.30 WIB). Akibatnya, produksi pangan semakin terbatas dibandingkan dengan permintaan yang terus meningkat. Beberapa produk pangan strategis seperti beras, kedelai, bawang merah, cabai, daging sapi, dan buah-buahan segar semakin langka di pasaran

Di sisi lain, permintaan masyarakat terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Akibatnya, daerah-daerah yang semestinya menjadi penyangga pangan nasional, ternyata kini mengalami defisit pangan sehingga harus mendatangkan pangan dari Daerah atau Negara lain. Dalam beberapa tahun terakhir ini, impor pangan dipakai sebagai solusi rutin untuk mengatasi defisit pangan, yang tentunya menghabiskan banyak devisa negara. Langkah pemerintah untuk membolehkan impor beberapa komoditas pangan strategis juga telah menurunkan motivasi para petani untuk memproduksi karena harga jual pangan impor lebih rendah dari harga jual di tingkat petani.

**Tabel 1.2**

Perbandingan antara Konsumsi Masyarakat dengan total Ketersediaan Pangan

Jumlah Penduduk 11.523.018 jiwa (Pusdatin, 2014)

No	Komoditas/Kel Pangan	Produksi	Keters.bds. produksi	Stok/ Cadangan	Total Ketersediaan	Konsumsi	Surplus / Defisit	
1	Beras	2,046,832	1,269,036	-	1,269,036	1,200,353	68,683	Surplus
2	Jagung	11,897	11,897		11,897	18,091	(6,194)	Defisit
3	Kacang Tanah	12,788	12,788		12,788	3,918	8,870	Surplus
4	Kacang Hijau	661	661		661	3,687	(3,026)	Surplus
5	Kedelai	11,900	11,900		11,900	87,114	(75,214)	Defisit
6	Ubi Kayu	90,377	90,377		90,377	92,069	(1,692)	Defisit
7	Ubi Jalar	27,179	27,179		27,179	21,779	5,400	Surplus
8	Cabe	11,528	11,528		11,528	16,132	(4,604)	Defisit
9	Bawang Merah	1,230	1,230		1,230	59,920	(58,690)	Defisit
10	Gula Pasir					56,808	(56,808)	Defisit
11	Daging Sapi	31,914			31,914	26,042	5,872	Surplus
12	Daging Ayam	120,913			120,913	78,702	42,211	Surplus
13	Telur Ayam	51,397			51,397	84,925	(33,528)	Defisit
14	Minyak Goreng					91,262	(91,262)	Defisit

\*cabe merah dan bawang merah angka realisasi produksi 2012

\*beras, jagung, kedelai, kacang tanah (ARAM II 2013, BPS)

sumber: data diolah oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten)

Paling tidak, ada tiga argumen untuk mengatakan bahwa potensi di sektor pangan bisa diandalkan menjadi penyangga utama kekuatan ekonomi Indonesia.

*Pertama*, dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia memperoleh keberuntungan sebagai negara agraris. Tata letak wilayah Indonesia yang persis berada di garis khatulistiwa memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu di wilayah bagian Selatan banyak kemarau dan di wilayah bagian Utara banyak hujan. Kondisi iklim dan musim yang demikian memungkinkan sebagian besar jenis tanaman dan hewan ternak bisa tumbuh dengan baik (dikutip pada tanggal 21 maret 2015 pukul 11.35 WIB di <http://www.kemenkeu.go.id>)

*Kedua*, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia memilih usaha tani sebagai mata pencaharian pokoknya. BPS melaporkan bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Tani (RTUT) pada tahun 2013 sebanyak 26.13 juta RT. Artinya, apabila masing masing RTUT memiliki 3 anak saja, maka jumlah penduduk yang bekerja pada sektor usaha tani mencapai sekitar 130,6 juta orang atau sekitar 56,8 persen (asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 230 juta orang). (<http://finance.detik.com>. Dikutip pada 29 Maret 2015 pukul 13.30 WIB)

*Ketiga*, dari sisi potensi SDM, Indonesia memiliki banyak sarjana pertanian yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian sehingga masalah suplai pangan bisa diatasi dengan baik. Data



Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional, yang dirilis PISPI (Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia) menunjukkan bahwa lulusan sarjana pertanian termasuk didalamnya sarjana peternakan dan perikanan Indonesia mencapai sekitar 3,32 persen dari seluruh lulusan sarjana di Indonesia (Salman Dianda Anwar, Wakil Ketua Umum 2012). Dengan demikian, jumlah sarjana pertanian di seluruh Indonesia mencapai sekitar 300 ribu orang lebih. Ditjen Dikti juga melaporkan bahwa setiap tahun kelulusan sarjana pertanian mencapai sekitar 34 ribu sarjana sehingga total sarjana pertanian akan mendekati angka 400 ribu orang pada akhir tahun 2013. Bila negara memberikan perhatian yang signifikan kepada para ahli pertanian ini, misalnya penciptaan kondisi atau iklim usaha yang menjanjikan keuntungan dan memberikan insentif bagi para peneliti dan penyuluh pertanian, maka produktivitas hasil-hasil pertanian akan meningkat dan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang tidak saja mampu memberi makan kepada semua rakyatnya, tetapi juga mampu memberi makan kepada sebagian penduduk dunia. (dikutip pada tanggal 21 maret 2015 pukul 11.35 WIB di <http://www.kemenkeu.go.id>)

Salah satu strategi untuk pembangunan ke depan adalah pengembangan agroindustri pedesaan. Pengembangan agroindustri pedesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka lapangan kerja. Selama ini masyarakat pedesaan cenderung menjual produk bahan-bahan makanan baik itu sayur dan buah yang masih segar (primer). Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan

agroindustri pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian.

Melalui instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan yang intinya mengatakan bahwa ketahanan pangan haruslah dimulai dari tingkat rumah tangga. Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan memberi arahan bahwa untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan antara lain melalui penetapan kaidah panganekaragaman pangan, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal, pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan

ikan; pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan; serta pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal.

Kementrian Pertanian menginisiasi optimalisasi pekarangan rumah melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila RPL dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan RPL disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Selain itu KRPL juga mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau dan mengembangkan pengolahan serta pemasaran hasil. (dikutip dari Buku Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Provinsi Banten)

Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) adalah salah satu model alternatif untuk menjawab permasalahan yang sedang diprogramkan Kementerian Pertanian. Implementasi program MKRPL di Provinsi Banten salah satunya dilakukan di Kabupaten Pandeglang. Satu-satunya Desa yang dijadikan contoh MKRPL di Kabupaten Pandeglang yakni Desa Menes, Kecamatan Menes. Pada prinsip pemanfaatan lahan pekarangan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan

berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan pekarangan dalam konsep model KRPL dilengkapi dengan kelembagaan Kebun Bibit Desa, unit pengelola serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah. Melalui kegiatan MKRPL diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan, baik ketahanan pangan keluarga, ketahanan pangan regional bahkan ketahanan pangan secara nasional.

Desa Menes merupakan tempat yang dijadikan contoh Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. MKRPL di Kabupaten Pandeglang. Desa Menes dibentuk oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) yang didukung langsung oleh BPTP Provinsi Banten guna meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang. Dijadikan sebagai contoh karena wilayah Menes terdiri dari area persawahan yang luas dengan potensi lahan pertaniannya mencapai 65% atau sekitar 209 Hektar, diantara 209 Hektar tersebut terdiri dari pekarangan warga sekitar 89 Hektar, perkebunan sekitar 116 Hektar, dan kolam sekitar 4 Hektar, rata-rata umur masyarakatnya yang masih relatif muda, tingkat pendidikan yang memadai, banyaknya masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani (sekitar 17.86% dari total penduduk 6.058 jiwa pada tahun 2014) dan juga lingkungan yang mendukung karena kondisi desa yang unik karena tiap-tiap rumah memiliki pekarangan yang cukup luas dan saling berhadapan satu sama lain serta kuatnya dukungan aparat desa setempat sehingga

memudahkan implementasi MKRPL yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian. Luas pekarangan yang dimiliki masyarakat di masing-masing rumah cukup beragam. Rata-ratanya setiap rumah memiliki luas lahan pekarangan lebih dari 30m<sup>2</sup>. Bahkan ada beberapa rumah yang bisa mencapai 300m<sup>2</sup> sampai 500m<sup>2</sup>. Dengan dijadikannya Desa Menes sebagai satu-satunya tempat Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) di Kabupaten Pandeglang diharapkan mampu untuk mengembangkan program ini agar daerah-daerah lain bisa turut berpartisipasi dalam menjalankan program ini. (Sumber: Profil Desa Menes)

Program ini selain bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, juga bermanfaat untuk menghemat anggaran rumah tangga karena apabila program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka bisa menghemat pengeluaran satu keluarga hingga Rp 300.000,00 per bulan. Hasil wawancara dengan Ibu Hetty selaku ketua Kelompok Wanita Tani pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Menes dan Bapak Eka selaku staf Balai Pengkajian Teknologi Pangan pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor BPTP Provinsi Banten). Pada awalnya program ini berjalan dengan sangat baik karena disetiap pekarangan masyarakat dapat ditemukan berbagai macam tanaman dengan jumlah yang banyak. Bantuan juga rutin disalurkan oleh BPTP Provinsi Banten sesuai dengan kebutuhan Desa Menes untuk berjalannya program MKRPL seperti pembuatan KBD, pupuk, bibit tanaman pangan dan toga, pestisida, dan peralatan lainnya demi menunjang program MKRPL. Bantuan *Local Champion* juga sangat membantu dalam

berjalannya program ini karena selain pendamping dari pemerintah, peran *Local Champion* juga sangat vital dalam menggerakkan warganya untuk mengimplementasikan program MKRPL di wilayahnya. *Local Champion* yakni sosok tokoh desa yang berperan sangat aktif dalam menggerakkan warga sekitar. Namun seperti kebanyakan program lainnya, semakin lama program berjalan semakin berkurang juga dampak yang dirasakan.

Menurut penyuluh dari BTPT Provinsi Banten pun menyatakan program ini belum berjalan sesuai dengan tujuan jika melihat kondisi Desa Menes saat ini. Sama halnya dengan masyarakat Desa Menes sendiri yang merasa mulai berkurangnya manfaat dari program ini. Dari hasil rangkaian wawancara serta observasi secara langsung, peneliti menemukan beberapa masalah.

Pertama, MKRPL belum bisa meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, serta diversifikasi pangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal peneliti pada bulan Desember tahun 2015 di Desa Menes. Peneliti melihat masih banyaknya pekarangan yang masih belum ditanami tanaman pangan, tanaman toga serta tanaman buah serta sayuran lainnya. Masalah ini juga ditekankan oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Supriantoro Pohan selaku Pembina Kelompok Wanita Tani. Beliau mengatakan dari tiga RT yang ada hanya RT 03 saja yang masih memanfaatkan pekarangannya untuk ditanami

tanaman-tanaman toga, tanaman pangan, buah dan sayuran. Sedangkan untuk dua RT yang lain hanya beberapa orang saja yang masih menanami pekarangannya dengan tanaman-tanaman sehingga pemanfaatan pekarangan rumah masyarakat masih bisa dibilang kurang. Padahal kondisi sebelumnya Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari ini berjalan sangat baik, setiap rumah pasti memanfaatkan pekarangannya dengan ditanami. (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Supriantoro Pohan selaku Pembina Kelompok Wanita Tani pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Menes)

Kedua, Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari belum mampu mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Hetty selaku Ketua Kelompok Wanita Tani. Beliau menjelaskan dulunya di Desa Menes memiliki dua Kebun Bibit Desa (KBD) yang bertempat di RT 01 dan RT 03. Namun seiring waktu, Kebun Bibit Desa ini mulai tak terurus keberadaannya dan lebih parahnya lahan yang harusnya dijadikan lahan Kebun Bibit Desa malah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan warga. Kebun Bibit Desa ini seharusnya selalu diurus dan dirawat oleh semua anggota Kelompok Wanita Tani, namun hanya beberapa orang saja yang merawat seperti Ketua Kelompok Wanita Tani, Sekretaris Kelompok Wanita Tani, Bendahara Kelompok Wanita Tani, dan beberapa anggota sehingga menimbulkan efek jenuh karena merasa hanya saling

mengandalkan beberapa orang saja. Selain Kebun Bibit Desa, sumber benih/bibit bisa dilakukan disebuah Demplot. Demplot sendiri adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan Sekolah Lapangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (SL-P2KP) yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok. Demplot sendiri pun mulai tak terurus dan akhirnya saat ini tertutupi oleh semak belukar. Ini menyebabkan tidak adanya media untuk menjaga bibit-bibit yang telah disemai untuk keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan. (Sumber: wawancara dengan Ibu Hetty selaku Ketua Kelompok Wanita Tani pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Menes)

Ketiga, Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri. Hal ini diperjelas dari hasil wawancara dengan Bapak Eka selaku staf Balai Pengkajian Teknologi Pangan Provinsi Banten. Beliau mengatakan bahwasanya kegiatan ekonomi produktif sulit direalisasikan mengingat salah satu tantangan tersulit pada poin ini yakni sulitnya memilih target pasar yang bisa dijadikan fokus utama untuk menjual hasil bibit yang sudah siap dijual. Kurangnya kreatifitas serta mudahnya jenuh menjadi alasan lain kegiatan ekonomi produktif di Desa



Menes kurang berkembang. Padahal tidak hanya dijual dalam bentuk bibit, bisa saja dijual dalam bentuk produk olahan siap jual. Tanaman yang bisa diolah contohnya seperti tanaman bayam yang bisa diolah menjadi kerupuk bayam. Hanya saja karena kreatifitas masyarakat yang kurang serta mudah jenuhnya masyarakat menjadi masalah tersendiri pada poin ini (Sumber: wawancara dengan Bapak Eka selaku staf BPTP Provinsi Banten pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor BPTP Provinsi Banten)

Keempat, kurangnya aktifnya Penyuluh Pendamping. Penyuluh Pendamping memiliki peran terdepan dalam keberhasilan gerakan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari, termasuk didalamnya memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang Penyuluh Pendamping Model Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah dari sisi kepemimpinan (*leadership*), manajemen, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), disamping kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring, dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual (Sumber: wawancara dengan Ibu Hetty selaku Ketua Kelompok Wanita Tani pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Menes)

Kelima, belum adanya kesadaran masyarakat untuk membantu dan mengontrol secara langsung Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Masyarakat juga kurang dalam responsivitasnya karena memang banyak yang bukan berasal dari keluarga petani sehingga mereka tidak menguasai sepenuhnya teknologi pertanian yang pada akhirnya membuat

mereka terkesan acuh. (Sumber: wawancara dengan Ibu Hetty selaku Ketua Kelompok Wanita Tani dan Bapak Supriantoro Pohan selaku Pembina Kelompok Wanita Tani pada tanggal 19 Desember 2015 di Desa Menes)

Dari berbagai permasalahan di atas dapat diketahui bahwa program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari masih berjalan kurang maksimal dalam memenuhi tujuan awalnya. Hal ini menjadi kendala terwujudnya Model Kawasan Rumah Pangan Lestari yang benar-benar bisa dijadikan patokan Desa lainya agar program ini tak hanya diimplementasikan di satu Desa saja.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik menyusun penelitian dengan judul “Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Setelah melakukan pengamatan terhadap program MKRPL di Kabupaten Pandeglang maka situasi yang ditetapkan sebagai penelitian adalah BPTP Provinsi Banten serta masyarakat Desa Menes sebagai pemeran utama Implementasi MKRPL yang menjadi pusat perhatian peneliti. Penelitian ini diarahkan pada:

1. MKRPL belum bisa mencapai tujuannya yakni Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, serta diversifikasi pangan

2. MKRPL belum mampu mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan
3. MKRPL belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri
4. Keempat, kurangnya aktifnya Penyuluh Pendamping. Penyuluh Pendamping memiliki peran terdepan dalam keberhasilan gerakan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari, termasuk didalamnya memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang Penyuluh Pendamping Model Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah dari sisi kepemimpinan (*leadership*), manajemen, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), disamping kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring, dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual.
5. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk membantu dan mengontrol secara langsung Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Masyarakat juga kurang dalam responsivitasnya karena memang banyak yang bukan berasal dari keluarga petani sehingga mereka tidak menguasai sepenuhnya teknologi pertanian yang pada akhirnya membuat mereka terkesan acuh

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada aspek yang berkaitan dengan Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang

### **1.4 Rumusan Masalah**

Seberapa besarkah persentase Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarkah persentase Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. Adapun lebih detailnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah persentase Evaluasi Program MKRPL yang dilakukan oleh BPTP Provinsi Banten di Desa Menes Kecamatan Menes.

### **1.6 Kegunaan Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah skripsi pada jenjang perkuliahan semester 8 Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

**b. Bagi pemerintah**

1. Untuk dapat mengupayakan pelaksanaan program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sesuai dengan tujuan dibuatnya program ini.

**c. Bagi masyarakat**

1. Untuk dapat berpartisipasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari.
2. Untuk dapat mengetahui faktor apa yang menghambat ataupun yang menunjang Model Program Kawasan Rumah Pangan Lestari.

**1.6.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang” ini diharapkan meningkatkan pengetahuan dibidang Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Wiliam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik adalah sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Sementara itu Indiahono mengemukakan kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi (Indiahono, 2009:18-19)

### **2.1.2 Perumusan Kebijakan Publik**

Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*). Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dunn pun menjelaskan bahwa:

“Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru” (Dunn, 2003: 26)”.

### **2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program (dalam Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam



mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

#### **2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik**

##### **2.1.4.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

Sementara itu Widodo mengemukakan evaluasi adalah:

“Evaluasi Kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan sesuatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu atau kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan

dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan *stakeholder* lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai apabila kebijakan dilanjutkan atau diperluas” (Widodo, 2007:112)

Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”  
(Danim, 2000:14).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

#### **2.1.4.2 Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik**

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609-610).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. (Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan

tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

#### **2.1.4.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Evaluasi**

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

(Sumber: Dunn, 2003:610)

### 2.1.4.3.1 Efektivitas

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (Dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

#### **2.1.4.3.2 Efisiensi**

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi, kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

#### **2.1.4.3.2 Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

- 1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun. (Dunn, 2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.



### 2.1.4.3.3 Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat

menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*). (Dunn, 2003: 435-436)

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

#### **2.1.4.3.5 Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan

masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

#### **2.1.4.3.6 Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis yakni Dampak Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Studi kasus Di Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan) oleh Teguh Sarwo Aji Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program KRPL terhadap pola konsumsi pangan Rumah Tangga. Variabel yang dianalisis yaitu jenis pangan dan asal pangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Jumlah responden yang diambil sebanyak 58 Rumah Tangga, jumlah tersebut adalah total dari semua populasi. Dari hasil analisis pengeluaran bahwasannya rumah tangga sebelum menjadi anggota KRPL mempunyai pengeluaran rata-rata sebesar 650.000-700.000 /bulan/RT, sedangkan RT setelah menjadi anggota KRPL mempunyai pengeluaran rata-rata sebesar 550.000 - 600.000 /bulan/RT. Dari hasil analisis regresi diketahui hasil Uji t pada variabel jenis pangan  $3.797 > t_{tabel} 1,676$ . Sedangkan hasil uji F  $17,411 >$  dari f table 3,18. Artinya program KRPL berdampak pada pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga.

Yang kedua yakni Jurnal dengan judul Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin dan Modal Sosial di Provinsi DIY yang dibuat oleh Mustofa pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil ketahanan pangan, menganalisis kondisi modal sosial, dan menemukan desain pemanfaatan modal sosial untuk ketahanan pangan pada RTM di DIY.

Populasi Penelitian adalah seluruh rumah tangga miskin di lima

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah *proportional sampling* yakni mengambil sampel secara acak dengan proporsi tertentu dengan memperhatikan karakteristik perbedaan perwilayahan dan karakteristik populasi. Instrumen penelitian berupa angket yang ditanyakan melalui proses wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif-kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial yang ada, baik di kalangan masyarakat rural maupun urban masih dalam tahap *bonding* (sebagai pengikat saja), belum sebagai jembatan (*bridging*) yang menghubungkan seluruh potensi warga. Rata-rata tertinggi ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pangan, dan kualitas pangan dimiliki RTM dari Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata terendah ketersediaan pangan dan akses pangan dimiliki RTM dari Kabupaten Sleman. Adapun rata-rata terendah stabilitas pangan, dan kualitas pangan dimiliki RTM dari Kabupaten Kulonprogo. Desain pemanfaatan modal sosial untuk pencapaian ketahanan pangan di Propinsi DIY dapat dirumuskan melalui model rural- pertanian termasuk pegunungan dan model urban.

### **2.3 Program Kawasan Rumah Pangan Lestari**

Seiring dengan penambahan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian yang tidak akan pernah bisa dihentikan, maka berbagai upaya

untuk tetap mengusahakan tercapainya kemandirian pangan pun harus terus dilakukan, dievaluasi, diperbaiki dan diapresiasi. Kemandirian pangan yang dicirikan dengan tersedianya pangan yang bergizi dan aman untuk kesehatan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan sehingga pemerintah dan masyarakat harus terus bekerjasama secara kreatif dan kritis dalam mewujudkan dan kemudian mempertahankannya.

Adanya kesadaran atas perlunya kerjasama yang kreatif dan kritis antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan tersebutlah maka mulai tahun 2012, Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian bekerjasama dengan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia menginisiasi suatu model pemanfaatan pekarangan dan lahan sempit sebagai tempat produksi bahan pangan yang dibutuhkan oleh keluarga Indonesia. Model tersebut diberi nama Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL).

### **2.3.1 Konsep M-KRPL**

M-KRPL dikreasi dari salah satu budaya bangsa yang berharga, yaitu memanfaatkan pekarangan sebagai sumber bahan pangan keluarga melalui penanaman berbagai tanaman sayuran, buah-buahan, umbi-umbian dan tanaman obat serta pemeliharaan ternak. Demi memberikan dampak yang lebih luas dalam rangka kemandirian pangan, maka konsep Rumah

Pangan (RP) tersebut kemudian secara kreatif dan kritis dikembangkan menjadi konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Penambahan kata “kawasan” dibagian depan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tujuan dari program ini tidak hanya sekedar rumah per rumah melainkan dikembangkan dalam skala lebih luas. Berbeda dengan Rumah Pangan (RP) yang dilaksanakan rumah per rumah secara sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan dengan yang lain, KRPL diharapkan dapat melibatkan banyak rumah tangga dan saling terkait yaitu berbasis Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), dusun (kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat adalah suatu keharusan. Posisi pemerintah dalam program ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pendamping yang ikut membimbing dan mendukung terbentuknya KRPL. Dengan kata lain, KRPL ini harus direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif (dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat) serta kemudian dievaluasi dan disempurnakan secara kreatif dan kritis oleh masyarakat dan pemerintah melalui aparat penggerak/penyuluh di lapangan.

Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat sejak awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan penyempurnaan tersebut, diharapkan pula bahwa pembentukan kawasan rumah pangan akan berlanjut secara lestari. Itulah yang diinginkan dan dimaksudkan dengan penambahan kata “lestari” pada konsep KRPL. Selain itu, untuk mendukung dan

menjamin keberlanjutan (kelestarian) Kawasan Rumah Pangan, maka penyediaan dan ketersediaan bibit/benih menjadi salah satu faktor pendukung yang penting. Maka dalam konsep KRPL, kebun bibit menjadi salah satu prinsip yang wajib ada. Kebun bibit tersebut cukup satu untuk satu kawasan dan dikelola oleh masyarakat secara partisipatif.

Dan, sebagai langkah awal yang logis agar KRPL dapat berkembang, Badan Litbang Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang ada di seluruh propinsi di Indonesia, melaksanakan suatu program percontohan (model) dan wahana pembelajaran bagi kelompok masyarakat di beberapa kabupaten/kota. Rintisan awal tersebut dinamakan Model KRPL (M-KRPL).

M-KRPL fokus pada pencapaian 2 (dua) sasaran utama, yaitu 1) penyediaan pangan dan sumber gizi, dan 2) penyediaannya secara lestari. Aspek “penyediaan pangan dan sumber gizi” akan dicapai melalui penyediaan fisik tanaman/hewan yang didukung dengan penyediaan dan pengelolaan media tanam, pupuk/pakan, air dan bibit serta sarana dan prasarana yang memadai lainnya. Aspek “penyediaan secara lestari” akan dicapai melalui 1) kelembagaan/pengorganisasian kelompok masyarakat melalui pelibatan dan peran serta aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan; serta 2) pembangunan dan pengelolaan kebun bibit desa/kebun bibit kelompok (KBD/KBK) yang dapat menjamin pasokan benih/bibit secara sinambung.



Dalam pelaksanaannya, M-KRPL berpegang pada 5 prinsip dasar KRPL yaitu (i) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, (ii) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (iii) konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan (iv) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa/kebun bibit kelompok (KBD/KBK) menuju (v) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain tujuan dari M-KRPL ini adalah:

1. Memenuhi Kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari.
2. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, serta diversifikasi pangan.
3. Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan.
4. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

### **2.3.2 Tahapan Pelaksanaan M-KRPL**

Dalam implementasinya, M-KRPL harus direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif (dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat). Adapun tahapan pelaksanaannya dapat dilakukan secara fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang ada di lokasi. Berikut tahapan pelaksanaan M-KRPL secara umum:

## **1. Penentuan lokasi dan kelompok masyarakat yang akan menjadi kooperator**

Penentuan lokasi dan kelompok masyarakat yang akan menjadi kooperator dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas/Instansi terkait lainnya yang berwenang di Pemda setempat. Dilakukan pula observasi lapang terkait sumberdaya fisik, lingkungan, SDM, teknologi, dan sosial ekonomi.

## **2. Identifikasi Kebutuhan dan peran Kelompok Masyarakat Kooperator**

Analisis kebutuhan dan peran stakeholders akan dilakukan melalui pertemuan partisipatif, yaitu 1) diskusi kelompok besar dan dilanjutkan dengan 2) diskusi mendalam dengan beberapa orang yang dianggap akan menjadi pemimpin/penggerak bagi anggota lainnya. Identifikasi kebutuhan akan meliputi kebutuhan sarana dan prasarana, jenis tanaman/ternak, ketersediaan dan pengelolaan air, media tanam, pupuk/pakan, teknologi, dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Identifikasi akan meliputi pula, lokasi dan luas kebun bibit, lokasi dan luas demplot-demplot pekarangan/area terbuka. Selain itu, hal penting yang harus diutamakan adalah pengorganisasian/pembagian peran dan penyusunan perangkat organisasi kelompok masyarakat kooperator sehingga nantinya kelompok tersebut akan bekerja sama dengan harmonis didampingi dan didukung oleh Dinas Pertanian (Penyuluh) dan Tim BPTP.

### **3. Penentuan rencana kegiatan M-KRPL**

Rencana kegiatan meliputi 1) desain kebun bibit serta tempat pembuatan kompos dan media tanam. Dirancang juga manajemen pengelolaan dari kebun bibit dan tempat pembuatan kompos/media tanam tersebut, dan 2) lokasi, desain, penataan dan manajemen pengelolaan pekarangan/area terbuka sebagai M-KRPL beserta lingkungan kawasan lingkungannya. Rencana tersebut nantinya akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah target yang telah ditentukan telah tercapai atau belum dan menentukan modifikasi atau perbaikan yang diperlukan agar target yang telah disusun dapat tercapai.

### **4. Peningkatan kapasitas SDM**

Peningkatan kapasitas SDM meliputi Training of Trainers (TOT) dan pelatihan-pelatihan lainnya yang diperlukan sesuai hasil diskusi dan identifikasi kebutuhan, seperti pelatihan pembibitan, penyemaian benih, pembuatan media tanam, dan lain sebagainya.

### **5. Pelaksanaan M-KRPL**

Pelaksanaan M-KRPL dilakukan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

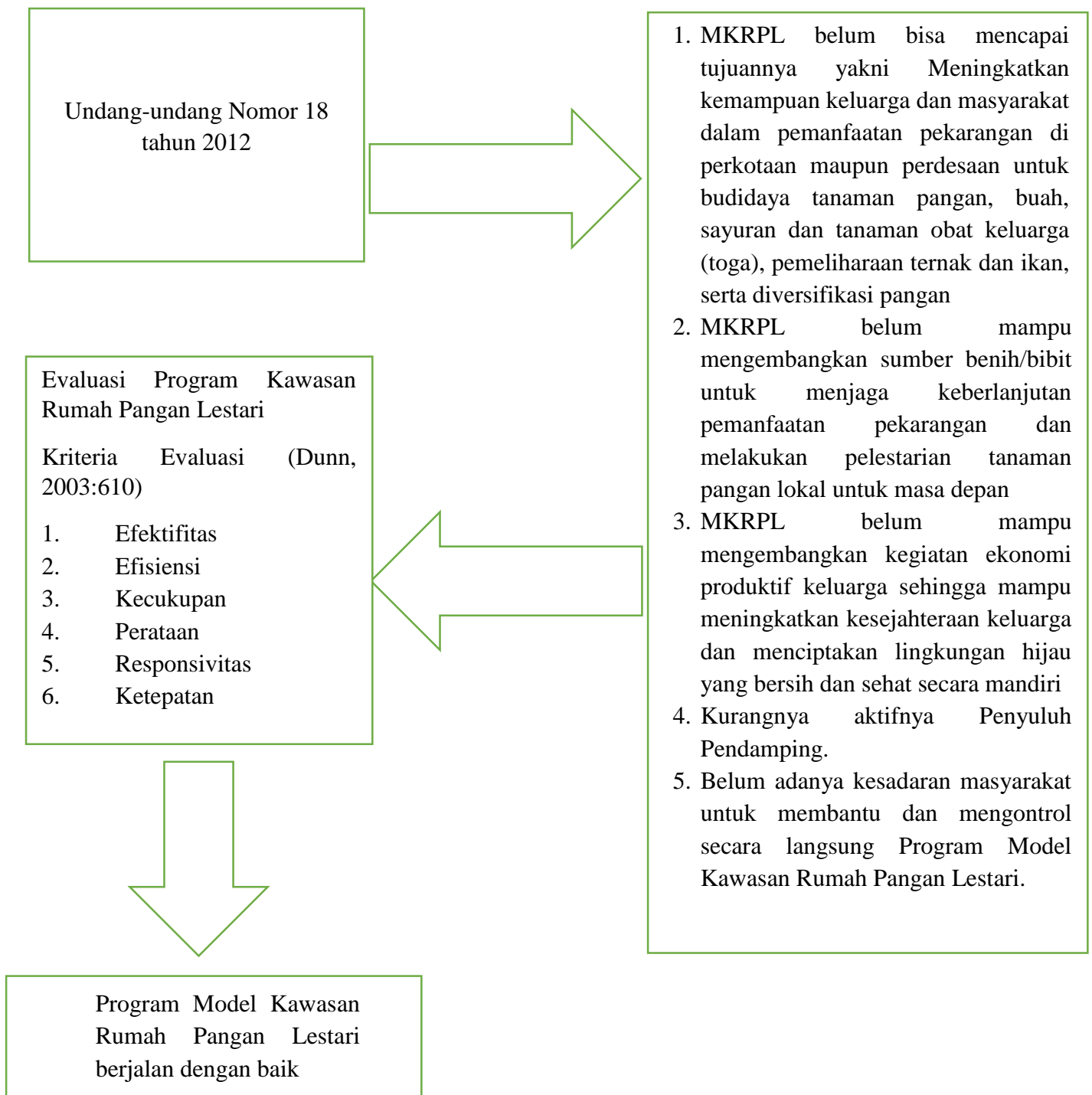
## **6. Peningkatan Kinerja M-KRPL**

Demi kelancaran dan peningkatan kinerja M-KRPL maka harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat kooperator dan tim pendamping secara berkala. Selanjutnya dilakukan modifikasi dan perbaikan segala hal yang dianggap kurang baik.

### **2.4 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan peneliti, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut:

Masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kegiatan yang mereka lakukan. Contohnya dalam suatu kegiatan implementasi program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Evaluasi program dibutuhkan oleh masyarakat penerima program ini yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilannya dalam mendongkrak perekonomian masyarakat serta mengetahui berhasil atau tidaknya program ini dengan tujuan dari program ini sendiri.



**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

Sumber: Peneliti 2016

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008:64).

Hipotesis yang diuji dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ), yaitu hipotesis yang dinyatakan dalam kalimat positif.

*“Ketercapaian tujuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang lebih dari 60%”*

- 2) Hipotesis Nol ( $H_0$ ), yaitu hipotesis yang dinyatakan dalam kalimat negatif.

*“Ketercapaian tujuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang kurang dari 60%”*

Hipotesis juga merupakan hasil dari refleksi peneliti berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakannya sebagai dasar argumentasi. Dengan demikian hipotesis menggambarkan keyakinan peneliti tentang jawaban dari masalah yang akan ditelitinya sehingga rumusan hipotesisnya secara teknis haruslah memuat suatu statement

hipotesis saja dari sejumlah alternatif. Menurut Suharsimi (2010:71), mengatakan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka akan dapat disusun hipotesisnya sebagai berikut:

*“Ketercapaian tujuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang kurang dari 60%”*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Pada bagian ini, peneliti hendaknya memaparkan tentang subjek penelitiannya, proses penentuan sampel, jumlah sampel, cara mengumpulkan data yang akan dilakukan. Hal yang terkait dengan ini adalah penyusunan alat ukur/skala/instrumen/angket yang akan dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data, teknik uji reliabilitas dan validitas alat tersebut, uji asumsi yang harus dilakukan, serta teknis analisis data sebagai cara menguji hipotesis yang diajukan (Idrus, 2009:42)

Penelitian adalah upaya yang sistematis untuk mencari jawaban atas suatu masalah. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengatasi permasalahan (Sugiyono, 2005:3).

Maka dengan demikian metode penelitian dapat dipahami sebagai tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Sementara itu, Sugiyono (2009:3) mendefinisikan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya, dalam pengertian yang luas -Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid,



dengan tujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Secara umum metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Untuk mengetahui tingkat yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2005: 11).

Penelitian deskriptif juga bisa dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual. Penelitian deskriptif dapat pula diartikan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara akurat. Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini.

### 3.2 Instrumen Penelitian

“*Pertama*, instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data dilapangan. *Kedua*, instrumen penelitian adalah bagian paling rumit dari keseluruhan proses penelitian. Kesalahan dibagian ini dapat dipastikan suatu penelitian akan gagal atau berubah dari konsep semula. Oleh karena itu, kerumitan dan kerusakan instrumen penelitian pada dasarnya tidak terlepas dari peranan desain penelitian yang telah dibuat itu. *Ketiga*, bahwa pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif memiliki dua fungsi yaitu sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Pada beberapa instrumen, seumpamanya angket, instrumen penelitian menjadi wakil peneliti satu-satunya dilapangan atau wakil satu-satunya orang yang membuat instrumen tersebut. Oleh karena itu, kehadiran instrumen penelitian di depan responden (khusus untuk instrumen angket) adalah benar-benar berperan sebagai pengganti (substitusi) dan bukan suplemen penelitian. Sebagai suplemen, instrumen penelitian hanyalah pelengkap dari sekian banyak alat-alat bantu penelitian yang diperlukan oleh peneliti pada pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian” (Bungin, 2009:94-95)

Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel yaitu Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang dan menggunakan skala *Likert*.

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menggunakan indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan.

### **3.2.1 Definisi Konseptual**

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang berfungsi menilai keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan oleh implementor. Evaluasi juga berperan dalam keberlanjutan program yang dievaluasi tersebut karena dalam evaluasi akan memberikan beberapa rekomendasi, apakah harus dilanjutkan karena memiliki potensi atau tingkat keberhasilan yang tinggi, bisa dilanjutkan dengan catatan tertentu seperti perbaikan sistemnya atau harus dihentikan karena tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui hasil yang dicapai dengan hasil yang seharusnya sesuai dengan rencana awal.

### **3.2.2 Definisi Operasional**

Evaluasi menurut William Dunn terdiri dari enam indikator. Pertama efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau belum. Kedua efisiensi, maksudnya seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga yakni kecukupan, maksudnya seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah, sudah cukupkah program yang dibuat ini untuk memecahkan masalah ketahanan pangan. Keempat perataan, yakni apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu.

Kelima responsivitas, yakni apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Dan yang keenam ketepatan, yakni apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai nilai dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, seperti:

**Tabel 3.1**

**Skoring menggunakan Skala Likert**

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

*Sumber: Peneliti 2016*

Berikut ini instrumen penelitian Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2016:

**Tabel 3.2**  
**Instrumen Penelitian**

Variabel	Dimensi	Sub Indikator	No. Item
Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2009:601)	1. Efisiensi	Anggaran biaya	1-16
		Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan	
	2. Efektivitas	Pelaksanaan sesuai prosedur	17-26
		Hasil yang diharapkan	
	3. Kecukupan	KRPL Sesuai dengan keinginan masyarakat	27-35
		Pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah	
	4. Perataan	Distribusi hasil program merata kepada masyarakat	36-42
	5. Responsivitas	Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan program	43-50
	6. Ketepatan	Tujuan yang tepat sasaran	51-55

*Sumber: Peneliti 2016*

### **3.2.3 Jenis Data**

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti melalui kuesioner, wawancara (*interview*), dan observasi (pengamatan).
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti, namun diperoleh melalui orang lain maupun dokumen seperti, hasil penelitian yang relevan, laporan dan catatan-catatan perusahaan atau melalui informan itu, masyarakat yang memberikan keterangan dan informasi kepada peneliti.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Secara teknis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **3.3.1 Metode Kuesioner**

Menurut Sugiyono (2009:142), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

### **3.4 Populasi**

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa populasi tidak hanya meliputi jumlah orang yang berada dalam suatu wilayah namun, populasi meliputi subyek/objek yang memiliki kualitas nilai dan karakteristik tertentu dari keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti.

Dari penelitian ini, peneliti mengambil populasi semua anggota Kelompok Wanita Tani yang berperan aktif dalam kegiatan pemeliharaan dan pelesarian Kebun Bibit Desa di Desa Menes dalam rangka menjalankan program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari yang berjumlah 210 orang.

### **3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Apabila pengumpulan data sudah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa proses yaitu sebagai berikut:

1. *Editing*. Hal ini berarti bahwa semua data yang diperoleh diteliti tentang kelengkapan dan kejelasan jawaban dari butir-butir pertanyaan yang telah dibuat;

2. *Coding*. Merupakan usaha mengklasifikasi atau mengelompokkan jawaban responden berdasarkan macamnya, dengan cara memberikan kode terhadap jawaban responden dalam kuesioner sesuai dengan kategori masing-masing, kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala *Likert*.

3. *Tabulating*. Hal ini berarti menunjuk kepada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu berupa tabel-tabel dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

Setelah data diolah, maka tahap selanjutnya adalah analisi data. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan

menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti, sehingga dapat mudah dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca atau penguji. Dalam metode analisis yang digunakan oleh peneliti dengan metode kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

### **3.5.1 Uji Validitas**

Menurut Usman, Husaini, dan Purnomo (2008:287) Validitas ialah mengukur apa yang ingin diukur. Validitas berfungsi untuk menunjukkan tingkat kesalahan suatu instrumen. Instrumen yang sah memiliki tingkat validitas. Instrumen dikatakan sah apabila mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran.

### **3.5.2 Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas merupakan persyaratan pokok kedua dari instrumen pengumpulan data. Peneliti melakukan uji reliabilitas guna untuk mengukur dari sebuah instrumen, dimana uji reliabilitas terhadap instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka



tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas dapat menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS 20.0.

Dengan dilakukan uji reliabilitas, maka akan menghasilkan instrumen yang tepat dan akurat. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan besar, berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

### **3.5.3 Uji T-test**

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan uji T karena variabel penelitian dalam variabel bersifat tunggal dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2009:164-165), uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis nol ( $H_0$ ) berbunyi “lebih kecil atau sama dengan ( $\leq$ )” dan hipotesis alternatifnya berbunyi “lebih besar ( $>$ )”.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti yaitu di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Kemudian dalam deskripsi objek penelitian ini juga akan menjelaskan tentang gambaran umum Desa Menes.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Desa Menes**

Desa Menes memiliki luas wilayah 322 hektar dengan potensi lahan pertaniannya mencapai 65% atau sekitar 209 hektar. Berada pada posisi dataran rendah, Desa Menes mengoptimalkan budidaya pertanian pangan dan sayuran seperti padi, ubi jalar, jagung, mentimun, bayam, dan kacang panjang.

Desa Menes merupakan salah satu Desa di Kabupaten Pandeglang dengan jarak 1 Km dari Kantor Kecamatan Menes, 28 Km dari Ibukota Kabupaten, 51 Km dari Ibukota Provinsi (Serang), dan 142 Km dari Ibukota Negara (DKI Jakarta)

Desa Menes memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purwaraja, Cigandeng, dan Sindangkarya.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kananga.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Alaswangi, Tegalwangi.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwaraja.

Keadaan daratan di Desa Menes yaitu daratan bergelombang. Hal ini sejalan dengan aliran sungai yang melintasi desa. Juga keberadaan sejumlah situ yang mengelilingi desa.

Wilayah Desa Menes mempunyai beberapa tipe agroekosistem, yaitu agroekosistem lahan sawah dan lahan kering.

#### **A. Agroekosistem Lahan Sawah**

Lahan sawah di Desa Menes seluas 160 hektar dengan perincian sebagai berikut:

- Irigasi Teknis : 0 hektar
- Irigasi ½ Teknis : 35 hektar (21.87 %)
- Irigasi Sederhana PU : 45 hektar (28.12 %)
- Irigasi Pedesaan : 60 hektar (37.5 %)
- Tadah Hujan : 20 hektar (12.5 %)

#### **B. Agroekosistem Lahan Kering**

Lahan kering yang ada di Desa Menes Kecamatan Menes seluas 209 hektar, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pekarangan : 89 hektar
2. Kebun : 116 hektar
3. Kolam : 4 hektar
4. Hutan Negara : -
5. Hutan Rakyat : -

6. Perkebunan Besar :-
7. Lading :-
8. Padang Rumput :-
9. Lainnya :-

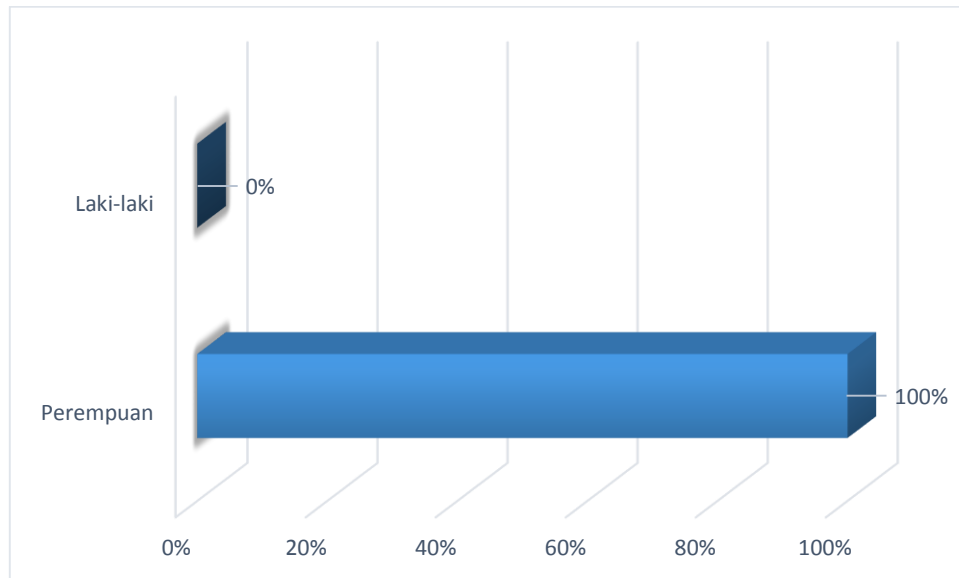
Menes berasal dari kata *KAMONESAN*, kata dasar mones, yang memiliki makna, kepandaian, kecerdikan, keanehan, kemulyaan dan kemasuran. Menes mempunyai banyak sejarah, hal ini dapat dilihat dari banyak peninggalan-peninggalan yang terdapat di Menes dari Zaman Megalitikum, Zaman Purba, Zaman Hindu- Budha, Zaman Kesultanan Islam hingga Zaman Penjajahan.

Ekonomi masyarakat Desa Menes merupakan perekonomian menengah yang kebanyakan masyarakat di desa bekerja sebagai petani dan PNS, ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta semacam home industry, ada juga yang berdagang sebagai petenak ayam serta menjadi buruh bangunan. Dan pada perternakan ayam difokuskan pada masyarakat Menes yang perekonomiannya sedang dan pengangguran serta honorer. Perternakan ayam ini dapat dikatakan sudah mulai berkembang dengan baik walaupun teknologi yang di gunakan masih tradisional. Emping melinjo yang dibuat dari buah tangkil (*Gnetum gnemon*). Di kecamatan ini terdapat APE (Asosiasi Pengrajin Emping). Menes ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan oleh pemerintah daerah dengan penghasilan utama emping melinjo. Di sini, diproduksi beragam emping dengan rupa-rupa rasa secara tradisional oleh penduduk setempat. Kue Balok Menes, terbuat dari

singkong yang memiliki rasa yang sangat khas, singkong banyak ditanam di Menes Singkong, ubi-umbian, ketela, lahan pertanian dengan produksi lebih dari 2.283 Ton per tahun yang ditanam di atas lahan 233 Hektare. Peternakan domba dengan produksi rata-rata 5.743 ekor per tahun.

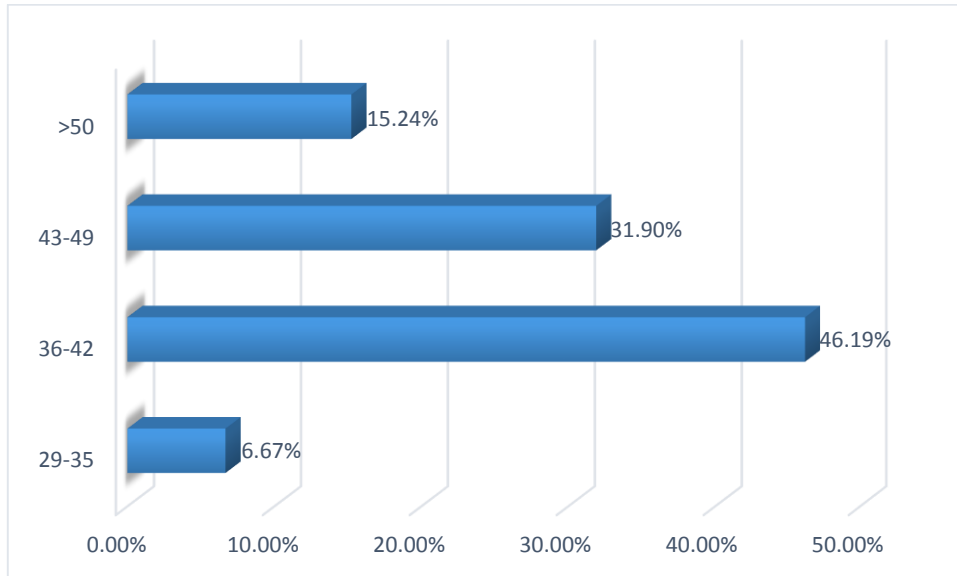
#### **4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian**

Responden yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki dan mengetahui benar informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. Adapun responden yang peneliti pilih yakni ibu-ibu anggota Kelompok Wanita Tani dengan menggunakan sampel jenuh yakni berjumlah 210 orang. Dalam mengumpulkan data, peneliti mengajukan kuesioner kepada para responden. Pada pengisian kuesioner, responden diharuskan mengisi identitas diri yang meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa grafik di bawah ini.

**Grafik 4.1****Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016

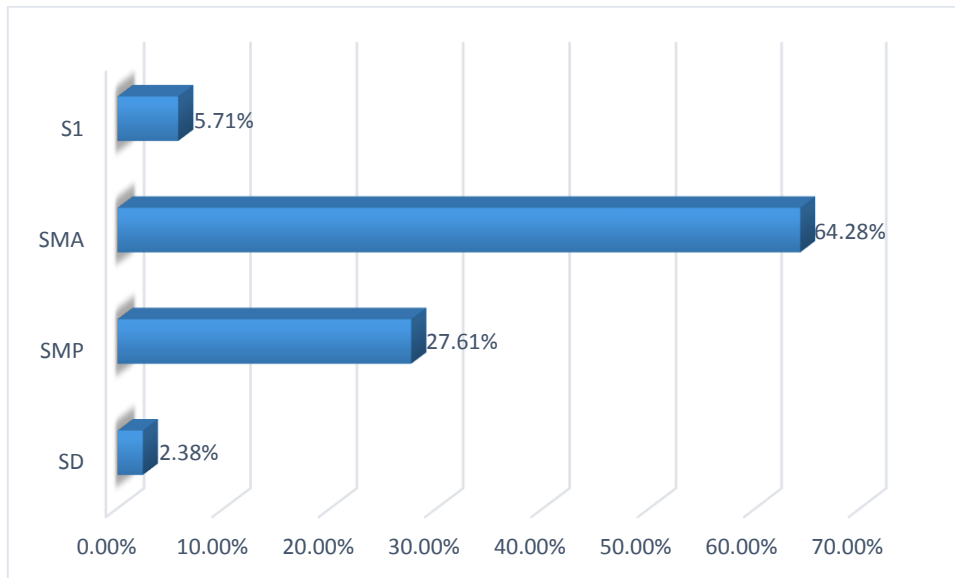
Berdasarkan grafik 4.1 di atas dapat diketahui bahwa persentase responden perempuan berjumlah 210 orang atau 100% perempuan dan tak ada responden laki-laki dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan responden yang diamati adalah anggota dari kelompok wanita tani sehingga seluruh populasi yang diteliti berjenis kelamin perempuan.

**Grafik 4.2****Identitas Responden Berdasarkan Usia**

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016

Berdasarkan grafik 4.2 di atas, terlihat bahwa responden berusia 29-35 tahun yaitu 6.67% atau berjumlah 14 responden. Responden berusia 36-42 yaitu 46.19% atau berjumlah 97 responden. Responden berusia 43-49 yaitu 31.9% atau sebanyak 67 responden dan responden yang berusia di atas 50 tahun yaitu 15.24% atau sebanyak 32 responden. Mayoritas responden yang terpilih pada penelitian mengenai Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari ada pada rentang usia 36-42 tahun.



**Grafik 4.3****Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2016

Berdasarkan grafik 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 5 responden berpendidikan SD atau sekitar 2.38%, 58 responden berpendidikan SMP atau sekitar 27.61%, 135 responden berpendidikan SMA atau sekitar 64.28%, dan 12 responden berpendidikan Strata-1 atau sekitar 5.71%. Mayoritas responden yang terpilih pada penelitian mengenai Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah responden yang berpendidikan SMA.

#### **4.2 Uji Validitas Instrumen**

Pada penelitian ini, analisis data yang pertama kali dilakukan yaitu dengan melakukan uji validitas instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi

ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu angket. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan di ukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Pada uji validitas ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 10 responden terlebih dahulu. Artinya, apabila sampel yang 10 di dapat valid secara keseluruhan, maka sisa sampel dapat dilanjutkan penyebarannya dalam pengambilan data tetapi apabila ada pada sampel yang di sebar tersebut instrumennya yang tidak valid maka instrumen tersebut dihapus/di ganti dengan instrumen baru sebagai pengganti instrumen yang tidak valid yang kemudian angket tersebut di sebar dari awal lagi jika instrumen yang sudah tersebar sebelumnya ada yang tidak mewakili indikator anda. Tetapi pada percobaan penyebaran awal angket ada instrumen yang tidak valid sedangkan masih ada instrumen lain pada indikator yang sama maka instrumen yang tidak valid tersebut dihapus dan kemudian sisa angket dapat di sebar kembali.

**Tabel 4.1****Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian**

No	Koefisien Korelasi (r hitung)	r table	Keputusan
1	0.610	0.181	VALID
2	0.739	0.181	VALID
3	0.806	0.181	VALID
4	0.483	0.181	VALID
5	0.866	0.181	VALID
6	0.832	0.181	VALID
7	0.786	0.181	VALID
8	0.794	0.181	VALID
9	0.641	0.181	VALID
10	0.392	0.181	VALID
11	0.855	0.181	VALID
12	0.776	0.181	VALID
13	0.687	0.181	VALID
14	0.638	0.181	VALID
15	0.868	0.181	VALID
16	0.855	0.181	VALID
17	0.654	0.181	VALID
18	0.660	0.181	VALID
19	0.657	0.181	VALID
20	0.638	0.181	VALID
21	0.638	0.181	VALID
22	0.912	0.181	VALID
23	0.868	0.181	VALID
24	0.855	0.181	VALID
25	0.638	0.181	VALID
26	0.814	0.181	VALID
27	0.906	0.181	VALID
28	0.926	0.181	VALID
29	0.926	0.181	VALID
30	0.638	0.181	VALID
31	0.855	0.181	VALID
32	0.889	0.181	VALID
33	0.897	0.181	VALID

34	0.471	0.181	VALID
35	0.884	0.181	VALID
36	0.364	0.181	VALID
37	0.730	0.181	VALID
38	0.799	0.181	VALID
39	0.799	0.181	VALID
40	0.878	0.181	VALID
41	0.759	0.181	VALID
42	0.510	0.181	VALID
43	0.773	0.181	VALID
44	0.567	0.181	VALID
45	0.623	0.181	VALID
46	0.855	0.181	VALID
47	0.889	0.181	VALID
48	0.459	0.181	VALID
49	0.510	0.181	VALID
50	0.889	0.181	VALID
51	0.889	0.181	VALID
52	0.595	0.181	VALID
53	0.557	0.181	VALID
54	0.889	0.181	VALID
55	0.631	0.181	VALID

Sumber: Hasil SPSS 20.0

Adapun kriteria item/butir instrumen yang digunakan adalah di mana jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan valid, dan jika  $r$  hitung  $\leq$   $r$  tabel berarti item/butir dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai  $r$  hitung diperoleh dari perhitungan statistik korelasi *Product Moment* dengan bantuan SPSS statistik versi 20.0. Perolehan nilai 0,181 dari  $r$  tabel merupakan perolehan dari korelasi *product moment* dengan tingkat kesalahan 1% tingkat signifikansi untuk uji satu arah. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 55 item/butir instrumen sudah valid.

### 4.3 Uji Reliabilitas

Sugiyono (2007:137) mendefinisikan instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang bila digunakan berkali-kali untuk mengukur objek yang sama. Pendekatan yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah pendekatan reliabilitas konsistensi internal. Adapun teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah Realibitas merupakan suatu alat ukur yang mendeteksi sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.

Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Meskipun ada toleransi jika ada perubahan jika perbedaan tersebut sangat besar dari waktu ke waktu maka hasil pengukuran tidak dapat dipercaya (tidak reliabel). Uji ini digunakan untuk menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi dalam hasil pengukuran. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *alpha* pada output pengolahan data program SPSS 20.0 dengan membandingkan nilai  $r_{\text{tabel}}$  dengan  $r_{\text{hasil}}$  nilai  $r_{\text{tabel}}$  dengan nilai signifikan dengan nilai N 210. *Alpha Cronbach* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pernyataan dalam kuesioner.

Hitung reliabilitas instrument bertujuan untuk mengetahui konsistensi suatu instrument. Koefisiens reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	210	100
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	210	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Tabel 4.3**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.754	55

Reliabilitas =  $r_{hitung} > r_{tabel}$   
 =  $0.754 > 0.181$   
 = Diterima

Nilai di atas menunjukkan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $0,754 > 0.181$ .

Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa, butir instrumen penelitian ini adalah reliabel. Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini.

#### 4.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis yaitu Persentasi Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang tidak lebih dari 60%.

Berdasarkan hipotesis deskriptif, variabel yang diuji bersifat mandiri dan sampelnya hanya ada satu, maka peneliti menggunakan rumus *one sample t-test* pada SPSS 20.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
TOTAL	210	113.4762	11.23869	.77554

#### One-Sample Test

	Test Value = 95					
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
TOTAL	23.824	209	.000	18.47619	16.9473	20.0051

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai t hitung sebesar 23.824. Sementara nilai t tabel dengan derajat kebebasan (df) 209 dan taraf presisi 1% diperoleh 2.326. Maka  $t_{table} > t_{hitung} = 2.326 < 23.824$ , maka  $H_a$  dapat ditolak dan  $H_o$  diterima.

#### 4.5 Analisis Data

Analisis Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang menunjukkan hasil yang cukup variatif. Dilihat dari teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori evaluasi William Dunn yang memiliki enam indikator dalam mengukur baik atau tidaknya suatu program diantaranya efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan data dari hasil penelitian, peneliti menggunakan kuesioner yang disebar kepada

masyarakat. Kuesioner ini disebar kepada 210 responden dengan jumlah pertanyaan yakni 55 pertanyaan hasil penguraian dari enam indikator. Skala yang dipakai dalam kuesioner adalah skala *Likert*, dengan pilihan jawaban sangat setuju bernilai 4, setuju bernilai 3, tidak setuju bernilai 2 dan sangat tidak setuju bernilai 1. Maka semakin tinggi nilai yang didapatkan maka semakin baik pula hasil evaluasi Program MKRPL di Desa Menes. Pemaparan jawaban responden atas kuesioner ini akan digambarkan dalam bentuk grafik disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pernyataan yang diajukan melalui kuesioner berdasarkan indikator dalam teori tersebut. Adapun pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:



**Grafik 4.4**  
**Indikator Efektifitas**



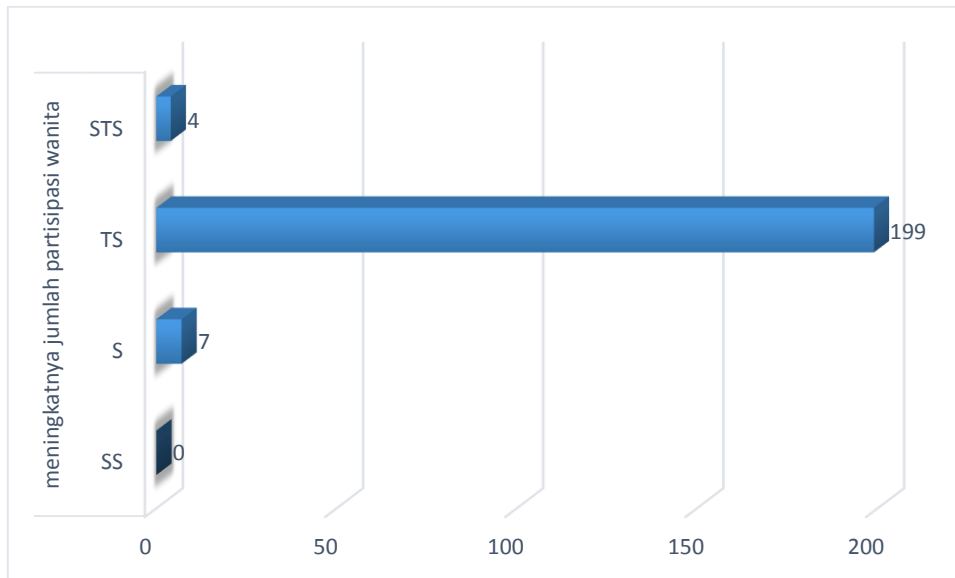
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan dari Kuesioner Indikator Efektifitas

Berdasarkan grafik 4.4 di atas, hasil jawaban responden terhadap indikator Efektifitas Program MKRPL masih rendah, seperti meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (2.01), Terciptanya model pengembangan pangan pokok lokal (makanan khas daerah) sesuai dengan karakteristiknya (2.01), Meningkatnya motivasi masyarakat dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.01), Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.00), Meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.00),

Adanya penurunan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal (2.08), Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat (2.06), Tanggung jawab yang dipegang oleh setiap anggota Kelompok Wanita Tani untuk menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sudah baik (2.06), Pelaksanaan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sesuai dengan karakteristik lahan pertanian (2.06), dan Peningkatan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.1). Dari hasil jawaban tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan nilainya masih berada dikisaran 2.00 sampai 2.10 dari skala 4.00 yang dimana masih termasuk kecil nilainya.

Grafik 4.5

## Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Efektivitas

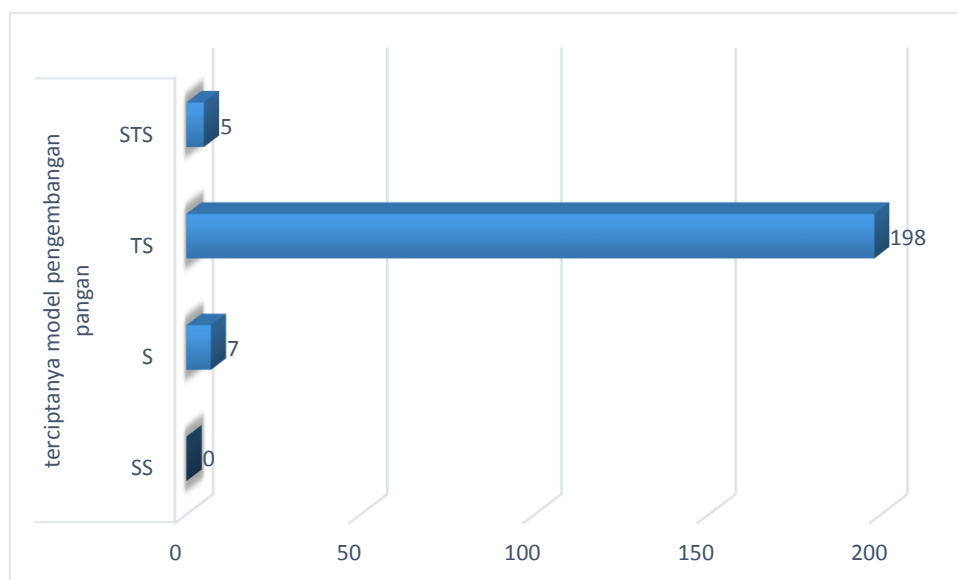


Pertanyaan pertama yakni meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang, dan aman memiliki nilai 2.01 dari skala 4.00. Hampir semua responden mengatakan bahwa partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani sangat minim. Anggota yang aktif berpartisipasi hanya beberapa orang saja seperti ketua kelompok, sekretaris, bendahara, koordinator RT, dan beberapa anggota saja. Banyak masyarakat yang hanya saling mengandalkan satu sama lain dalam kegiatan penyediaan pangan sehingga untuk tingkat partisipasi perempuan sendiri bisa dibilang belum meningkat. Angka 2.01 didapat dari 7 responden menjawab setuju, 199 responden menjawab tidak setuju dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju. Ini menandakan bahwa dari 210 orang anggota Kelompok Wanita Tani, 198 orang diantaranya menjawab tidak setuju jika partisipasi wanita meningkat. Hal

ini dikarenakan yang aktif dalam menjalankan program MKRPL ini hanya beberapa orang saja. Biasanya yang aktif adalah orang-orang yang ada dalam susunan organisasi seperti ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, serta koordinator tiap RT. Sementara sisanya kurang aktif. Banyak alasan yang keluar mengapa mereka yang tidak aktif dikarenakan kesibukan masing-masing pekerjaan, adanya rasa malas dan bosan dengan kegiatan yang ada, serta belum paham sepenuhnya teknologi pertanian sehingga ada saja yang ingin aktif namun terkendala dalam pemahamannya dalam dunia pertanian.

**Grafik 4.6**

**Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Efektivitas**

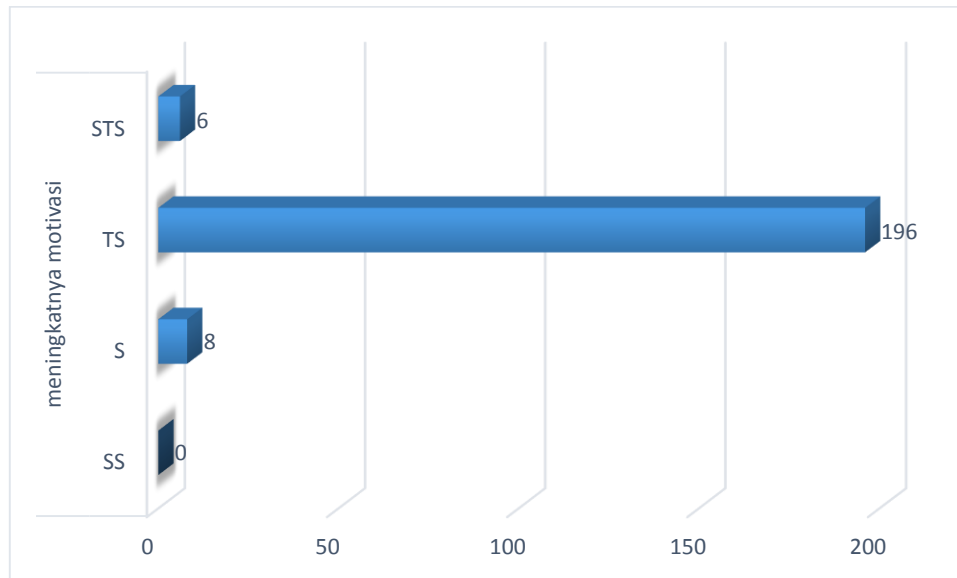


Pertanyaan kedua yakni terciptanya model pengembangan pangan pokok lokal (makanan khas daerah) sesuai dengan karakteristiknya. Pertanyaan ini memiliki nilai 2.01 dari skala 4.00 yang didapat dari 7 orang

responden menjawab setuju, 198 orang responden menjawab tidak setuju, dan 5 orang responden menjawab sangat tidak setuju. Mayoritas responden mengungkapkan belum terciptanya wadah pengembangan hasil pangan yang didapat/dipanen guna meningkatkan kreatifitas masyarakat sendiri. Padahal jika tercipta wadah untuk pengembangan pangan pokok lokal bukan tidak mungkin manfaat dari program MKRPL bisa terasa oleh masyarakat dan secara tidak bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang menjawab setuju karena pernah belajar dari salah satu anggota KWT seperti bagaimana caranya membuat es krim dari ubi ungu, membuat keripik pisang, keripik ubi, dan hasil olahan lainnya dari panen yang didapat dari pekarangan rumah masing-masing.

Grafik 4.7

### Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Efektivitas

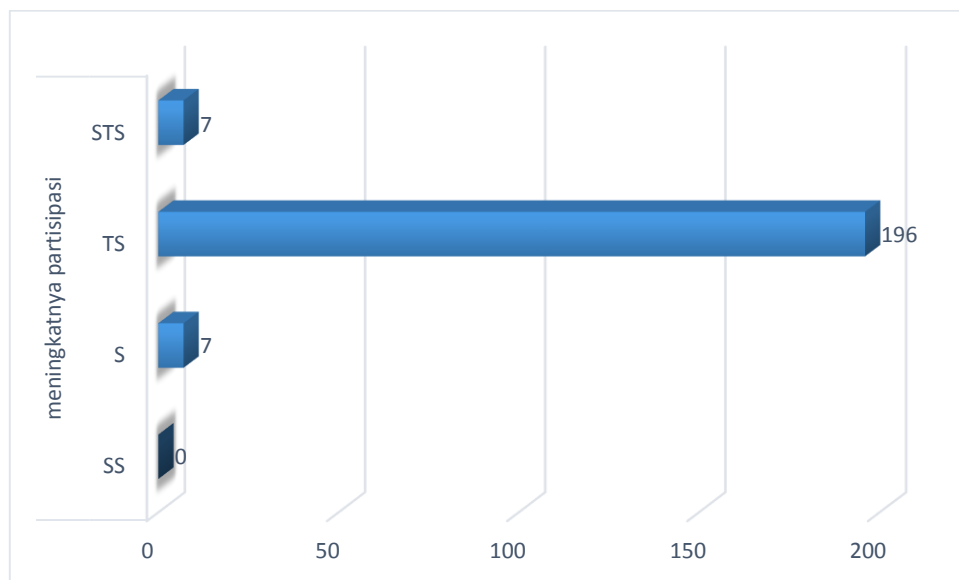


Pertanyaan ketiga yakni meningkatnya motivasi masyarakat dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pertanyaan ini memiliki nilai 2.01 dari skala 4.00 yang didapat dari 8 responden menjawab setuju, 196 menjawab tidak setuju, dan 6 orang menjawab sangat tidak setuju. Jawaban mayoritas responden memang masuk akal. Masih minimnya motivasi masyarakat dalam menjalankan program ini menjadi salah satu faktor belum efektifnya program MKRPL. Motivasi masyarakat hanya bagus diawal terbentuknya program saja, namun lambat laun mulai memudar. Ini disebabkan kurang berperannya pendamping dalam mendampingi masyarakat sehingga masyarakat sendiri seperti kebingungan dalam menjalankan program ini. Karena hal ini motivasi masyarakat sendiri menjadi sangat kecil. Padahal menurut masyarakat peran pendamping sangatlah diperlukan guna menstimulus untuk bisa lebih aktif kembali

dalam menjalankan program MKRPL. Untuk mereka yang beralasan setuju karena mereka masih menjalankan program ini dengan masih memanfaatkan lahan pekarangannya karena mereka sudah tahu manfaat dari program MKRPL sendiri.

**Grafik 4.8**

**Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Efektivitas**

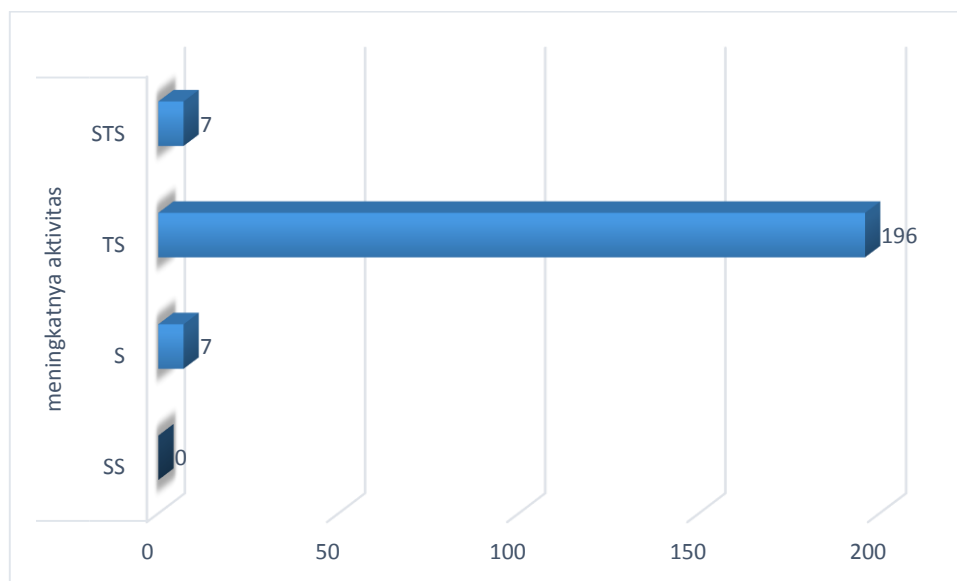


Pertanyaan keempat yakni meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pada poin ini responden yang menjawab setuju yakni 7 responden, 196 responden menjawab tidak setuju, dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju sehingga memiliki nilai 2.00 dari skala 4.00. Hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, masyarakat berpendapat bahwa partisipasi mereka berkurang karena minimnya peran pendamping sehingga banyak masyarakat yang mulai berkurang rasa kepeduliannya terhadap program

MKRPL sehingga menyebabkan tingkat partisipasi yang rendah. Selain itu, masyarakat terkadang terlalu mengandalkan beberapa orang saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat hanya berpusat pada segelintir orang saja. Sedangkan mereka yang menjawab setuju berpandangan pada saat awal mula dijalankannya program MKRPL ini. Hampir semua anggota KWT turut ikut andil dalam menjalankan dan mensukseskan program MKRPL tersebut.

**Grafik 4.9**

**Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Efektivitas**



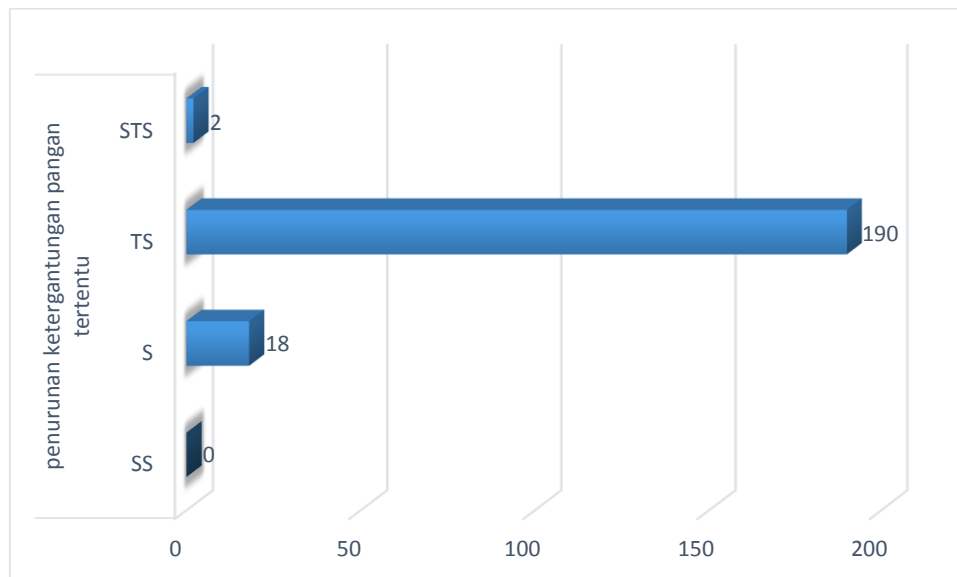
Pertanyaan kelima yakni meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pertanyaan ini merupakan dampak dari dua pertanyaan sebelumnya. Masyarakat juga tidak menampik bahwa intensitas kegiatan dalam menjalankan program MKRPL ini masih jarang dilakukan. Kegiatan seperti penanaman bibit di



demplot, kegiatan piket tiap minggu, rapat tiap minggu, kegiatan pemberian hadiah pada masyarakat dan warga se-RT yang aktif juga sudah mulai jarang dilakukan. Masyarakat berpendapat bahwa penurunan jumlah aktivitas disebabkan oleh mudah jenuhnya masyarakat dalam setiap kegiatan yang dijalani. Kurangnya kreatifitas dan minimnya inovasi yang dibuat masyarakat sendiri juga disinyalir sebagai faktor minimnya aktivitas yang dilakukan. Tak heran jika pada pertanyaan ini responden yang menjawab setuju hanya 7 responden dan seperti biasa jumlah responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 196 responden dan 7 responden menjawab sangat tidak setuju sehingga pertanyaan ini memiliki nilai 2.00 dari skala 4.00.

Grafik 4.10

### Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Efektivitas

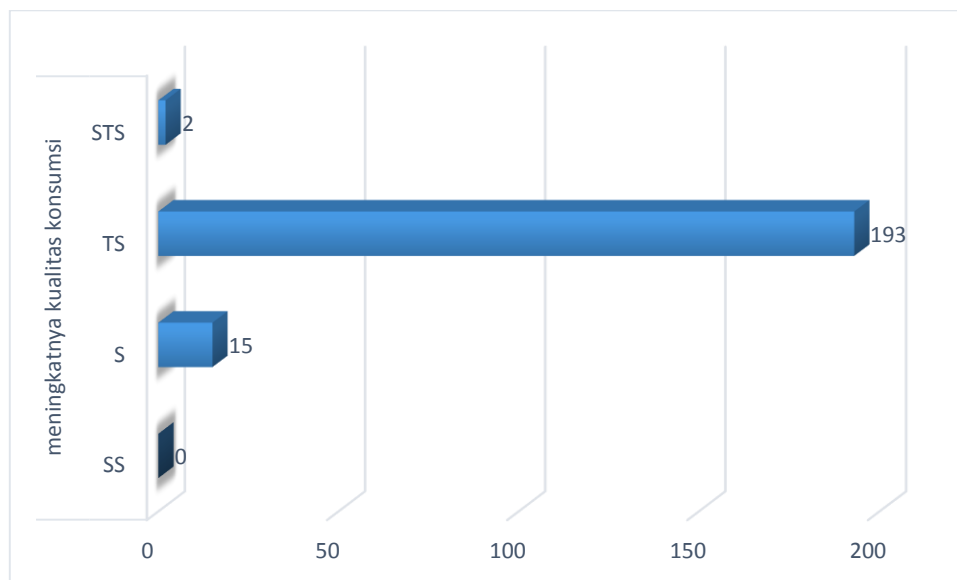


Pertanyaan keenam yakni adanya penurunan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal. Pada pertanyaan ini, responden yang menjawab setuju berjumlah 18 orang, menjawab tidak setuju 190 orang dan yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 2 orang serta memiliki nilai 2.08 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju berpendapat bahwa dengan adanya MKRPL masih belum mampu menurunkan ketergantungan mereka terhadap kebutuhan pangan tertentu semisal cabai, bawang, dan lain sebagainya. Banyak masyarakat berpendapat kuantitas hasil panen yang belum mencukupi disebabkan oleh luas pekarangan yang kecil serta belum pahamnya dengan teknologi pangan sehingga banyak yang tidak tumbuh sesuai dengan target yang diharapkan masyarakat. Ini menyebabkan masyarakat tetap saja membeli bahan pangan yang

dibutuhkan karena tujuan MKRPL belum tercapai. Sedangkan bagi mereka yang menjawab setuju karena menurut mereka dengan menjalankan program MKRPL dengan cara memanfaatkan luas pekarangan yang mereka miliki bisa mengurangi kebutuhan pangan tertentu saat masa panen telah datang.

**Grafik 4.11**

**Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Efektivitas**

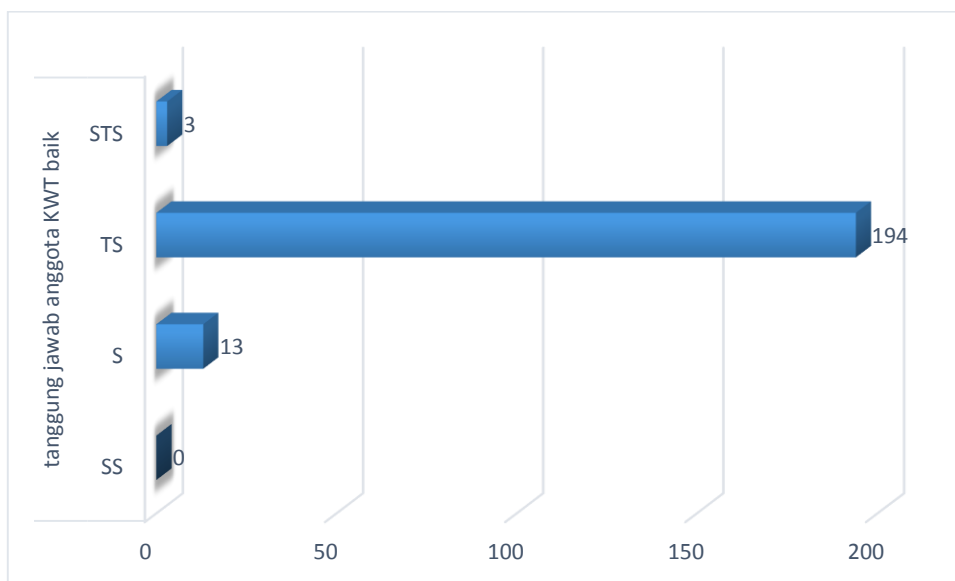


Pertanyaan ketujuh yakni meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat. Pada pertanyaan ini, responden yang menjawab setuju berjumlah 15 orang, 193 yang menjawab tidak setuju, dan 2 orang yang menjawab sangat tidak setuju dan memiliki nilai 2.06 dari skala 4.00. Menurut responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, sampai saat ini belum adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan karena setelah berjalannya program MKRPL pun semua bahan makanan yang

dikonsumsi masyarakat hampir tidak ada perubahan yang signifikan sehingga meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat belum tercapai. Sedangkan bagi mereka yang menjawab setuju karena mereka merasakan ada perubahan dari segi makanan yang mereka makan seperti sayuran yang lebih segar rasanya karena tidak memakai bahan-bahan kimia sehingga mereka merasakan adanya peningkatan kualitas konsumsi meskipun belum terlalu signifikan.

**Grafik 4.12**

**Hasil Pertanyaan Kedelapan Indikator Efektivitas**

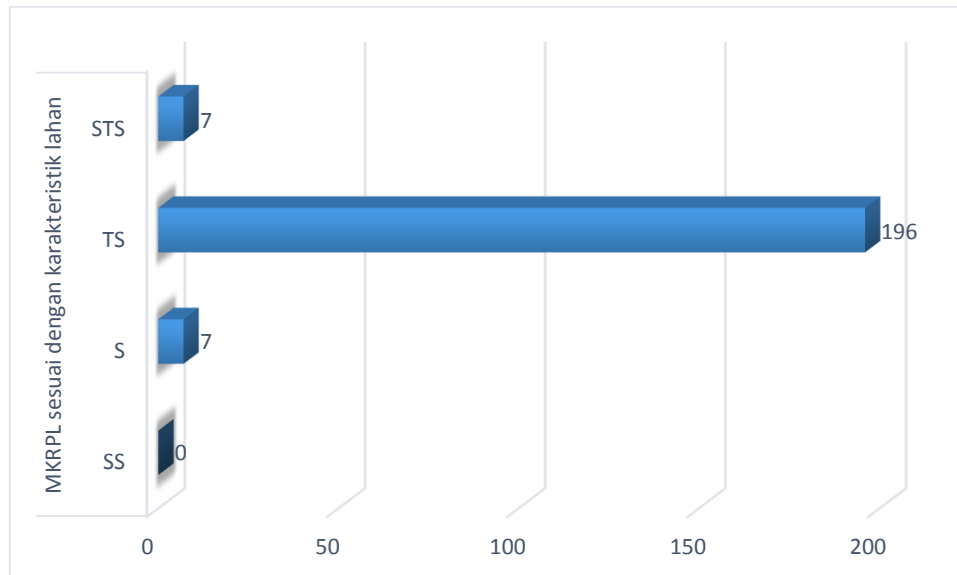


Pertanyaan kedelapan yakni tanggung jawab yang dipegang oleh setiap anggota Kelompok Wanita Tani untuk menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sudah baik. Sebanyak 13 responden menjawab setuju karena memang hanya segelintir orang sajalah yang masih aktif dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program

MKRPL. Namun hampir semua responden atau sekitar 194 responden yang menjawab tidak setuju dan 3 responden menjawab sangat tidak setuju sepakat bahwa tanggung jawab yang diemban oleh semua anggota Kelompok Wanita Tani masih kurang begitu baik. Masih banyaknya masyarakat yang saling mengandalkan satu sama lain, jumlah masyarakat yang hadir saat rapat sedikit, jumlah masyarakat yang melakukan perawatan demplot dan Kebun Bibit Desa juga sedikit. Ini jelas menggambarkan bahwa tanggung jawab yang dipegang setiap anggota Kelompok Wanita Tani dalam menjalankan program MKRPL masih bisa dibilang belum begitu baik. Tak heran jika pada pertanyaan ini hanya memiliki nilai 2.05 saja dari skala 4.00.

Grafik 4.13

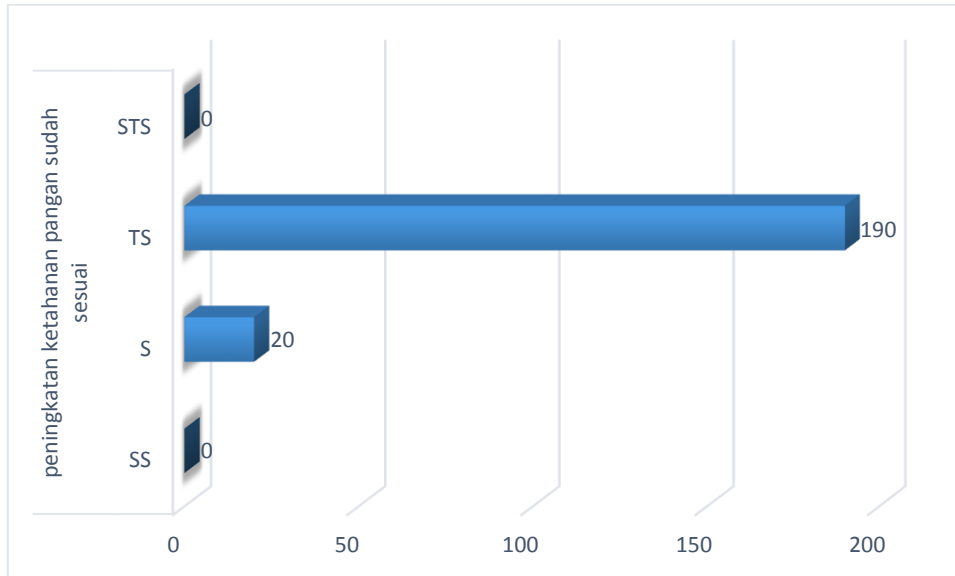
### Hasil Pertanyaan Kesembilan Indikator Efektivitas



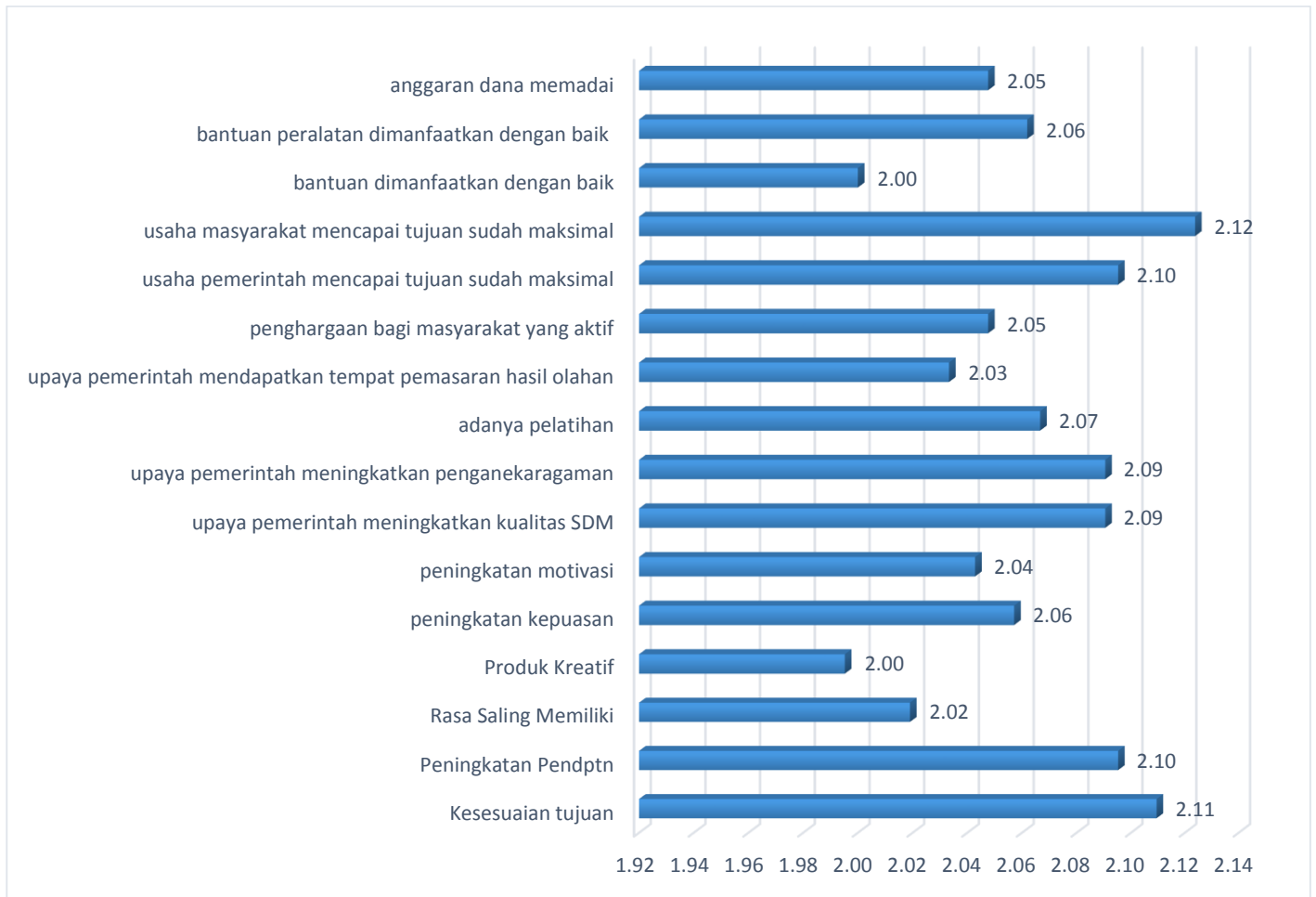
Pertanyaan kesembilan yakni pelaksanaan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sesuai dengan karakteristik lahan pertanian. Responden yang menjawab setuju berjumlah 7 orang, yang menjawab tidak setuju 196 orang dan yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 7 orang. Sebenarnya hampir semua masyarakat banyak berpendapat bahwa karakteristik lahan untuk menjalankan program MKRPL sudah sesuai. Namun yang menjadi kendala yakni luas lahan pekarangan yang ada. Banyak masyarakat yang memiliki lahan luas namun dipergunakan untuk hal lain selain menyediakan lahan untuk penanaman bibit di dalam polybag sesuai dengan program MKRPL. Hal ini menyebabkan program MKRPL tidak berjalan maksimal. Apalagi lahan demplot tempat yang vital dari program MKRPL sudah beralih fungsi karena lahan tersebut menggunakan lahan milik orang lain. Pertanyaan ini memiliki nilai 2.00 dari skala 4.00.

Grafik 4.14

### Hasil Pertanyaan Kespuluh Indikator Efektivitas



Pertanyaan kesepuluh yakni peningkatan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 20 orang dan yang menjawab tidak setuju berjumlah 190 orang serta memiliki nilai 2.10 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju berpendapat bahwa peningkatan ketahanan pangan belum bisa dirasakan. Kegiatan optimalisasi pekarangan yang dicanangkan dalam program MKRPL masih belum berjalan maksimal karena mayoritas masyarakat tidak menggunakan lahan pekarangannya untuk ditanami bibit-bibit tanaman sehingga masih belum sesuai dengan tujuan awal dibentuknya program MKRPL itu sendiri. Sedangkan mereka yang menjawab setuju karena mereka masih menjalankan program MKRPL dengan baik sehingga ketahanan pangan mereka sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya program MKRPL.

**Grafik 4.15****Indikator Efisiensi**

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan dari Kuesioner Indikator Efisiensi

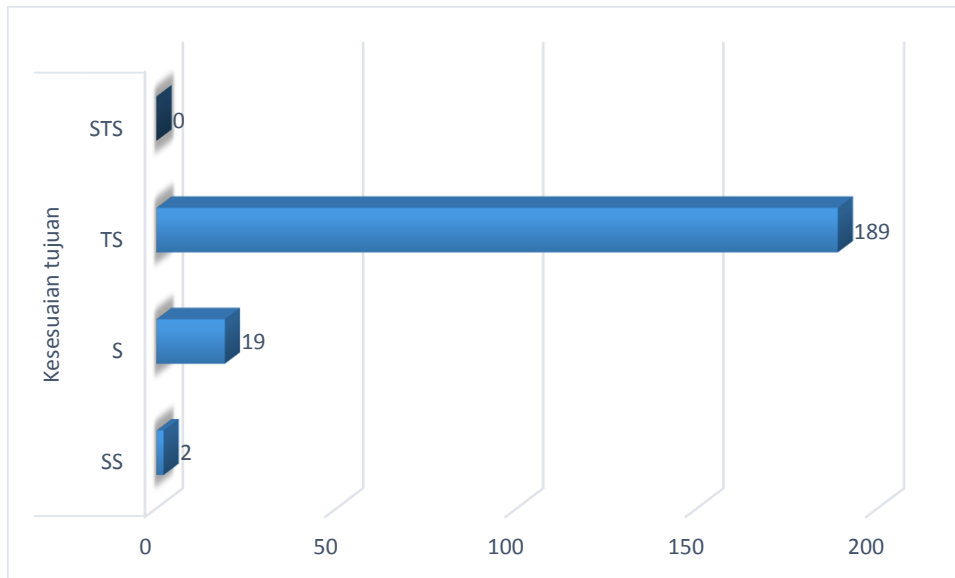
Berdasarkan grafik 4.15, hasil jawaban responden terhadap indikator Efisiensi Program MKRPL masih rendah, seperti Peningkatan ketahanan pangan Desa Menes sudah sesuai dengan tujuan Program MKRPL (2.11), Adanya peningkatan pendapatan dengan adanya Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.10), Adanya rasa saling memiliki dari setiap anggota Kelompok Wanita Tani pada semua bentuk bantuan, serta infrastruktur Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.02),



Adanya hasil berupa Produk Kreatif dari olahan tanaman pangan (contoh: keripik bayam) (2.00), Adanya peningkatan kepuasan yang diperoleh masyarakat dari hasil Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.06), Adanya peningkatan motivasi masyarakat dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.04), Adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (berupa pelatihan, dan lain sebagiannya) (2.09), Adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan penganeekaragaman pangan (2.09), Adanya pelatihan dari pemerintah dalam pengolahan hasil Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.07), Adanya upaya pemerintah dalam mendapatkan tempat pemasaran hasil olahan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.03), Adanya pemberian penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.05), Usaha dari pemerintah dalam pencapaian tujuan Program MKRPL sudah maksimal (2.10), Usaha dari masyarakat dalam pencapaian tujuan Program MKRPL sudah maksimal (2.12), Dana yang diberikan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada (2.00), Semua bantuan berupa peralatan (parutan, plastik polybag, pupuk, bibit, dll) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada (2.06), dan Anggaran dana bantuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari yang diberikan sudah memadai (2.05). Dari hasil jawaban tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan nilainya masih jauh dari skala 4.00.

Grafik 4.16

### Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Efisiensi

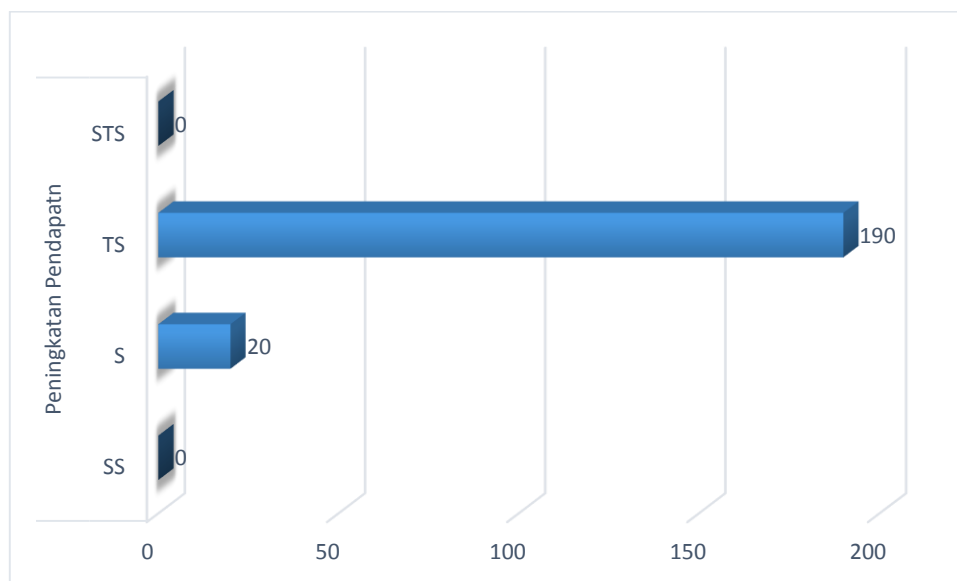


Pertanyaan pertama yakni peningkatan ketahanan pangan Desa Menes sudah sesuai dengan tujuan Program MKRPL. Jumlah responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 2 orang, yang menjawab setuju berjumlah 19 orang dan yang menjawab tidak setuju berjumlah 189 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.11 dari skala 4.00. Menurut pendapat responden yang menjawab tidak setuju, tujuan program MKRPL masih belum tercapai dengan maksimal seperti sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan pekarangannya secara lestari untuk budidaya tanaman seperti toga, tanaman pangan, buah, sayuran, dan lain sebagainya. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat sejak awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan penyempurnaan tersebut, diharapkan pula bahwa pembentukan kawasan rumah pangan akan berlanjut secara lestari. Itulah

yang diinginkan dan dimaksudkan dengan penambahan kata “lestari” pada konsep MKRPL sehingga berdampak pada adanya peningkatan ketahanan pangan. Sedangkan sebaliknya, mereka yang menjawab setuju dan sangat setuju berpendapat bahwa mereka merasakan adanya peningkatan ketahanan pangan ketika menjalankan program MKRPL dengan baik. Jika masa panen datang, maka dengan hasil panen itu mereka merasa bahwa tujuan MKRPL sudah sesuai dengan apa yang mereka rasakan.

**Grafik 4.17**

**Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Efisiensi**

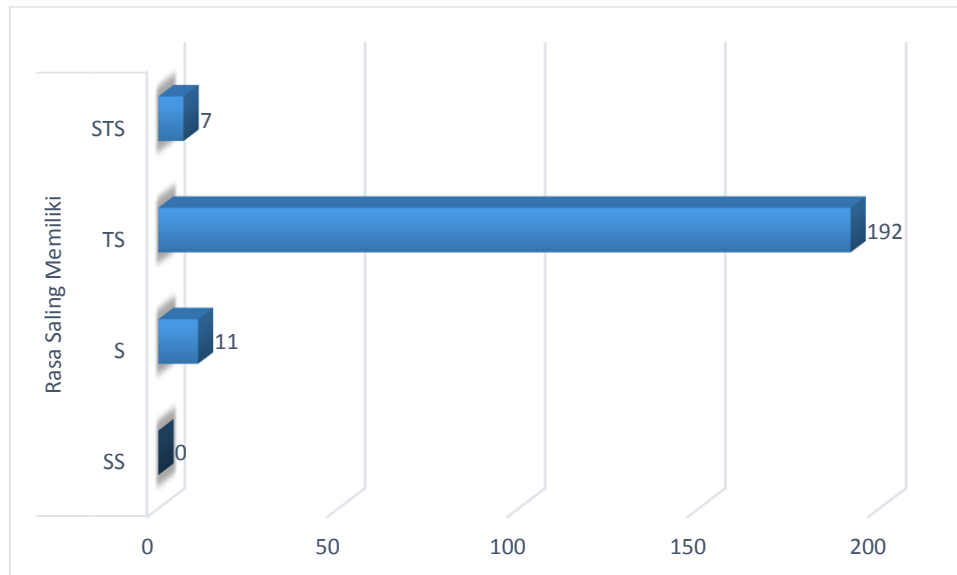


Pertanyaan kedua yakni adanya peningkatan pendapatan dengan adanya Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Responden yang menjawab setuju berjumlah 20 orang dan yang menjawab tidak setuju berjumlah 190 orang serta memiliki nilai rata-rata 2.10 dari skala 4.00. Menurut responden, mereka tidak setuju karena hal ini sangat sulit untuk

dilakukan. Sulitnya meningkatkan pendapatan melalui program MKRPL dikarenakan minimnya kreatifitas dan inovasi masyarakat untuk mengolah hasil dari panen itu sendiri serta sulitnya mencari atau mendapatkan target pasar yang hendak dijadikan target pemasaran produk hasil olahan atau dalam bentuk sayur/buah yang masih segar sehingga untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan hasil panen ini dirasa masih sulit untuk dilakukan. Mereka yang menjawab setuju pun sebenarnya bukan tentang peningkatan pendapatan karena mereka bukan menjual hasil panen yang didapat melainkan dikonsumsi secara pribadi sehingga bisa menghemat pengeluaran kebutuhan mereka.

Grafik 4.18

### Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Efisiensi

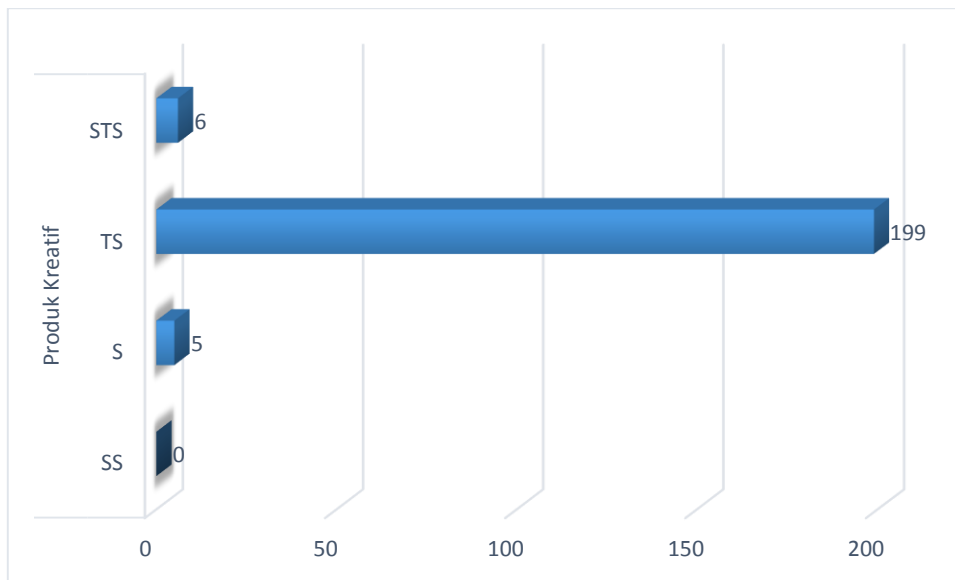


Pertanyaan ketiga yakni adanya rasa saling memiliki dari setiap anggota Kelompok Wanita Tani pada semua bentuk bantuan, serta infrastruktur Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Responden yang menjawab setuju berjumlah 11 orang, yang menjawab tidak setuju berjumlah 192 orang, dan yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 7 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.02 dari skala 4.00. Responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju mengatakan bahwa rasa saling memiliki dalam memelihara semua infrastruktur penunjang kegiatan program MKRPL hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Rasa acuh masyarakat disebabkan oleh mudah jenuhnya pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kesibukan masing-masing juga menjadi alasan mengapa rasa memiliki masyarakat pada segala infrastruktur penunjang kegiatan masih rendah. Sedangkan mereka yang menjawab setuju karena hanya mereka

yang masih aktif serta masih memiliki rasa memiliki serta tanggung jawab dengan semua bantuan serta infrastruktur yang ada.

**Grafik 4.19**

**Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Efisiensi**

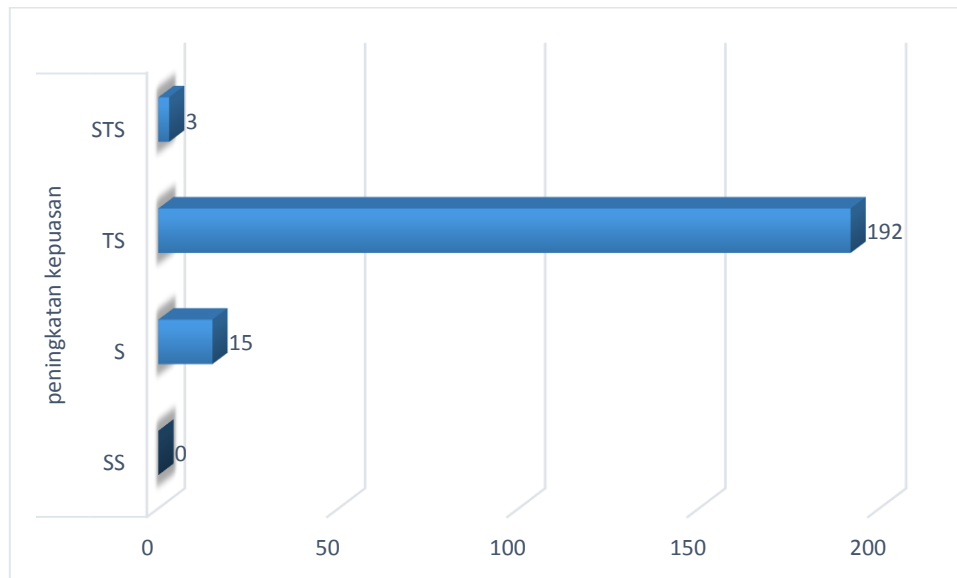


Pertanyaan keempat yakni adanya hasil berupa Produk Kreatif dari olahan tanaman pangan. Responden yang menjawab setuju berjumlah 5 responden, 199 responden untuk yang menjawab tidak setuju, dan 6 responden yang menjawab sangat tidak setuju dan memiliki nilai rata-rata 2.00 dari skala 4.00. Hampir sama dengan pertanyaan kedua, responden yang menjawab setuju dan sangat tidak setuju berpendapat bahwa produk kreatif dari hasil olahan panen tidak ada sama sekali sehingga pendapatan masyarakat sendiri tak mengalami peningkatan. Padahal salah satu tujuan program MKRPL adalah mengembangkan kegiatan ekonomi produktif

keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri. Lagi-lagi masalah kreatifitas masyarakat yang menjadi faktor utama mengapa pada poin ini tidak berjalan semestinya. Masyarakat menilai kurang mampunya mereka dalam mengolah hasil panen menjadi barang jual yang menarik adalah hal yang membuat produk kreatif ini belum bisa dibuat hingga saat ini. Sedangkan mereka yang menjawab setuju karena mereka pernah mencoba membuat olahan seperti es krim ubi ungu, keripik singkong, keripik pisang, dan lain sebagiannya.

Grafik 4.20

### Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Efisiensi



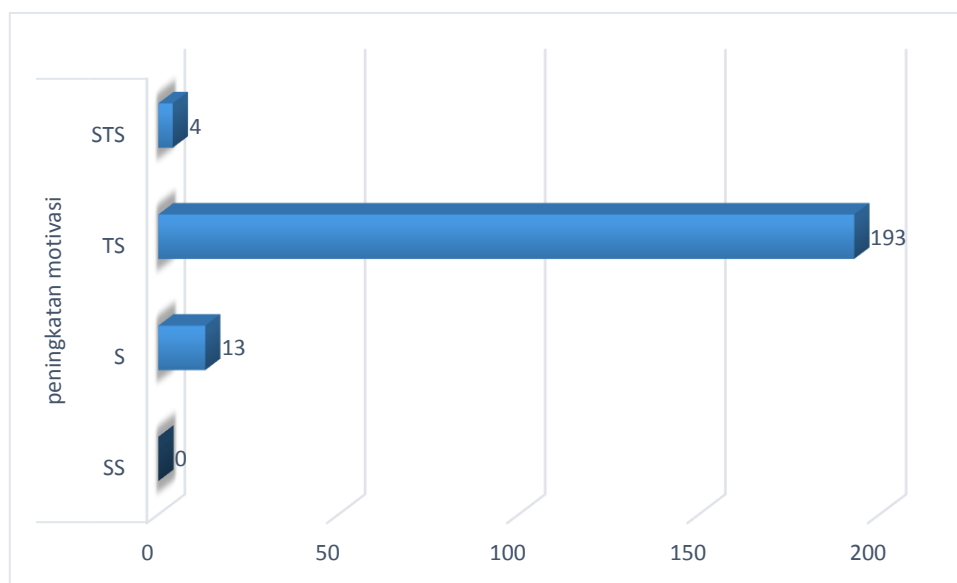
Pertanyaan kelima yakni adanya peningkatan kepuasan yang diperoleh masyarakat dari hasil Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Responden yang menjawab setuju berjumlah 15 orang, 192 responden menjawab tidak setuju dan 3 orang menjawab sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Menurut responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, kepuasan yang dirasakan dari adanya program MKRPL ini masih belum terlalu baik. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat program MKRPL sehingga untuk kepuasan masyarakat sendiri masih rendah. Rasa ketidakpuasan masyarakat memang beralasan. Belum mampunya MKRPL untuk meningkatkan pendapatan mereka adalah alasan utama mereka belum merasa puas dengan program MKRPL. Sedangkan bagi mereka yang



merasa puas karena hasil panen yang didapat mampu mengurangi pengeluaran mereka untuk membeli sayuran guna keperluan keluarga mereka.

**Grafik 4.21**

**Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Efisiensi**

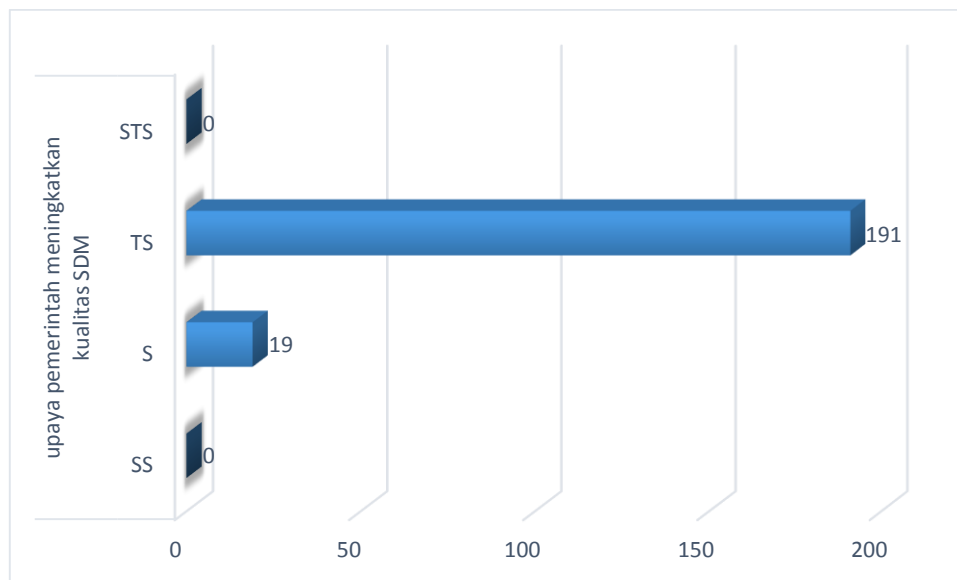


Pertanyaan keenam yakni adanya peningkatan motivasi masyarakat dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Responden yang menjawab setuju berjumlah 13 orang, 193 responden menjawab tidak setuju dan 4 responden menjawab sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 2.04 dari skala 4.00. Motivasi masyarakat sendiri terkait adanya program MKRPL diawal berjalannya program bisa dibilang baik. Masyarakat terlihat antusias dalam menjalankan program ini. Masih bisa dilihat bagaimana pekarangan masyarakat dipenuhi dengan tanaman-

tanaman seperti sayuran, buah-buahan, tanaman toga, dan lain sebagainya. Namun semakin lama motivasi masyarakat semakin menurun karena kejenuhan terhadap kegiatan MKRPL. Kurangnya kreatifitas dalam menciptakan kegiatan yang rutin dilakukan tiap hari tersebut menjadi alasan utama masyarakat mudah jenuh. Responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju menuturkan bahwa kegiatan sama yang dilakukan secara terus menerus dengan intensitas yang sering memang bisa menyebabkan kejenuhan, apalagi dikalangan masyarakat sehingga masyarakat sendiri menjadi acuh tak acuh dalam menjalankan program MKRPL. Untuk responden yang menjawab setuju karena motivasi mereka meningkat lantaran dengan adanya program MKRPL mereka mampu menekan angka pengeluaran untuk keperluan konsumsi keluarganya.

Grafik 4.22

### Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Efisiensi

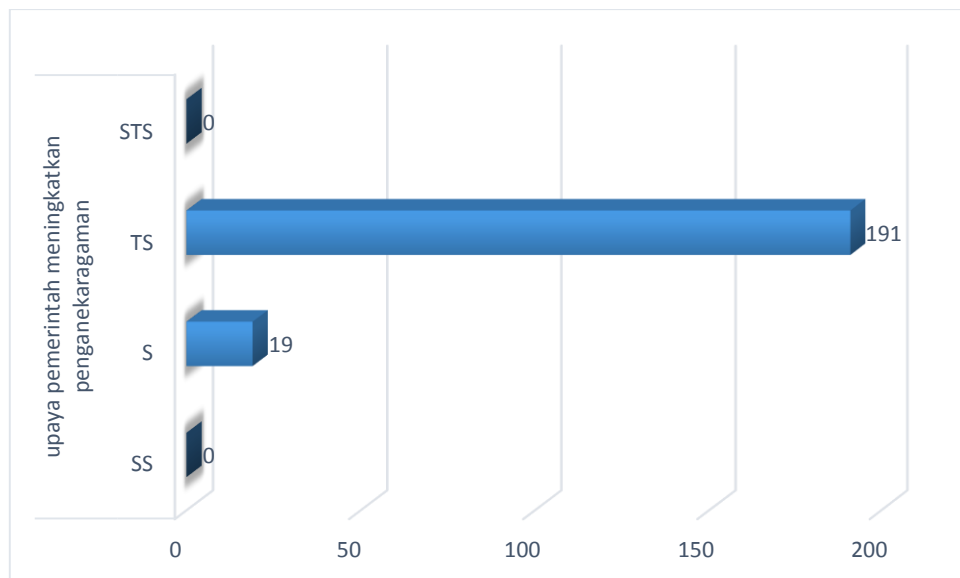


Pertanyaan ketujuh yakni adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (berupa pelatihan, dan lain sebagainya). 19 responden menjawab setuju dan 191 responden menjawab tidak setuju dengan nilai rata-rata 2.09 dari skala 4.00. Menurut pendapat masyarakat, pada awalnya memang sering memberi pelatihan atau penyuluhan seperti bagaimana caranya membuat pupuk kompos, bagaimana caranya membuat pestisida, namun pemerintah belum pernah memberikan pelatihan dalam pembuatan barang hasil olahan panen yang bisa dijual oleh masyarakat seperti pelatihan pembuatan keripik pisang, pembuatan keripik ubi ungu, dan lain sebagainya sehingga peran pemerintah dalam hal upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya masyarakat Desa

Menes masih terbilang kurang. Sementara responden yang menjawab setuju mengatakan bahwa pelatihan dari pemerintah sudah baik hanya saja masyarakatnya saja yang masih terlalu mengandalkan peran dari pemerintah. Seharusnya masyarakat juga dituntun untuk aktif dalam kegiatan MKRPL.

**Grafik 4.23**

**Hasil Pertanyaan Kedelapan Indikator Efisiensi**

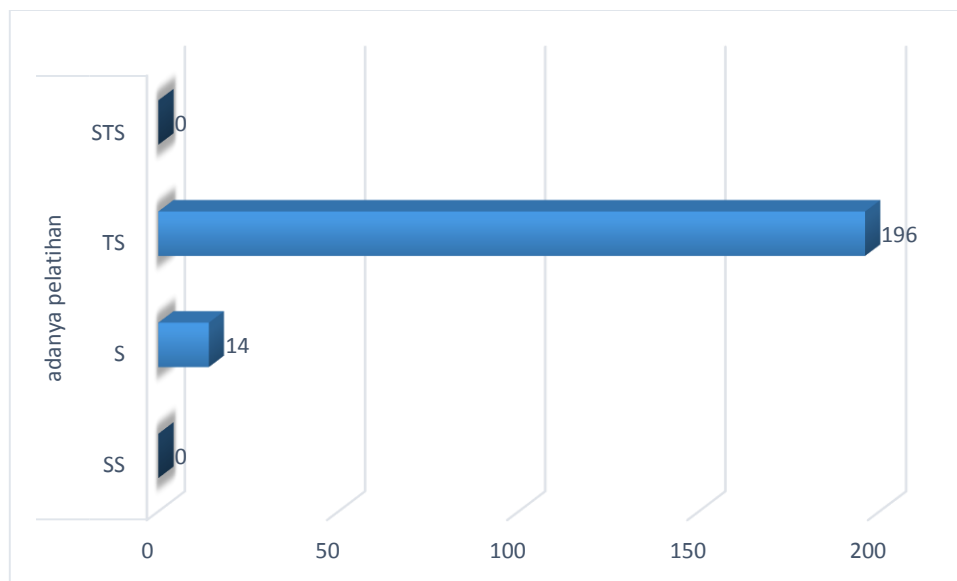


Pertanyaan kedelapan yakni adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan penganeekaragaman pangan. Responden yang menjawab setuju berjumlah 19 orang dan responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 191 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.09 dari skala 4.00. Sama halnya seperti pertanyaan di atas, responden yang menjawab tidak setuju mengatakan upaya pemerintah dalam hal meningkatkan penganeekaragaman

pangan masih dinilai kurang oleh masyarakat. Masyarakat menilai pemerintah hanya berperan dalam hal sosialisasi pengenalan program MKRPL di awal program meskipun itu tidak intens. Untuk dalam hal penganekaragaman pangan, belum terlihat sama sekali peran langsung dari pemerintah. Sedangkan responden yang menjawab setuju mengatakan upaya pemerintah sudah terlihat meskipun tidak signifikan seperti pemberian bibit tanaman yang beragam untuk ditanam di demplot dan Kebun Bibit Desa.

**Grafik 4.24**

**Hasil Pertanyaan Kesembilan Indikator Efisiensi**

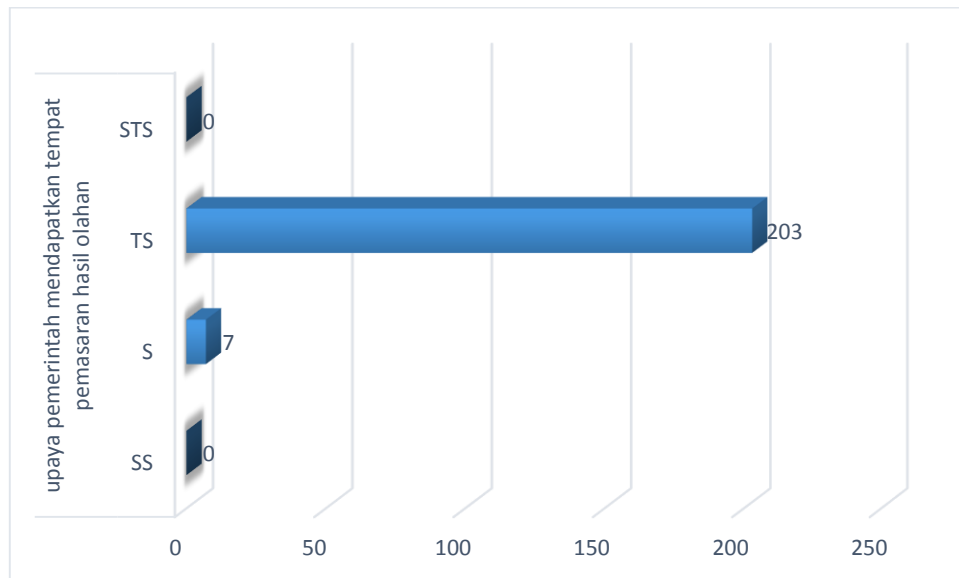


Pertanyaan kesembilan yakni adanya pelatihan dari pemerintah dalam pengolahan hasil Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Responden yang menjawab setuju berjumlah 14 orang dan responden yang

menjawab tidak setuju berjumlah 196 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.07 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju menilai pemerintah tak pernah melakukan pelatihan sama sekali dalam upaya pengolahan hasil panen dari program MKRPL. Pemerintah hanya menstimulus masyarakat dengan memberi bantuan berupa alat-alat seperti parutan kelapa, alat pemotong untuk pembuatan keripik dan sebagainya tanpa memberikan pelatihan terlebih dahulu. Hasil panen dari program MKRPL malah diolah secara kreatif oleh satu orang anggota Kelompok Wanita Tani menjadi berbagai macam olahan seperti keripik pisang, keripik bayam, keripik singkong, keripik ubi ungu, bahkan dibuat es krim dari bahan ubi ungu yang nantinya bisa dijual ke masyarakat. Jika saja pemerintah memberi pelatihan dalam mengolah hasil panen, mungkin masyarakat sendiri bisa tergerak untuk terus menjalankan program MKRPL dengan baik karena mereka bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengolah hasil panen sudah ada sejak awal. Meskipun tidak dilatih secara langsung, namun pemerintah sudah memberi pengarahan bahwa hasil panen yang didapat tak hanya untuk dikonsumsi saja melainkan bisa diolah menjadi produk makanan yang bernilai ekonomis tinggi namun tentunya perlu keaktifan dari masyarakat sendiri.

Grafik 4.25

### Hasil Pertanyaan Kesepuluh Indikator Efisiensi



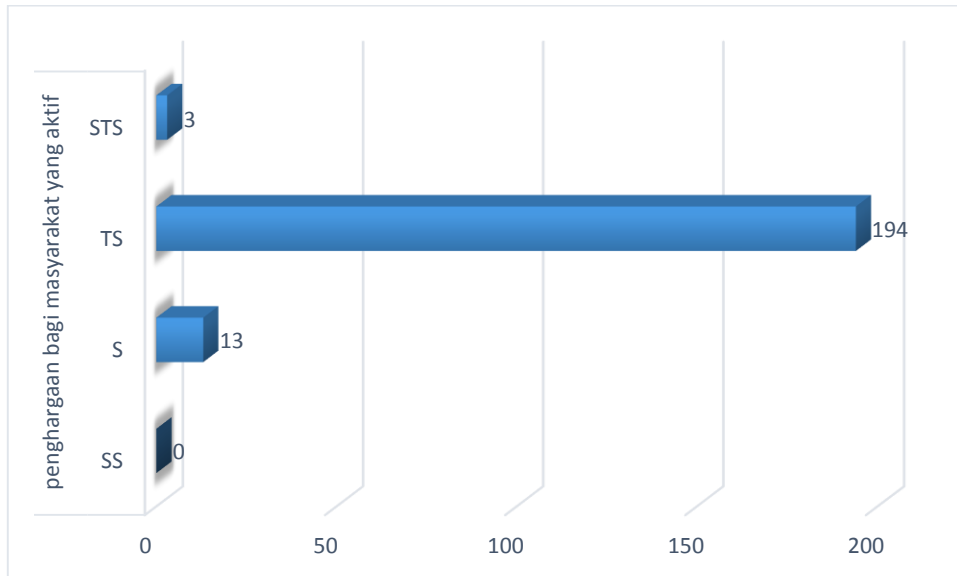
Pertanyaan kesepuluh yakni adanya upaya pemerintah dalam mendapatkan tempat pemasaran hasil olahan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Responden yang menjawab setuju berjumlah 7 orang dan responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 203 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.03 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju menilai bahwa pemerintah sama sekali tidak berupaya membantu dalam mencari pasar yang akan dijadikan target penjualan hasil olahan panen dari program MKRPL. Yang terjadi adalah masyarakat kebingungan sendiri hasil olahan yang telah dibuat hendak dijual kemana karena mereka tidak memiliki target pasar yang cocok dengan produk hasil olahan yang mereka buat sehingga pada akhirnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-

hari. Hal inilah yang tidak mendorong terbentuknya pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Sedangkan mereka yang menjawab setuju menuturkan bahwa pemerintah sejatinya memang tidak mencari pasar mana yang cocok untuk menjual produk dari hasil olahan panen tersebut. Namun pemerintah pernah merekomendasikan jika memang sulit mencari target pasar bukan tidak mungkin menjual hasil olahan tersebut ke tetangga sebelah atau kepada sesama anggota Kelompok Wanita Tani sendiri. Manfaatnya tetap sama yakni bisa menambah pendapatan masyarakat sendiri.



Grafik 4.26

## Hasil Pertanyaan Kesebelas Indikator Efisiensi

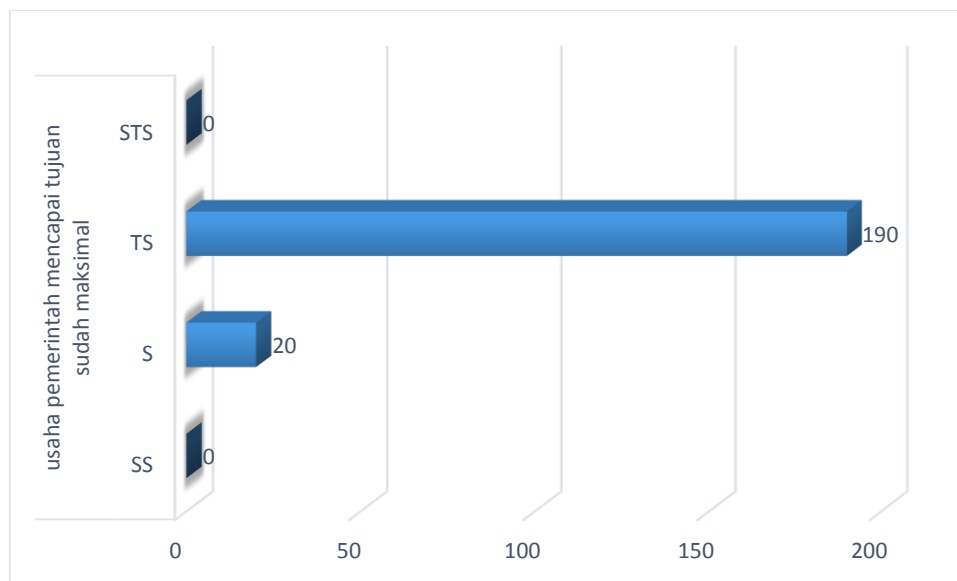


Pertanyaan kesebelas yakni adanya pemberian penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang, responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 194 orang dan responden yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 3 orang dengan nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, memang pernah diadakan pemberian penghargaan kepada satu KK terbaik dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan pekarangan rumahnya juga penghargaan kepada RT terbaik yang dimana masyarakatnya mampu menjalankan program MKRPL dengan baik. Acara tersebut diadakan satu tahun sekali. Namun nyatanya acara penghargaan seperti ini berjalan ditahun pertama saja. Tahun-tahun berikutnya acara ini

sudah jarang dilakukan mengingat hanya sedikit masyarakat yang menjalankan program MKRPL sehingga dianggap acara pemberian penghargaan seperti ini kurang efektif dalam menstimulus masyarakat yang lain agar mau menjalankan program MKRPL dengan baik. Sedangkan yang menjawab setuju mengatakan bahwa ajang penghargaan seperti itu memang pernah dilakukan, namun untuk saat ini tidak bisa karena sekarang hanya satu RT saja yang masih menjalankan program MKRPL sehingga tidak efektif jika acara ini tetap dilakukan.

**Grafik 4.27**

**Hasil Pertanyaan Keduabelas Indikator Efisiensi**

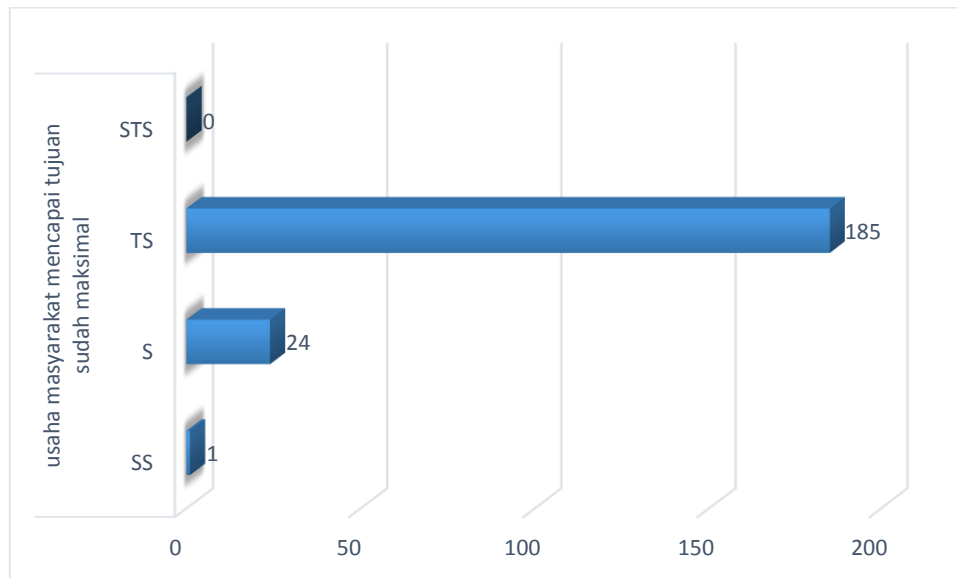


Pertanyaan keduabelas yakni usaha dari pemerintah dalam pencapaian tujuan Program MKRPL sudah maksimal. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 20 orang dan jumlah responden yang

menjawab tidak setuju berjumlah 190 dan memiliki nilai rata-rata 2.10 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju menilai bahwa usaha yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal. Pemerintah hanya melakukan sosialisasi terkait program MKRPL dan hanya menyediakan peralatan guna mendukung kegiatan program MKRPL saja. Pemerintah belum melakukan pelatihan secara langsung seperti membantu dalam mengolah hasil panen masyarakat, belum membantu dalam menentukan target pasar agar masyarakat tahu akan dijual kemana hasil olahan mereka. Peran pendamping juga dinilai masih belum mampu merangsang masyarakat untuk jadi lebih aktif lagi. Hal inilah yang dirasa masyarakat untuk menilai bahwa peran atau usaha pemerintah yang sudah dilakukan masih belum maksimal. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah bagus seperti adanya sosialisasi dan bantuan peralatan serta sarana prasarana penunjang kegiatan lainnya dalam rangka menjalankan program MKRPL. Hanya saja partisipasi masyarakatnya saja yang masih harus ditingkatkan karena program ini tak hanya mengandalkan peran pemerintah saja.

Grafik 4.28

### Hasil Pertanyaan Ketigabelas Indikator Efisiensi

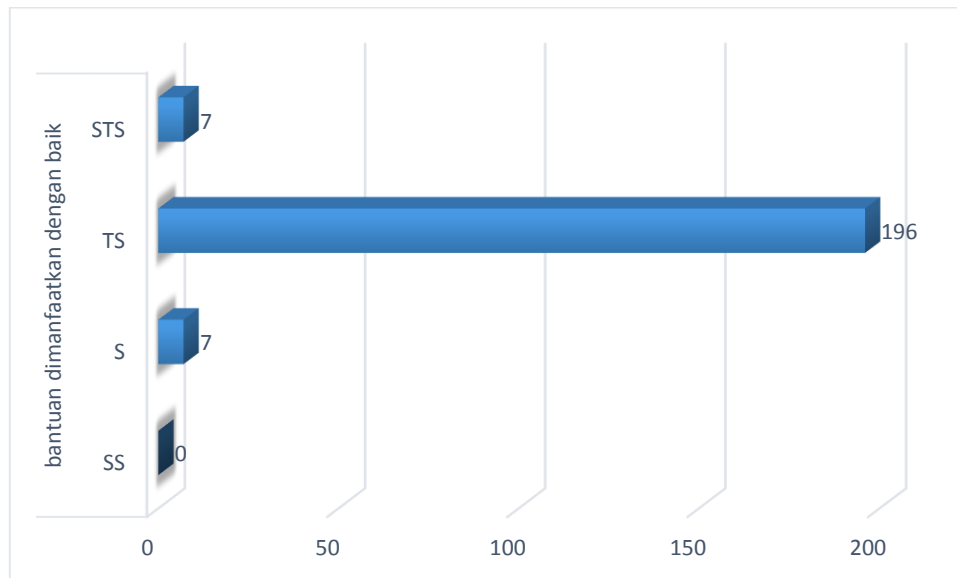


Pertanyaan ketigabelas yakni usaha dari masyarakat dalam pencapaian tujuan Program MKRPL sudah maksimal. Jumlah responden yang menjawab sangat setuju yakni 1 orang, jumlah responden yang menjawab setuju yakni 24 orang, dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 185 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.12 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju mengakui sendiri bahwa usaha mereka dalam menjalankan program MKRPL masih terbilang kurang maksimal. Mulai dari piket harian yang jarang dilakukan, kegiatan laporan di pekarangan yang jarang dibuat sehingga tak pernah ada laporan masuk kepada Ketua Kelompok Wanita Tani, dalam rapat masih banyak masyarakat yang tidak hadir, partisipasi masyarakat yang masih rendah, motivasi yang dimiliki masyarakat masih rendah, aktivitas dalam

menjalankan program masih kurang intens, juga dalam perawatan Kebun Bibit Desa serta Demplot yang masih jarang dilakukan. Beberapa hal yang disebutkan di atas menandai bahwa selain usaha dari pihak pemerintah yang masih kurang maksimal, usaha dari masyarakat pun tak jauh berbeda. Padahal untuk mensukseskan program MKRPL masyarakat dengan pemerintah harus selalu aktif satu sama lain guna tercapainya tujuan dibuatnya program MKRPL tersebut. Berbeda dengan mereka yang menjawab sangat setuju dan setuju. Mereka menilai bahwa usaha yang sudah dilakukan oleh mereka sudah maksimal mulai dari piket harian yang rutin, rapat yang rutin, pelaporan kegiatan kepada Ketua Kelompok Wanita Tani yang rutin, motivasi serta partisipasi mereka yang tinggi merupakan contoh usaha yang sudah mereka lakukan. Namun mereka juga menyadari bahwa program ini tidak akan berjalan optimal jika hanya beberapa orang saja yang aktif menjalankan.

Grafik 4.29

### Hasil Pertanyaan Keempatbelas Indikator Efisiensi

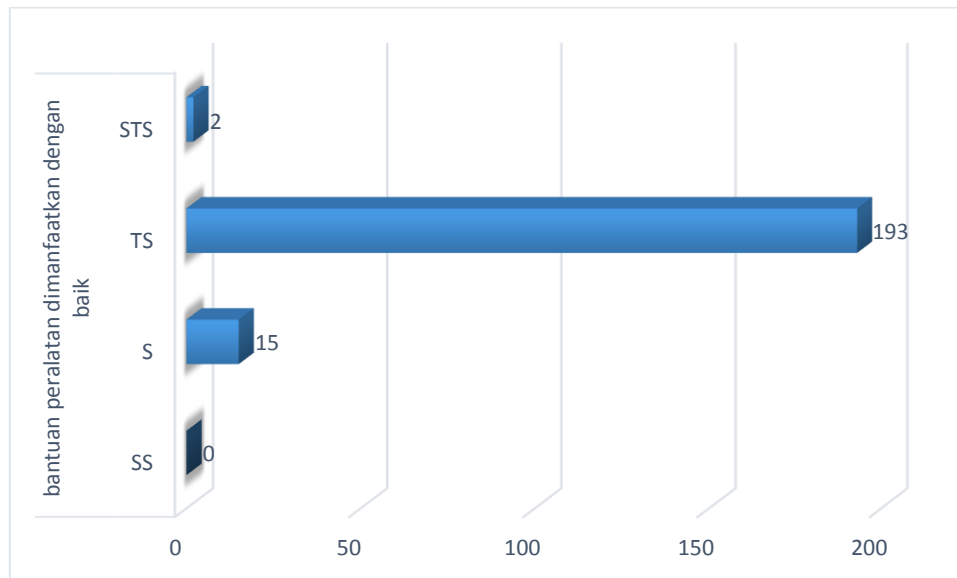


Pertanyaan keempatbelas yakni bantuan yang diberikan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 7 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 196 orang, dan yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 7 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.00 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju mengatakan bahwa bantuan yang didapat selama ini banyaknya berbentuk barang seperti rak, pembuatan Kebun Bibit Desa, penyediaan bibit, polybag, pupuk, dan lain sebagainya. Masyarakat juga menilai bahwa bantuan yang diberikan masih belum digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya seperti parutan kelapa yang hingga saat ini masih belum digunakan. Padahal jika digunakan sebagaimana mesti bisa mendukung kegiatan dan mendorong terciptanya

UMKM sesuai dengan tujuan dibuatnya MKRPL. Lalu ada juga bantuan berupa bibit ayam unggul sebanyak tujuh puluh ekor. Namun pada akhirnya semua ayam tersebut mati karena perawatan yang kurang baik sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat masih belum bisa dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Selain itu masih ada bantuan rak untuk menaruh polybag yang entah seperti apa bentuknya sekarang. Semua karena beberapa faktor seperti rasa bosan dan jenuh pada kegiatan program, tidak paham teknologi pertanian, dan berbagai kesibukan masing-masing sehingga tidak sempat mengurus pekarangannya. Untuk masyarakat yang menjawab setuju karena mereka masih memanfaatkan bantuan seperti polybag, pupuk, dan bibit tanaman yang diberikan dengan baik. Namun untuk keseluruhan, bantuan yang diberikan belum bisa dimanfaatkan dengan baik.

Grafik 4.30

### Hasil Pertanyaan Kelimabelas Indikator Efisiensi



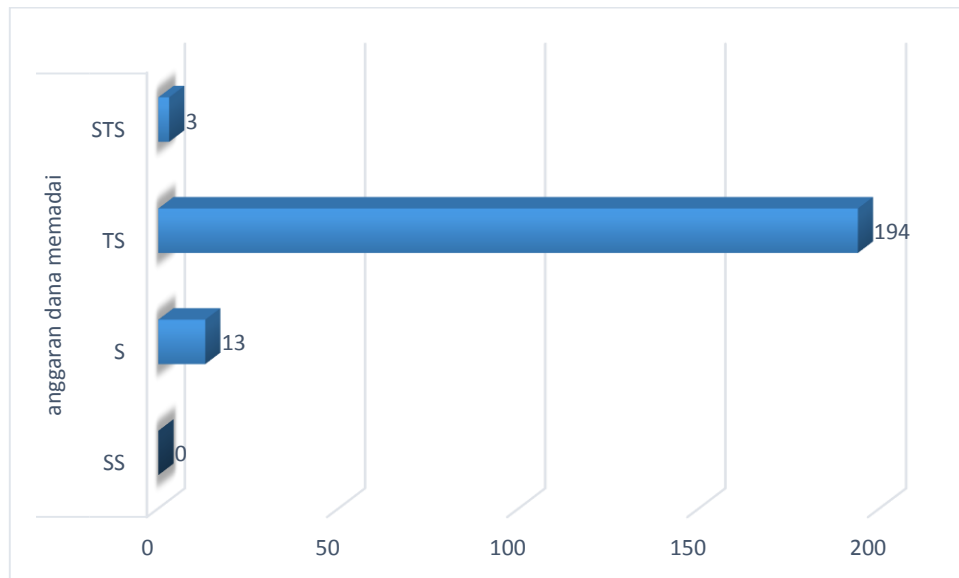
Pertanyaan kelimabelas yakni semua bantuan berupa peralatan (parutan, plastik polybag, pupuk, bibit, dll) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah responden yang menjawab setuju berjumlah 15 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 193 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 2 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju semua bantuan yang didapat masih belum bisa digunakan dengan baik. Kelompok Wanita Tani mendapatkan bantuan rak untuk polybag sebanyak 30 buah senilai Rp 20.000.000,00 yang dibagikan kepada RT 01, RT 02, RT 03 yang masing-masing RT mendapatkan 10 buah rak yang nantinya dibagikan kepada masyarakat. Namun nyatanya saat ini hanya RT 03 saja yang masih



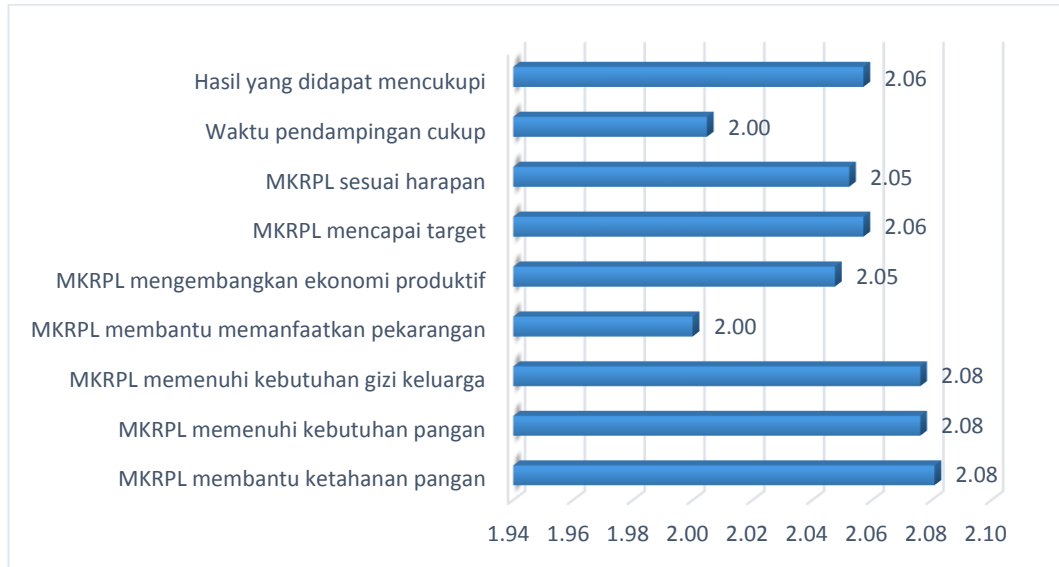
menggunakan rak tersebut. Ada juga bantuan berupa buku laporan yang digunakan untuk menulis setiap kegiatan pemanfaatan pekarangan masyarakat. Namun nyatanya hanya sekitar 10 orang saja yang menulis laporan kepada Ketua Kelompok Wanita Tani, sisanya buku-buku tersebut dipakai oleh anak-anak mereka untuk sekolah. Lalu ada juga bantuan pembelian pompa air untuk penyediaan air disekitaran daerah Demplot agar jika musim kemarau Demplot tersebut tidak mengalami kekeringan. Namun pada akhirnya pompa tersebut tidak digunakan sama sekali karena lahan yang digunakan untuk Demplot dipakai kembali oleh pemiliknya sehingga saat ini Kelompok Wanita Tani tidak memiliki lahan untuk digunakan sebagai Demplot. Sementara untuk masyarakat yang menjawab setuju mengatakan bahwa semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat sudah mereka gunakan dengan sebaik mungkin sehingga mereka masih bisa menjalankan program ini dengan baik.

Grafik 4.31

### Hasil Pertanyaan Keenambelas Indikator Efisiensi



Pertanyaan keenambelas yakni anggaran dana bantuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari yang diberikan sudah memadai. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 14 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 193 orang dan responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 3 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju menilai biasanya mereka mendapatkan bantuan berupa peralatan guna menunjang kegiatan MKRPL. Namun jika mereka mendapatkan bantuan berupa uang, maka uang tersebut akan langsung dimasukkan ke kas Kelompok Wanita Tani. Namun karena banyak masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan MKRPL, maka mereka banyak yang tidak tahu kemana uang bantuan yang didapat.

**Grafik 4.32****Indikator Kecukupan**

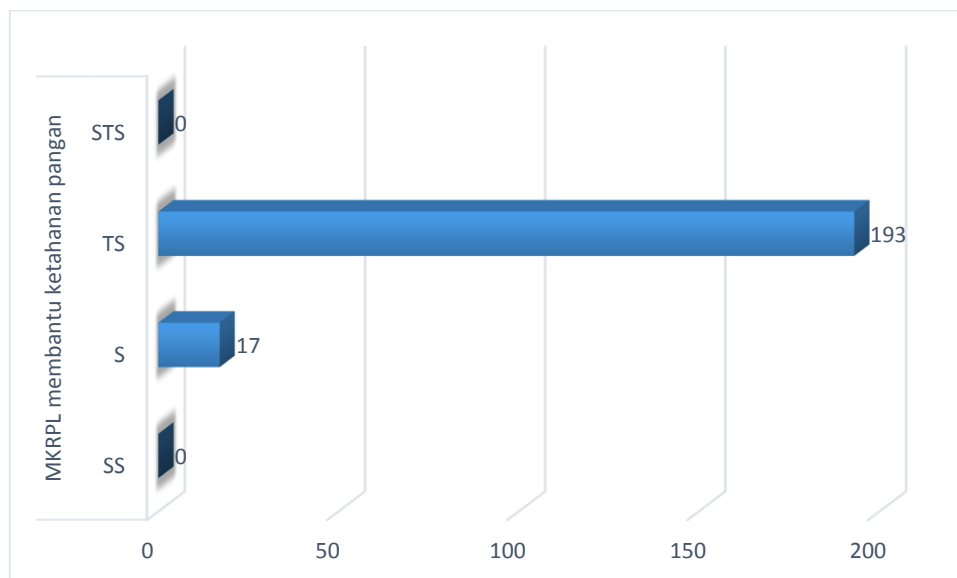
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan dari Kuesioner Indikator Kecukupan

Berdasarkan grafik 4.32 di atas, hasil jawaban responden terhadap indikator Kecukupan Program MKRPL masih rendah seperti Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam ketahanan pangan (2.08), program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan (2.08), program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga (2.08), program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam meningkatkan kemampuan keluarga untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya (2.00) program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga (2.05), adanya Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari mampu

mencapai target yang telah ditentukan (2.06), program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sesuai dengan harapan masyarakat (2.05), waktu pendampingan yang diberikan di dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sudah mencukupi (2.00) dan hasil yang didapat dari Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dirasa sudah mencukupi kebutuhan masyarakat (2.06). Dari hasil jawaban tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan nilai rata-rata masih jauh dari skala 4.00

**Grafik 4.33**

**Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Kecukupan**

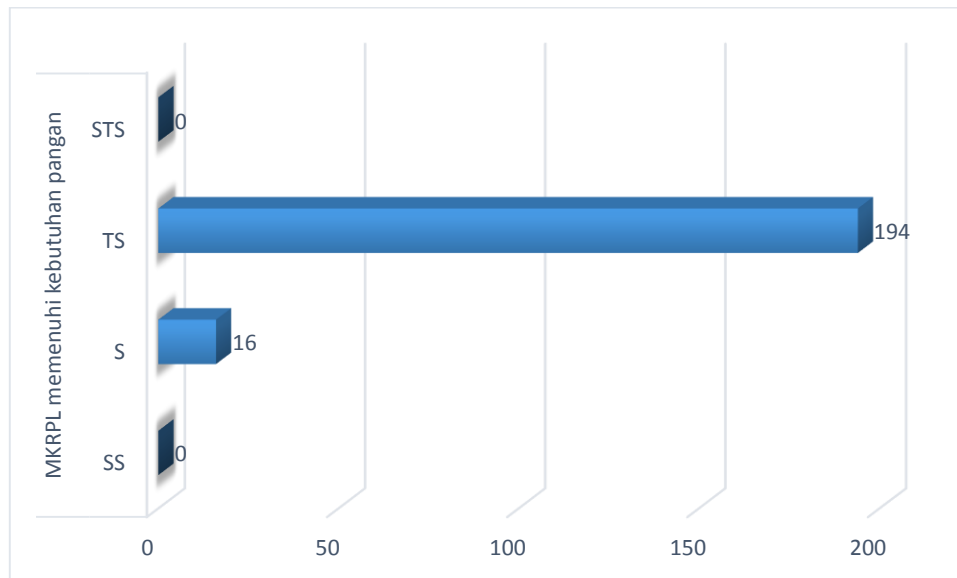


Pertanyaan pertama yakni Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam ketahanan pangan. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 17 orang dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 193 orang dan dengan nilai rata-rata 2.08 dari skala

4.00. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Memang tujuan awal dari program MKRPL adalah memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari. Namun nyatanya menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju pekarangan yang seharusnya digunakan sebagai media untuk penanaman tanaman seperti sayur, buah, tanaman toga, dan lain sebagainya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sedikit sekali masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan pekarangannya untuk ditanami tanaman pangan seperti yang disebut di atas. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju menilai bahwa MKRPL memang membantu dalam ketahanan pangan keluarga mereka karena dengan hasil panennya bisa mengurangi atau bahkan mencukupi kebutuhan serta ketergantungan pada bahan pangan lainnya.

Grafik 4.34

### Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Kecukupan

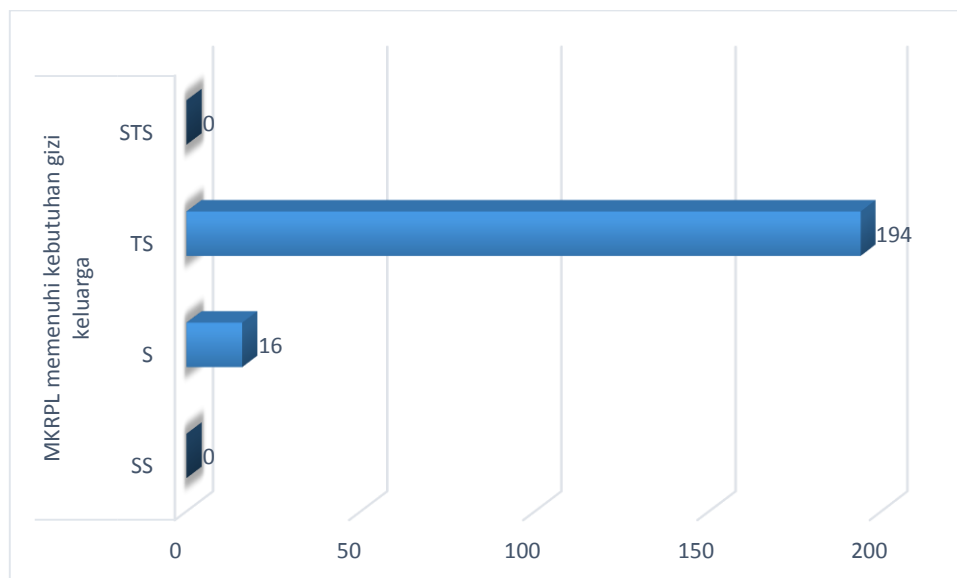


Pertanyaan kedua yakni Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 16 orang dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 194 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.08 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju sendiri program MKRPL sejatinya bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka karena jika program ini dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya mereka tak perlu repot mencari kebutuhan pangan yang dibutuhkan karena bisa memanfaatkan hasil dari panen tanaman yang ada di pekarangan mereka. Namun kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tujuan program ini menyebabkan MKRPL belum bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Masyarakat masih bergantung pada pasar guna memenuhi kebutuhan pangan mereka, bukan bergantung dari hasil panen yang berasal dari tanaman yang ada di pekarangan mereka. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju menilai sebenarnya MKRPL mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Yang penting masyarakat yang ingin merasakan manfaatnya secara langsung harus sabar dan tidak mudah jenuh sehingga bisa berproses dan menikmati hasil panennya nanti.

**Grafik 4.35**

**Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Kecukupan**



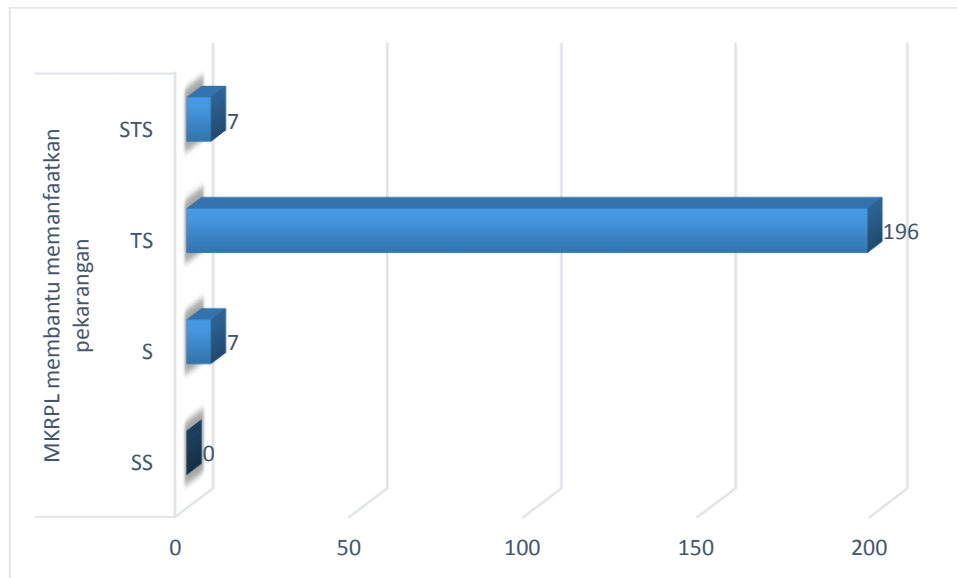
Pertanyaan ketiga yakni Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 16 orang dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 194 orang dan memiliki nilai rata-rata

2.08 dari skala 4.00. Hampir sama dengan dua pertanyaan sebelumnya, pendapatan masyarakat yang menjawab tidak setuju sendiri mengatakan belum mempunyai program MKRPL dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Hal ini terjadi karena belum tersedianya aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju MKRPL mampu memenuhi gizi keluarga menilai bahwa untuk merasakan manfaat MKRPL secara langsung maka haruslah diiringi dengan menjalankan program ini dengan baik sehingga mampu membantu dan memenuhi kebutuhan pangan serta memenuhi gizi keluarga.



Grafik 4.36

### Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Kecukupan

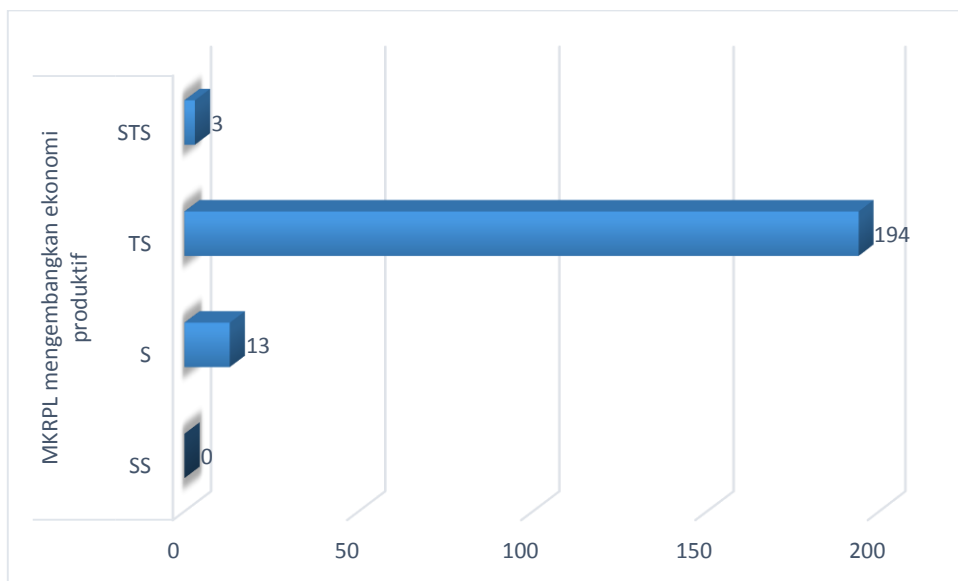


Pertanyaan keempat yakni Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam meningkatkan kemampuan keluarga untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 7 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 196 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 7 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.00 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, pada awal mula dijalankannya program MKRPL ini memang memberi manfaat yang baik. Pekarangan yang dulunya kosong melompong saat itu bisa menjadi media ditanaminya tanaman-tanaman pangan. Namun kembali lagi program ini berjalan baik atau tidaknya kepada masyarakat. Saat ini hanya beberapa orang saja yang masih memanfaatkan pekarangannya untuk digunakan

sebagai media atau lahan untuk ditanami tanaman pangan. Rasa bosan, mudah jenuhnya masyarakat, serta banyaknya yang bukan berasal dari keluarga petani sehingga mereka tidak menguasai sepenuhnya teknologi pertanian yang pada akhirnya membuat mereka terkesan acuh. Sedangkan mereka yang menjawab setuju karena mereka masih memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami dengan berbagai macam tanaman seperti sayur-mayur dan buah-buahan.

**Grafik 4.37**

**Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Kecukupan**

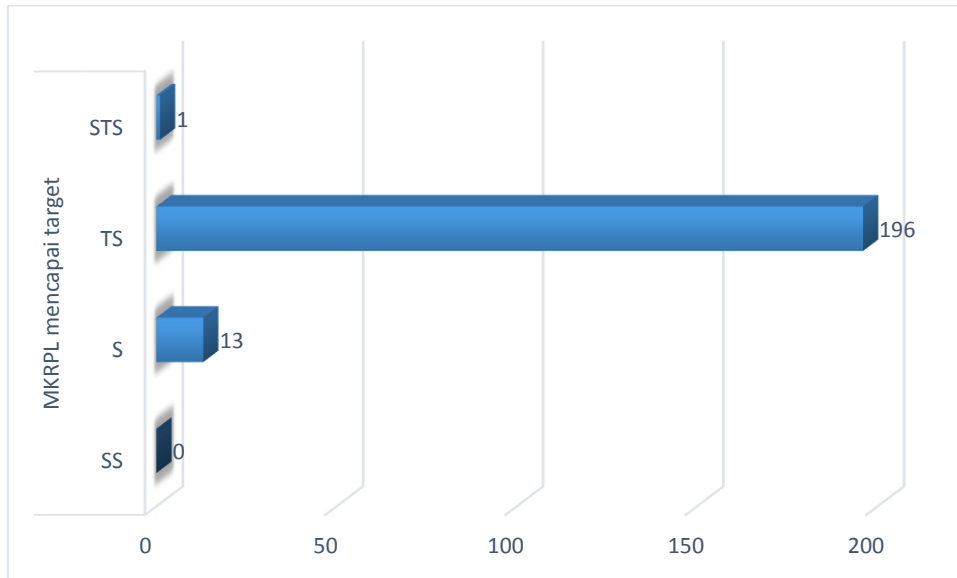


Pertanyaan kelima yakni Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari membantu dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 194 orang dan jumlah

responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 3 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, program MKRPL sendiri belum bisa menstimulus mereka untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini disebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi dari masyarakat sendiri dalam mengolah tanaman hasil panen. Tanaman hasil panen sendiri biasa digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada berusaha untuk mengolah hasil panen tersebut menjadi suatu produk hasil olahan tanaman yang masih segar. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju menilai bahwa mereka pernah membuat produk olahan dari hasil panen yang didapat. Contohnya seperti membuat es krim ubi ungu, keripik pisang, dan keripik singkong yang jika dilakukan secara terus menerus maka bukan tidak mungkin UMKM bisa terbentuk nantinya.

Grafik 4.38

### Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Kecukupan

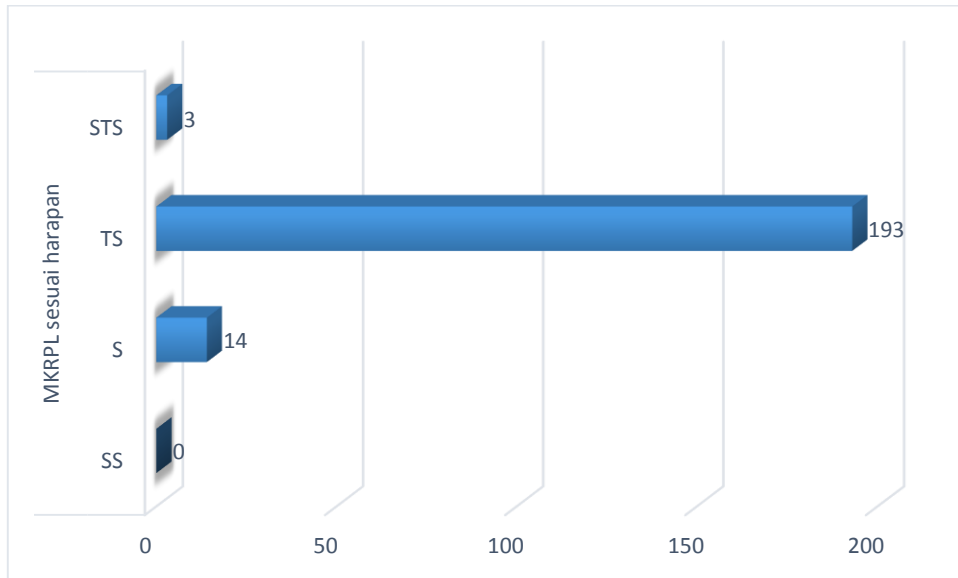


Pertanyaan keenam yakni Adanya Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari mampu mencapai target yang telah ditentukan. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 196 orang dan yang menjawab sangat tidak setuju yakni 1 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Target yang dicanangkan yakni Meningkatkan kesadaran, peran, dan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu melalui analisis situasi konsumsi dan pola konsumsi pangan di lokasi Desa yang menjalankan MKRPL, Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil

sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga, dan Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Dari semua poin yang dicanangkann menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju tak ada satupun yang berhasil mencapai targetnya saat ini. Masyarakat menilai bahwa partisipasi yang rendah menjadi penyebab utama tak tercapainya target yang dicanangkan tersebut. Tak adanya stimulus dari pendamping membuat masyarakat sendiri menjadi kurang termotivasi untuk menjalankan serta berperan aktif dalam program MKRPL ini. Sedangkan masyarakat yang menjawab MKRPL mampu mencapai target. Hanya saja memang masih kurang maksimal hasilnya. Mencapai target menurut mereka yakni masih adanya msyarakat yang memanfaatkan pekarangannya sehingga masih ada partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjalankan program MKRPL.

Grafik 4.39

### Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Kecukupan

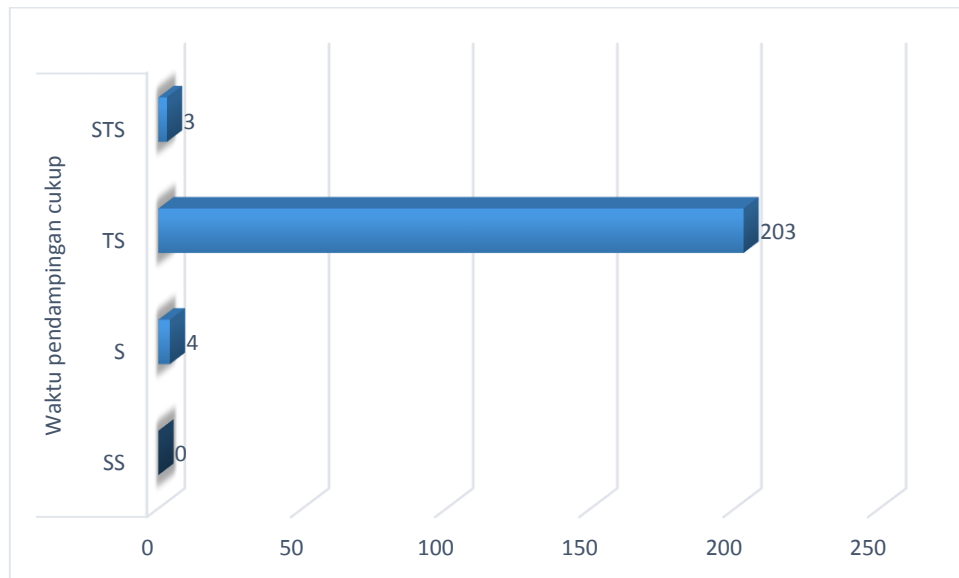


Pertanyaan ketujuh yakni Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sesuai dengan harapan masyarakat. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 14 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 193 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 3 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Harapan masyarakat pada program MKRPL ini adalah meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal serta tercipta dan berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Namun jika melihat

kondisi yang sekarang menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju seperti halnya harapan masyarakat akan sulit tercapai karena kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjalankan program MKRPL. Partisipasi, motivasi, dan aktivitas yang tidak intens juga menjadi tolak ukur sulit tercapainya harapan masyarakat di atas. Untuk masyarakat yang menjawab setuju mereka menilai bahwa MKRPL memenuhi sebagian harapan mereka. Dengan adanya program MKRPL, ekonomi masyarakat yang menjalankan program ini lumayan terbantu melalui penghematan pengeluaran dengan mengandalkan hasil panen dari tanaman yang mereka tanam di pekarangan rumah mereka.

Grafik 4.40

### Hasil Pertanyaan Kedelapan Indikator Kecukupan



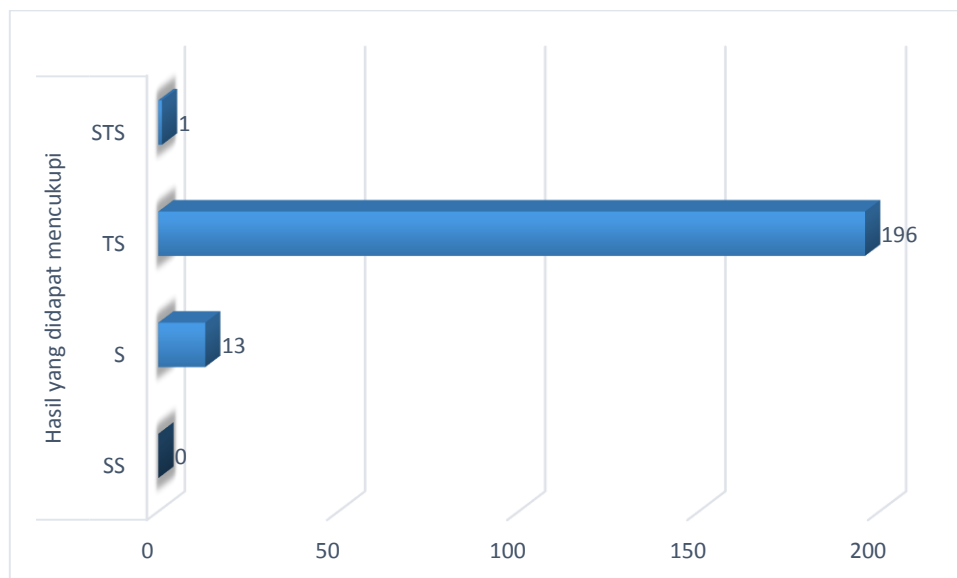
Pertanyaan kedelapan yakni waktu pendampingan yang diberikan di dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sudah mencukupi. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 4 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 203 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 3 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.00 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, waktu pendamping dalam mendampingi masyarakat dalam menjalankan program MKRPL masih kurang intens. Padahal Pendamping memiliki peran terdepan dalam keberhasilan Program MKRPL, termasuk didalamnya memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang Pendamping Program MKRPL adalah dari sisi kepemimpinan (*leadership*),



manajemen, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), disamping kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring, dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju menilai waktu pendampingan dirasa mencukupi, hanya saja masyarakatnya saja yang belum siap untuk menjalankan program MKRPL ini sehingga hasil yang didapat juga kurang maksimal.

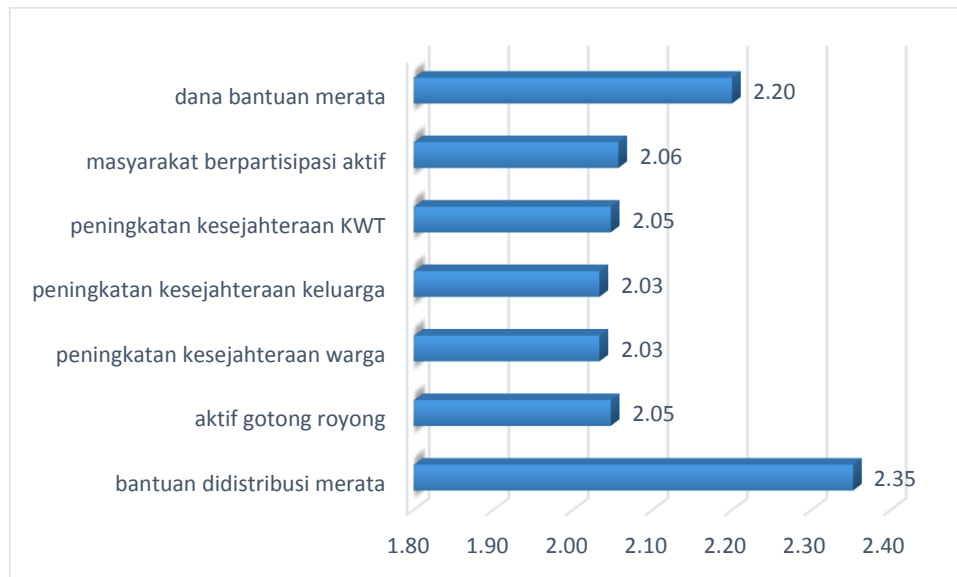
**Grafik 4.41**

**Hasil Pertanyaan Kesembilan Indikator Kecukupan**



Pertanyaan kesembilan yakni hasil yang didapat dari Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dirasa sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 196 orang dan jumlah

responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 1 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju berpendapat bahwa hasil panen yang didapat masih belum mencukupi kebutuhan pangan mereka. Kuantitas hasil panen yang sedikit terjadi karena pada prosesnya banyak tanaman yang gagal panen saat proses pertumbuhannya. Masyarakat banyak yang belum paham akan teknologi pertanian karena mereka masih awam dalam hal pertanian. Walaupun panen berhasil tepat pada waktunya dan dalam jumlah yang banyak, namun tetap saja belum bisa mencukupi dan pada akhirnya masyarakat banyak yang menilai bahwa tujuan program MKRPL yang salah satunya adalah bisa mencukupi kebutuhan pangan mereka belum bisa tercapai dengan baik. Hal ini menyebabkan pada partisipasi, motivasi, dan aktivitas masyarakat menjadi menurun lantaran mereka sudah memiliki pemikiran bahwa program MKRPL belum bisa memenuhi kebutuhan mereka dan pada akhirnya mulai tumbuh rasa acuh, bosan, dan mudah jenuh dengan kegiatan yang ada dalam menjalankan program MKRPL. Sedangkan mereka yang menjawab setuju menilai bahwa hasil yang didapat dari panen sudah mencukupi, setidaknya mampu untuk menekan angka pengeluaran keluarga mereka.

**Grafik 4.42****Indikator Perataan**

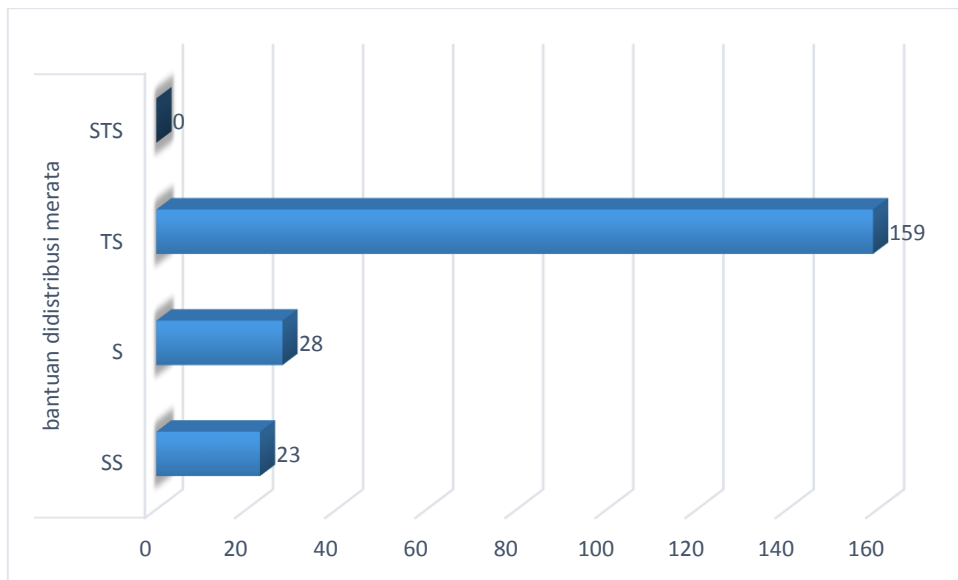
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan dari Kuesioner Indikator Perataan

Berdasarkan grafik 4.42 di atas, hasil jawaban responden terhadap indikator Perataan Program MKRPL masih rendah seperti Bantuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari didistribusikan secara merata ke semua masyarakat (2.35), dalam pelaksanaan kegiatan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari masyarakat ikut gotong royong (2.05), adanya peningkatan kesejahteraan warga dalam Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.03), adanya peningkatan kesejahteraan keluarga dalam Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.03), adanya peningkatan kesejahteraan Kelompok dalam Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.05), masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.06), dan hasil dari dana bantuan dibagikan secara merata kepada semua anggota

Kelompok Wanita Tani (2.20). Dari hasil jawaban tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan nilainya masih jauh dari skala 4.00.

**Grafik 4.43**

**Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Perataan**

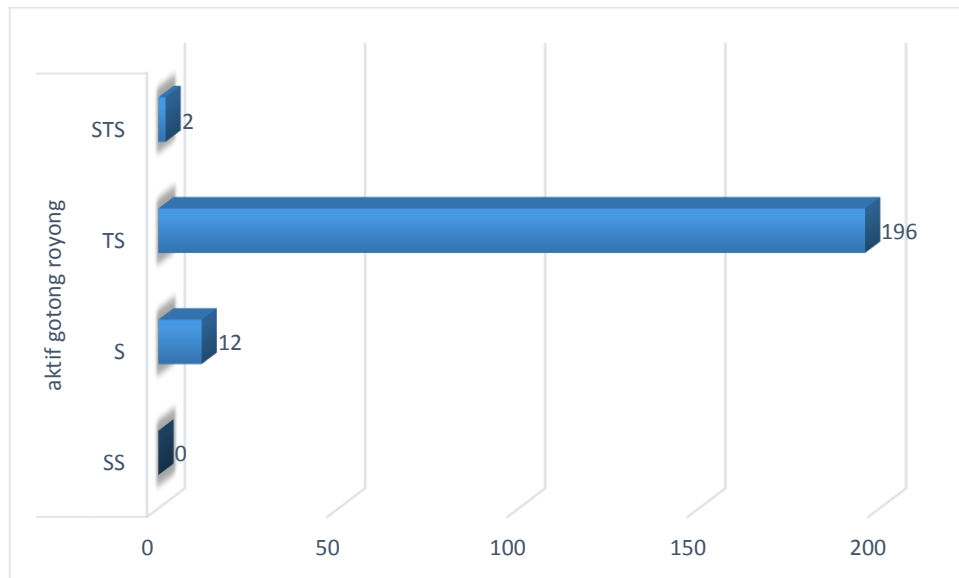


Pertanyaan pertama yakni Bantuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari didistribusikan secara merata ke semua masyarakat. Jumlah responden yang menjawab sangat setuju yakni 23 orang, jumlah responden yang menjawab setuju yakni 28 orang dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 159 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.35 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju, bantuan yang didapat yakni peralatan seperti polybag, pupuk, bibit, parutan kelapa, ayam ternak, dan peralatan untuk membangun Kebun Bibit Desa. Tiap satu KK mendapatkan jatah 10 polybag beserta pupuknya. Namun

ternyata pendistribusian bantuan ini tidak merata. Banyak yang berpendapat bahwa pendistribusian bantuan tersebut hanya berpusat pada beberapa orang saja (seperti hanya pada anggota yang aktif saja) yang menyebabkan masyarakat memiliki pandangan Bantuan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari belum didistribusikan secara merata ke semua masyarakat. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju dan sangat setuju menilai bantuan sudah didistribusikan secara merata seperti polybag, bibit, dan pupuk. Hanya saja untuk bantuan tertentu seperti rak untuk polybag memang tidak dibagikan kepada semua anggota. Bantuan ini hanya dibagikan ke tiap anggota tiap RT yang aktif saja mengingat takut tidak terurus jika dibagikan secara asal.

Grafik 4.44

### Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Perataan

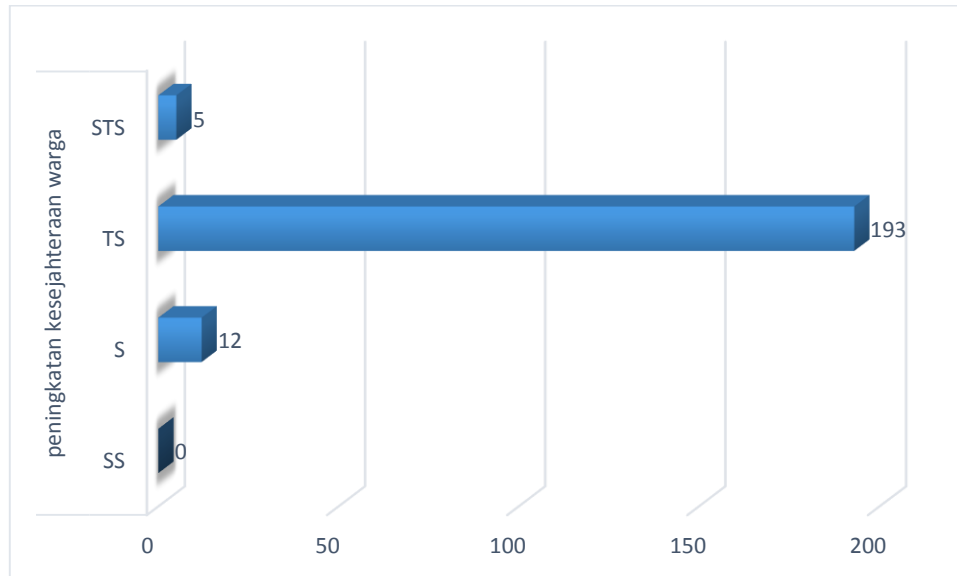


Pertanyaan kedua yakni dalam pelaksanaan kegiatan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari masyarakat ikut gotong royong. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 12 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 196 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 2 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Hasil dari jawaban masyarakat juga disertai observasi langsung peneliti menyimpulkan bahwa hanya segelintir orang saja yang menjalankan gotong royong dalam menjalankan program ini. Contohnya seperti piket harian yang tak dihadiri oleh banyak masyarakat, dalam kegiatan perawatan Demplot (kawasan/area yang terdapat dalam kawasan Sekolah Lapangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar

dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok) yang sering diurus oleh beberapa orang saja seperti Ketua Kelompok Wanita Tani, Sekretaris Kelompok Wanita Tani, Bendahara Kelompok Wanita Tani, Sie. Peralatan Kelompok Wanita Tani dan Koordinator tiap RT, dalam perawatan Kebun Bibit Desa (KBD) pun hanya orang-orang itu saja. Padahal KBD merupakan jantung MKRPL, menjadi tempat produksi benih dan bibit untuk RPL dan kawasan. Benih/bibit hasil produksi KBD juga dijual untuk masyarakat. Kebun Percontohan di MKRPL dibangun untuk tempat pembelajaran warga sekaligus konservasi sumber daya genetik. Kebun Percontohan dapat menyatu dengan KBD atau terpisah untuk tiap komoditas spesifik lokasi. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju karena mereka memang aktif dalam kegiatan pemeliharaan Kebun Bibit Desa dan perawatan Demplot sendiri.

Grafik 4.45

### Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Perataan



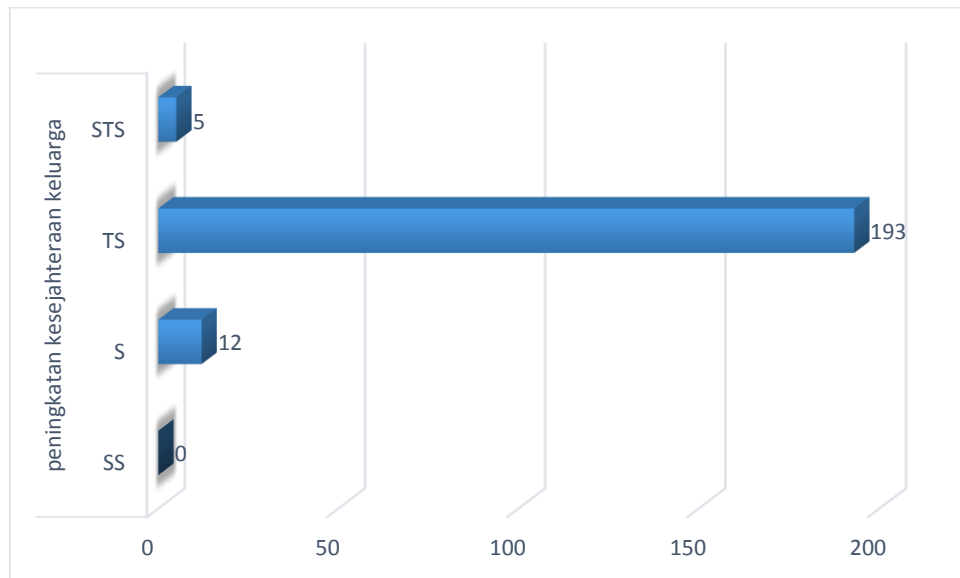
Pertanyaan ketiga yakni adanya peningkatan kesejahteraan warga dalam Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 12 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 193 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 5 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.03 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju berpendapat dengan adanya program MKRPL kesejahteraan mereka belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kesejahteraan menurut masyarakat disini yakni adanya penambahan pendapatan serta adanya penghematan pengeluaran bagi mereka. Nyatanya kegiatan ekonomi produktif yang jadi media untuk menambah penghasilan masyarakat dengan cara mengolah hasil panen menjadi produk baru (contoh: keripik bayam) tidak berjalan dengan baik.



Kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari segi pemanfaatan hasil panen apakah dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari atau tidak. Nyatanya masyarakat belum bisa memanfaatkan tanaman hasil panen dengan baik sehingga mereka masih harus membeli kebutuhan pangan mereka ketimbang mengandalkan jumlah hasil panen dari tanaman yang mereka tanam. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju menilai peningkatan kesejahteraan mereka meningkat karena dengan hasil panen yang didapat bisa menekan angka pengeluaran mereka sehingga biaya yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi bisa dialihkan ke hal yang lain. Jadi dengan adanya MKRPL mereka yang menjawab setuju bisa menutupi kebutuhan mereka yang lain.

Grafik 4.46

## Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Perataan

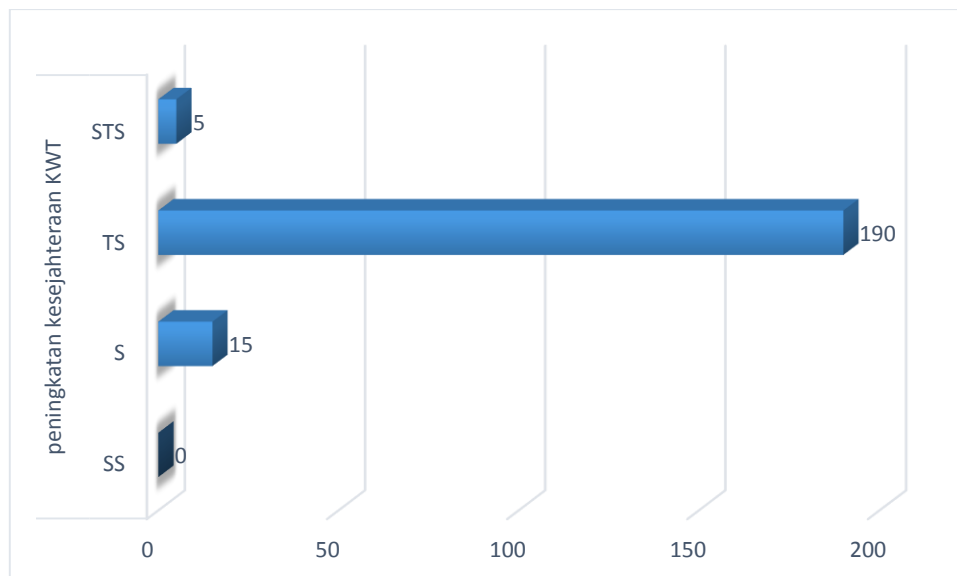


Pertanyaan keempat yakni adanya peningkatan kesejahteraan keluarga dalam Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 12 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 193 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 5 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.03 dari skala 4.00. Sejatinya manfaat dari program MKRPL harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju kesejahteraan keluarga yang menjalankan program MKRPL masih belum berubah secara signifikan. Ketahanan pangan yang belum terwujud, kecukupan gizi dari hasil panen yang belum tercapai serta belum adanya kegiatan ekonomi produktif yang belum berjalan dengan baik

menandakan kesejahteraan keluarga saat ini masih belum terpenuhi. Sedangkan masyarakat yang menjabab setuju menilai setidaknya dengan adanya MKRPL bisa membantu mencukupi kebutuhan dapur mereka sehingga mereka menilai MKRPL secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya meskipun tidak signifikan.

**Grafik 4.47**

**Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Perataan**

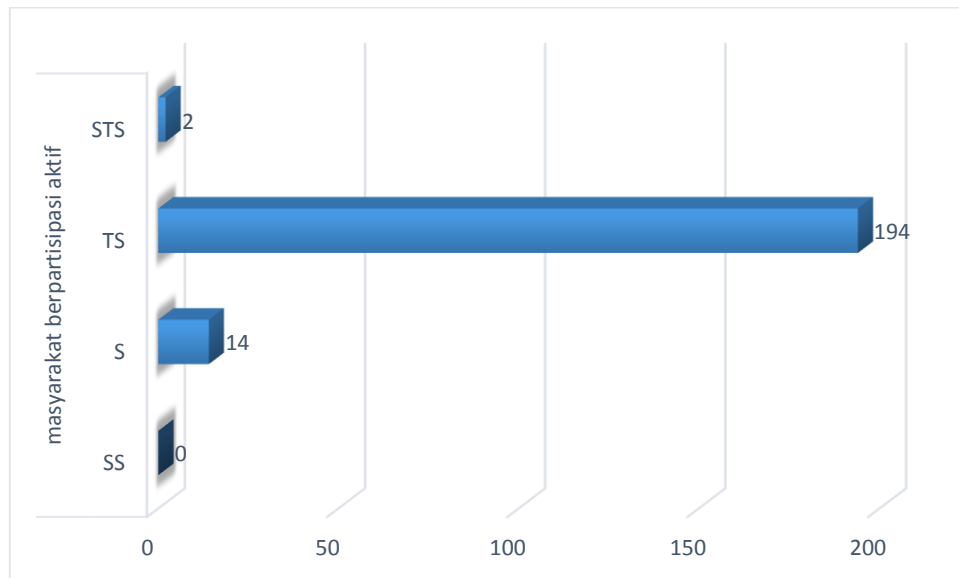


Pertanyaan kelima yakni adanya peningkatan kesejahteraan Kelompok dalam Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 15 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 190 orang, dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 5 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Seperti dua pertanyaan sebelumnya, masyarakat yang

menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju berpendapat bahwa dengan adanya program MKRPL sendiri belum bisa mengubah kesejahteraan anggota Kelompok Wanita Tani. Hal ini dikarenakan tidak berjalan dengan baiknya program MKRPL. Belum sesuai hasil yang didapat dengan tujuan awal yang ditetapkan menjadikan kesejahteraan warga, keluarga, juga anggota Kelompok Wanita Tani masih belum terwujud atau belum adanya perubahan kondisi ekonomi mereka secara signifikan. Sementara masyarakat yang menjawab setuju menilai kesejahteraan mereka memang mengalami sedikit peningkatan. Hal ini ditandai dengan adanya penghematan yang terjadi karena manfaat hasil panen yang mereka dapatkan dari tanaman yang ditanam di pekarangan mereka.

Grafik 4.48

### Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Perataan

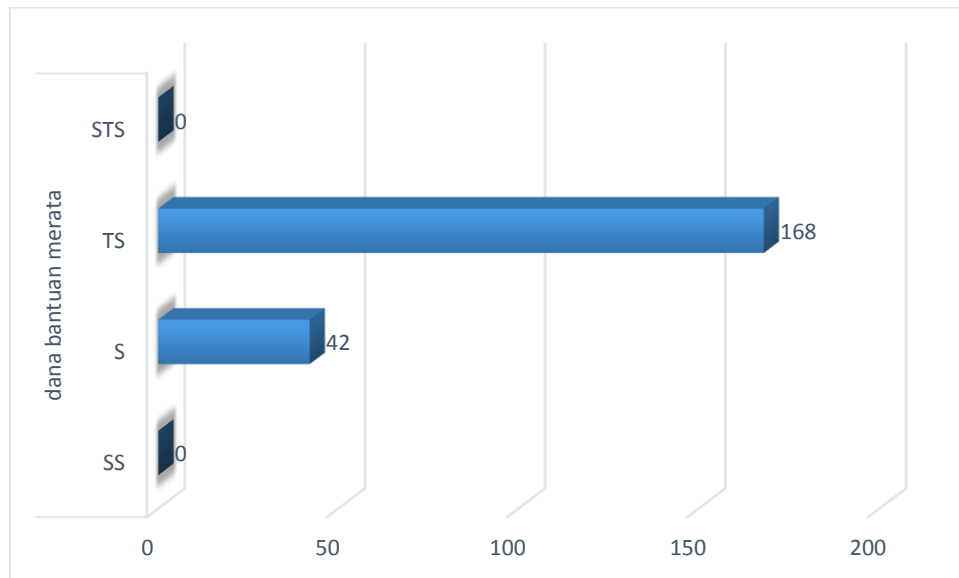


Pertanyaan keenam yakni masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 14 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 194 orang dan jumlah yang menjawab sangat tidak setuju yakni 2 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Inti dari program MKRPL adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat adalah suatu keharusan. Posisi pemerintah dalam program ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pendamping yang ikut membimbing dan mendukung terbentuknya KRPL. Dengan kata lain, KRPL ini harus direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif (dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat) serta kemudian dievaluasi dan disempurnakan secara

kreatif dan kritis oleh masyarakat dan pemerintah melalui aparat penggerak/penyuluh di lapangan. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat sejak awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan penyempurnaan tersebut, diharapkan pula bahwa pembentukan kawasan rumah pangan akan berlanjut secara lestari. Itulah yang diinginkan dan dimaksudkan dengan penambahan kata “lestari” pada konsep MKRPL. Selain itu, untuk mendukung dan menjamin keberlanjutan (kelestarian) Kawasan Rumah Pangan, maka penyediaan dan ketersediaan bibit/benih menjadi salah satu faktor pendukung yang penting. Maka dalam konsep MKRPL, kebun bibit menjadi salah satu prinsip yang wajib ada. Kebun bibit tersebut cukup satu untuk satu kawasan dan dikelola oleh masyarakat secara partisipatif. Oleh karena itu partisipasi masyarakat yang rendah sangatlah disayangkan karena merupakan penggerak dari program MKRPL sendiri.

Grafik 4.49

### Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Perataan



Pertanyaan ketujuh yakni hasil dari dana bantuan dibagikan secara merata kepada semua anggota Kelompok Wanita Tani. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 42 orang dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 168 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.20 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju, hasil dari dana bantuan yang didapat belum dibagikan secara merata. Hal ini karena bantuan yang didapat kurang mencukupi. Artinya jumlah anggota Kelompok Wanita Tani yang ada tidak sebanding dengan jumlah bantuan yang didapat. Sebagai contohnya, Kelompok Wanita Tani mendapatkan bantuan rak untuk tempat polybag sebanyak 30 buah senilai Rp 20.000.000,00 yang dibagikan kepada tiap masing-masing RT. Dengan jumlah yang sedikit maka tidak heran jika banyak masyarakat yang merasa

bahwa bantuan yang didapat tidak dibagikan secara merata ke semua masyarakat. Padahal hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang bisa mengakibatkan menurunnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan rutinitas MKRPL. Akibatnya bisa dirasakan sekarang bahwa intensitas kegiatan MKRPL semakin lama semakin menurun. Sementara masyarakat yang menjawab setuju menuturkan bahwa bantuan sudah dibagikan kepada mereka yang aktif dalam kegiatan Program MKRPL karena dikhawatirkan jika dibagikan kepada mereka yang kurang aktif bantuan yang diberikan tidak terpakai dengan baik.



**Grafik 4.50**  
**Indikator Responsivitas**



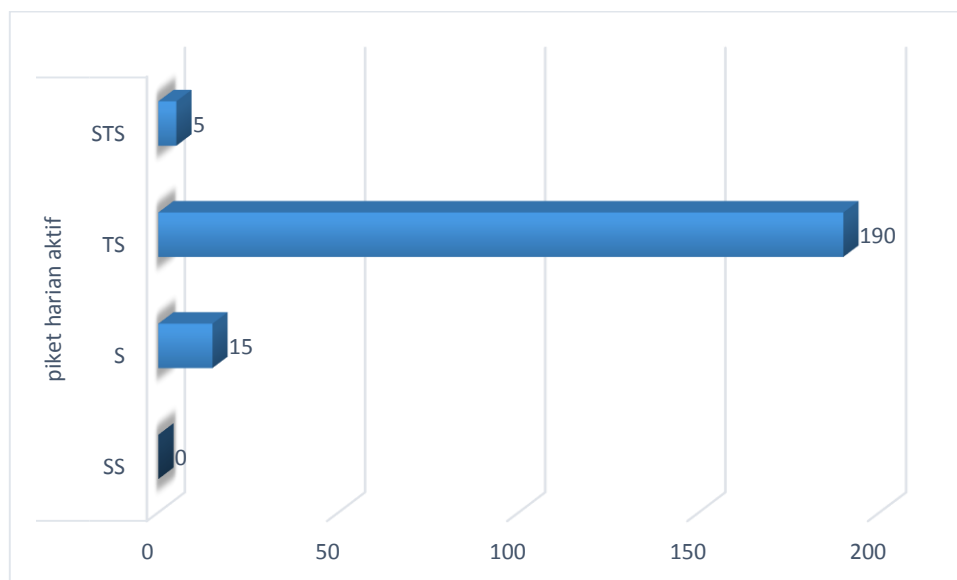
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan dari Kuesioner Indikator Responsivitas

Berdasarkan grafik 4.49 di atas, hasil jawaban responden terhadap indikator Responsivitas Program MKRPL masih rendah seperti piket harian dalam menjaga Kebun Bibit Desa dipatuhi (2.05), kegiatan laporan di pekarangan rutin dilakukan (2.01), anggota Kelompok Wanita Tani selalu hadir dalam rapat rutin (2.02), adanya penjelasan dari Pembina Kelompok Wanita Tani kepada anggota Kelompok Wanita Tani yang aktif dan kurang aktif apabila tidak mendapatkan bantuan secara merata (2.05), adanya penjelasan dari BPTP Provinsi Banten kepada anggota Kelompok Wanita Tani yang aktif dan kurang aktif apabila tidak mendapatkan bantuan secara merata (2.06), adanya peran pendamping dalam membantu kegiatan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.25), adanya peran BPTP Provinsi Banten dalam membantu kegiatan Program Model Kawasan

Rumah Pangan Lestari (2.20), dan sosialisasi yang disampaikan oleh BPTP Provinsi Banten mengenai Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dapat dipahami masyarakat (2.06). Dari hasil jawaban tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan nilainya masih jauh dari skala 4.00.

**Grafik 4.51**

**Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Responsivitas**

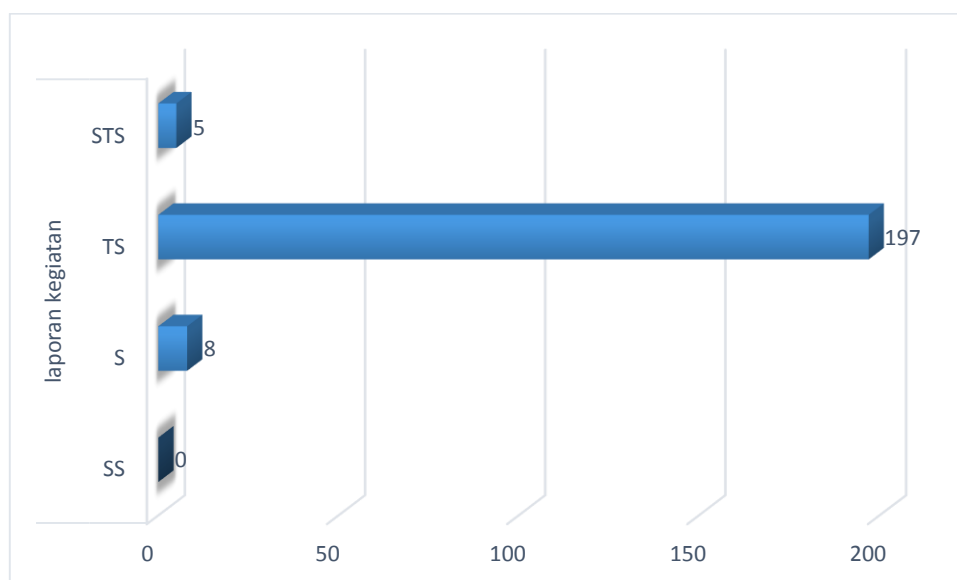


Pertanyaan pertama yakni piket harian dalam menjaga Kebun Bibit Desa dipatuhi. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 15 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 190 orang, dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 5 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju mengatakan bahwa yang hadir dalam kegiatan piket harian hanya orang-orang tertentu saja. Maksudnya orang yang aktif dalam

kegiatan MKRPL seperti ketua Kelompok Wanita Tani, Sekretaris Kelompok Wanita Tani, Bendahara Kelompok Wanita Tani, serta beberapa orang koordinator dari tiap-tiap RT. Pada piket harian yang dimulai pada pukul 16.00 WIB s/d selesai ini, untuk anggota yang lain sangat jarang ditemui dalam kegiatan piket harian dan yang ditemui hanya orang-orang itu saja. Ini dikarenakan rasa bosan, kurang kepedulian, serta rasa malas yang tinggi membuat banyak masyarakat tidak hadir dalam piket harian. Sementara masyarakat yang menjawab setuju karena memang mereka yang aktif dalam piket harian merawat Kebun Bibit Desa dan Demplot.

**Grafik 4.52**

**Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Responsivitas**

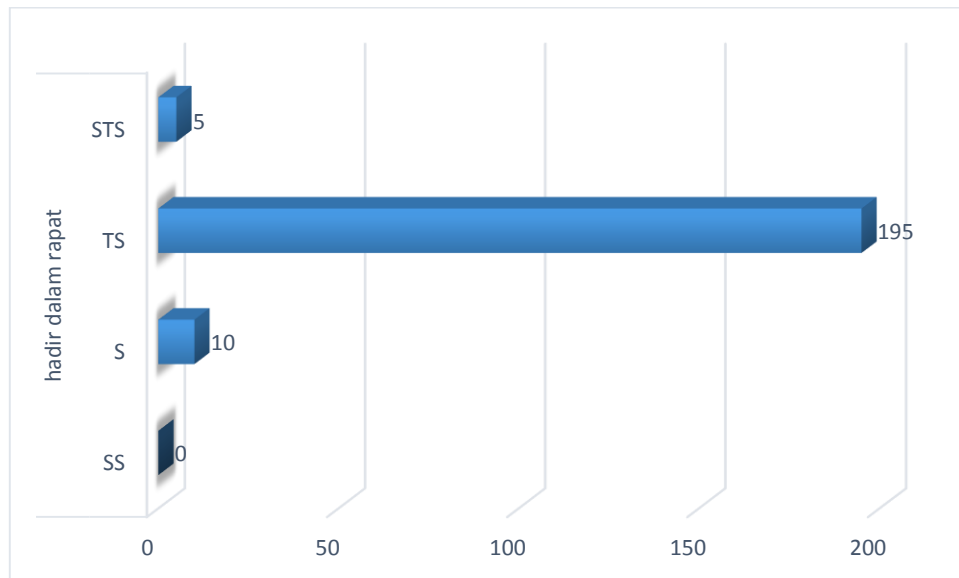


Pertanyaan kedua yakni Kegiatan laporan di pekarangan rutin dilakukan. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 8 orang, jumlah

responen yang menjawab tidak setuju yakni 197 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 5 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.01 dari skala 4.00. Kelompok Wanita Tani mendapatkan bantuan sekitar 50 buah buku yang fungsinya untuk menulis laporan kegiatan penanaman tanaman di pekarangan rumahnya. Namun yang terjadi dari 50 orang yang mendapat buku tersebut, hanya sekitar 8 sampai 10 orang yang menuliskan laporan kegiatan penanaman tanaman di pekarangan rumahnya. Sisanya buku yang diberikan digunakan untuk keperluan lain. Ini menunjukkan bahwa respon masyarakat pada kegiatan program MKRPL memang masih rendah. Masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju menjelaskan bahwa buku yang diberikan untuk laporan kegiatan di pekarangan digunakan untuk anaknya sekolah karena dinilai buku untuk laporan lebih memiliki manfaat untuk anaknya.

Grafik 4.53

### Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Responsivitas

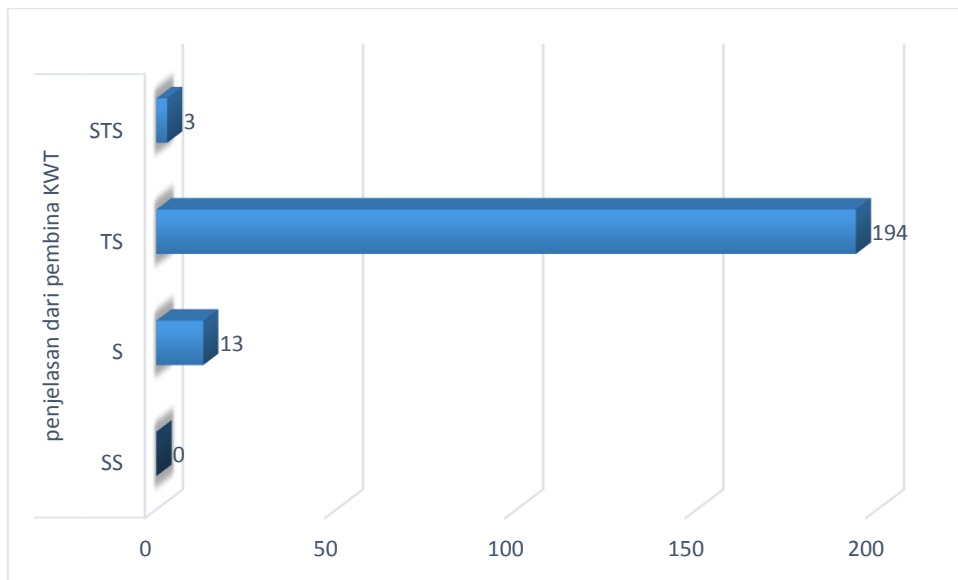


Pertanyaan ketiga yakni anggota Kelompok Wanita Tani selalu hadir dalam rapat rutin. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 10 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 195 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 5 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.02 dari skala 4.00. Menurut masyarakat sendiri baik yang menjawab setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, pada awalnya memang masyarakat berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan, termasuk kegiatan rapat ini. Namun semakin lama masyarakat yang hadir dalam kegiatan rapat ini semakin sedikit. Banyak masyarakat yang beralasan tidak bisa hadir atau memang mereka tidak datang. Padahal mereka ada dirumah saat itu dan tak ada kesibukan yang benar-benar tak bisa ditinggalkan. Mulai acuhnya masyarakat terhadap kegiatan seperti ini

membuktikan bahwa respon masyarakat memang semakin lama semakin rendah.

**Grafik 4.54**

**Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Responsivitas**

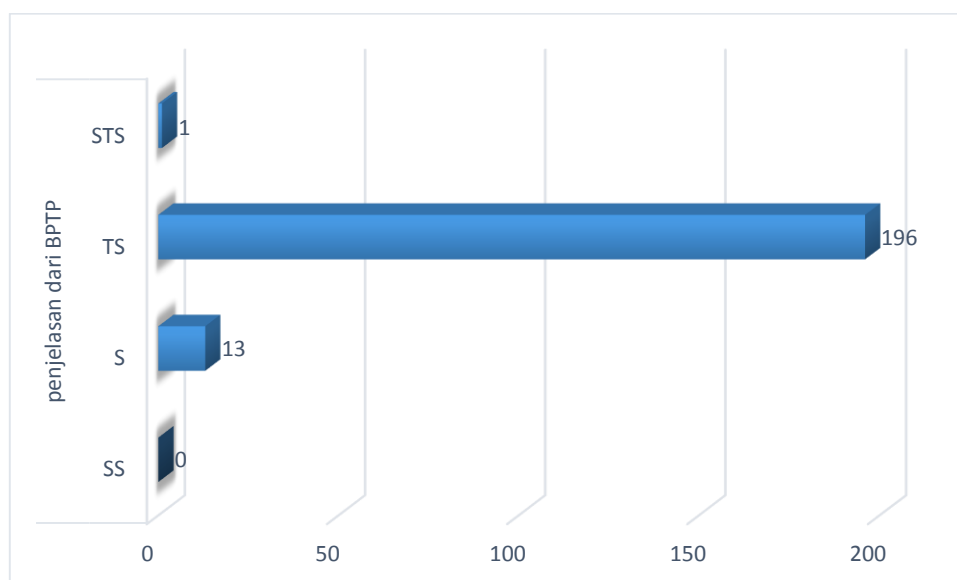


Pertanyaan keempat yakni adanya penjelasan dari Pembina Kelompok Wanita Tani kepada anggota Kelompok Wanita Tani yang aktif dan kurang aktif apabila tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 194 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 3 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Jumlah bantuan yang tidak mencukupi dengan jumlah anggota Kelompok Wanita Tani mengharuskan Pembina Kelompok Wanita Tani menggunakan skala prioritas. Menurut masyarakat yang menjawab setuju,

memang yang mendapatkan bantuan biasanya adalah orang-orang yang memang aktif dalam kegiatan program MKRPL. Namun tentu saja tak dapat dihindari akan timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat yang lain. Memang ada penjelasan dari Pembina Kelompok Wanita Tani mengapa pada pembagian bantuan didahulukan kepada mereka yang memang aktif dalam kegiatan, namun tidak semua anggota Kelompok Wanita Tani yang lain tahu dengan penjelasan yang diberikan karena penjelasan yang diberikan hanya melibatkan kepada mereka yang memang bertanya langsung kepada Pembina Kelompok Wanita Tani.

**Grafik 4.55**

**Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Responsivitas**



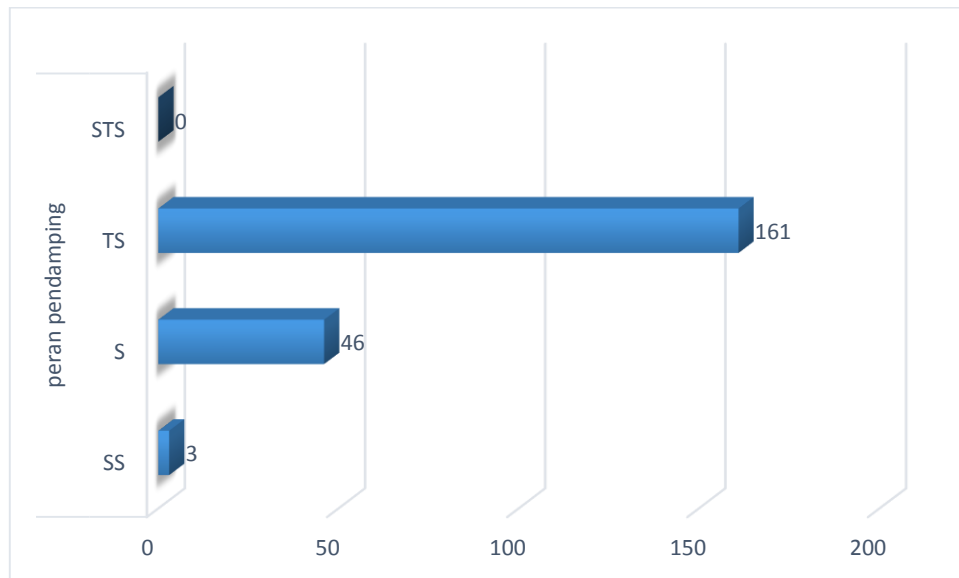
Pertanyaan kelima yakni adanya penjelasan dari BPTP Provinsi Banten kepada anggota Kelompok Wanita Tani yang aktif dan kurang aktif

apabila tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 196 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 1 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab setuju berpendapat sebenarnya mereka dapat penjelasan secara langsung dari BPTP Provinsi Banten perihal mengapa bantuan yang diberikan kadang tak mencukupi untuk semua anggota Kelompok Wanita Tani. Karena dari awal pembentukan Kelompok Wanita Tani hingga berjalannya program MKRPL saat ini, peran BPTP hanya dirasakan masyarakat diawal saja seperti sosialisasi tentang apa itu MKRPL, manfaat yang bisa dihasilkan jika program MKRPL berjalan sesuai dengan tujuan awal, serta pelatihan dalam pembuatan kompos cair. Namun untuk penjelasan tentang jumlah bantuan yang tak mencukupi, BPTP belum pernah memberi penjelasan karena tugas BPTP hanya sebagai perangsang masyarakat guna menjalankan program MKRPL, salah satunya dengan cara penyediaan bantuan tersebut.



Grafik 4.56

### Hasil Pertanyaan Keenam Indikator Responsivitas

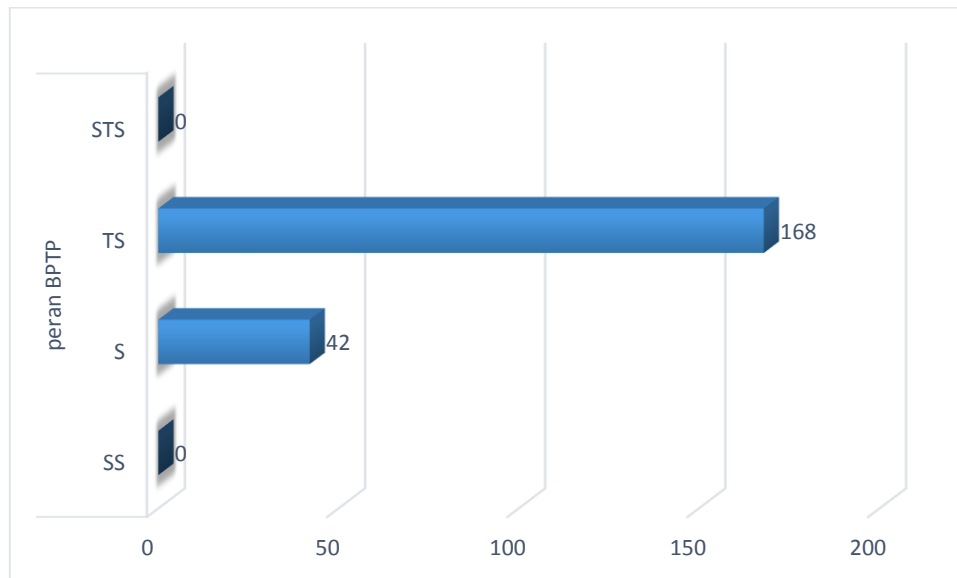


Pertanyaan keenam yakni adanya peran pendamping dalam membantu kegiatan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab sangat setuju yakni 3 orang, jumlah responden yang menjawab setuju yakni 46 orang dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 161 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.25 dari skala 4.00. Penyuluh Pendamping Program MKRPL memiliki peran terdepan dalam keberhasilan gerakan MKRPL, termasuk didalamnya memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang Penyuluh Pendamping Program MKRPL adalah dari sisi kepemimpinan (*leadership*), manajemen, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), disamping kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring, dan menjadi contoh

nyata bagi masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual. Namun menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju, nyatanya peran pendamping disini kurang aktif. Pada awal berjalannya program MKRPL, pendamping rutin datang setiap hari guna menjalankan tugasnya. Lalu setelah ada pergantian pendamping, pendamping yang baru datang memantau minimal setiap dua bulan sekali. Namun pada akhirnya pendamping program MKRPL sudah jarang lagi datang untuk memantau dan menjalankan tugasnya di desa yang menjalankan Program MKRPL. Sedangkan mereka yang menjawab setuju menilai peran pendamping sudah maksimal hanya saja peran dari masyarakat saja yang masih kurang seperti partisipasinya yang rendah sehingga menghambat program MKRPL

Grafik 4.57

### Hasil Pertanyaan Ketujuh Indikator Responsivitas

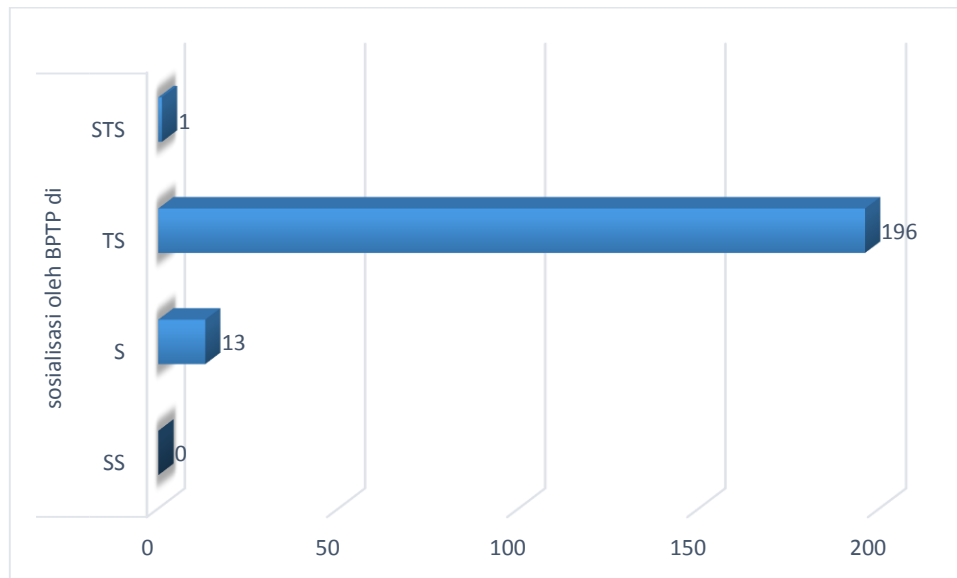


Pertanyaan ketujuh yakni adanya peran BPTP Provinsi Banten dalam membantu kegiatan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 42 orang dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 168 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.20 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju, peran BPTP Provinsi Banten hanya terasa diawal saja, ketika melakukan sosialisasi dan pelatihan kompos serta memberikan bantuan kepada desa yang menjalankan program MKRPL seperti pemberian bibit, pupuk, polybag, alat parut, dan pembuatan Kebun Bibit Desa. Namun BPTP Provinsi Banten kurang berperan dalam proses pengolahan hasil dari panen tanaman yang masyarakat tanam di pekarangan mereka. Masyarakat seperti kebingungan dengan hasil panen hendak diolah menjadi produk seperti apa

sedangkan tak ada pelatihan sama sekali dari BPTP Provinsi Banten. Walaupun masyarakat dituntut untuk mandiri namun tetap saja masyarakat harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu agar terstimulus dan tumbuhnya inovasi dan motivasi agar bisa mengolah hasil panen menjadi satu produk yang bisa dijual dan bisa menambah penghasilan satu keluarga. Sedangkan menurut masyarakat yang menjawab setuju menuturkan bahwa peran BPTP sudah baik dengan menyediakan segala fasilitas berupa barang-barang penunjang kegiatan MKRPL. Kembali lagi kepada masyarakatnya yang memang kurang berpartisipasi aktif dalam menjalankan program MKRPL ini.

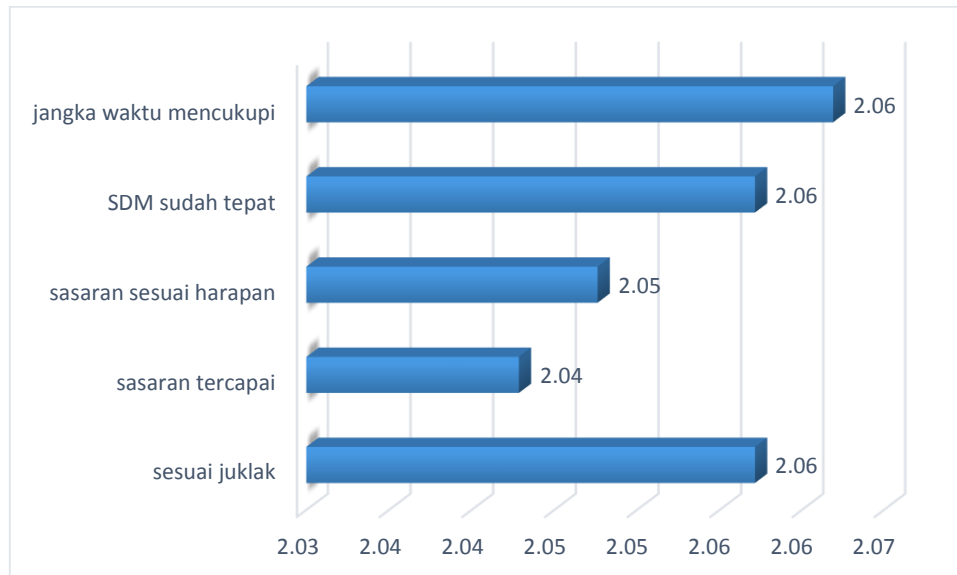
Grafik 4.58

### Hasil Pertanyaan Kedelapan Indikator Responsivitas



Pertanyaan kedelapan yakni sosialisasi yang disampaikan oleh BPTP Provinsi Banten mengenai Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari dapat dipahami masyarakat. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 196 orang, dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 1 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, sosialisasi yang disampaikan belum terlalu dapat dipahami oleh mereka. Karenanya banyak masyarakat yang kurang aktif partisipasinya, rendah motivasinya sehingga secara tidak langsung kurang mendukung program MKRPL. Ketidaksadaran masyarakat terhadap manfaat yang dihasilkan dari program MKRPL dikarenakan mereka belum paham sepenuhnya apa yang

disampaikan oleh BPTP Provinsi Banten tentang apa itu program MKRPL. Karena kurang paham akan manfaat yang dihasilkan, alhasil banyak masyarakat yang masih kurang maksimal dalam menjalankan program MKRPL. Sosialisasi yang dilakukan dari BPTP Provinsi Banten sendiri hanya satu kali dilakukan, yakni pada awal dijalankannya program MKRPL. Seharusnya sosialisasi perlu ditingkatkan intensitasnya karena perlu diketahui bahwa masyarakat berrmatapencaharian mayoritas bukan sebagai petani yang berarti mereka belum sepenuhnya paham dan masih awam dengan manfaat program MKRPL tersebut. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju karena mereka mengerti dan menjalankan apa yang disampaikan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh BPTP Provinsi Banten.

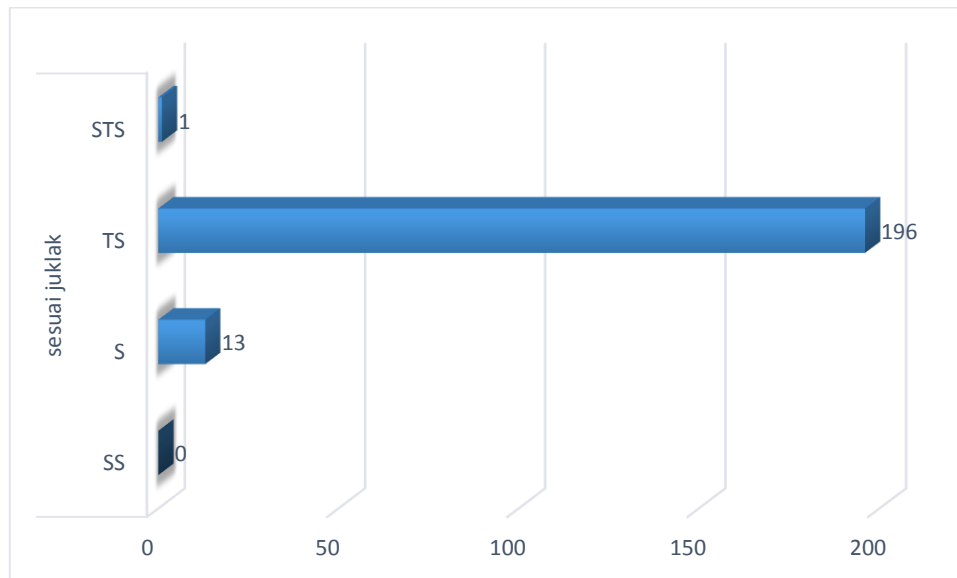
**Grafik 4.59****Indikator Ketepatan**

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan dari Kuesioner Indikator ketepatan

Berdasarkan grafik 4.59 di atas, hasil jawaban responden terhadap indikator ketepatan Program MKRPL masih rendah seperti Pelaksanaan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (2.06), sasaran Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari telah tercapai (2.04), sasaran Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari telah sesuai (2.05), SDM Desa Menes sudah tepat untuk menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (2.06) dan Jangka waktu yang diberikan untuk menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sudah tepat (mencukupi) (2.06). Dari hasil jawaban tersebut dapat dilihat bahwa semua pertanyaan nilainya masih jauh dari skala 4.00.

Grafik 4.60

### Hasil Pertanyaan Pertama Indikator Ketepatan



Pertanyaan pertama yakni Pelaksanaan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 196 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 1 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Menurut masyarakat, dalam pelaksanaan program MKRPL diawali dengan sosialisasi optimalisasi pekarangan oleh pendamping. Lalu tiap desa yang menjalankan program MKRPL haruslah memiliki Demplot, minimal memiliki satu buah Kebun Bibit Desa beserta peralatannya seperti pot, tanah gembur, kompos, polybag, dan media pembibitan lainnya. Lalu mengadakan musyawarah berdasarkan potensi pekarangan masyarakat. Lalu Setiap desa harus membina minimal 1 (satu) sekolah

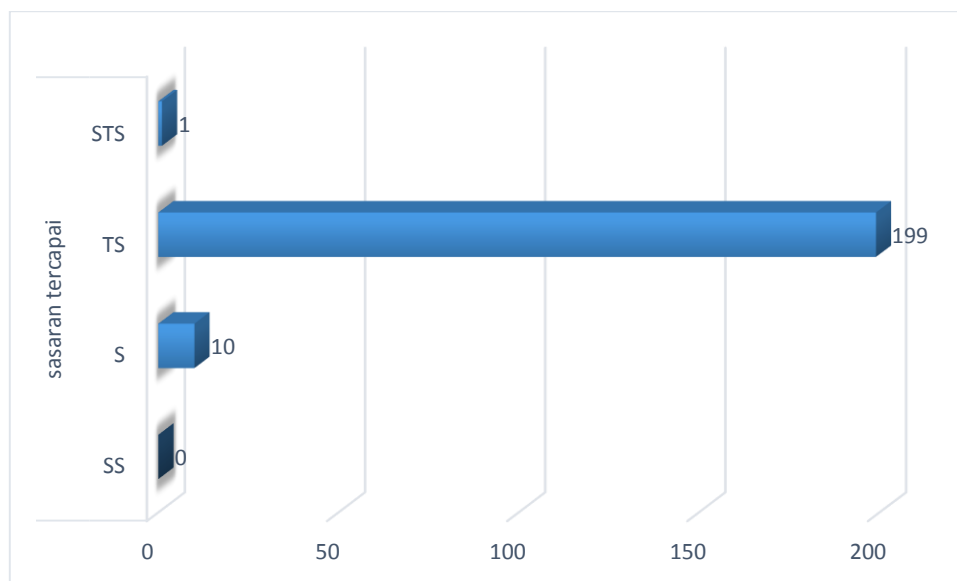


(PAUD/TK/SD/MI/SMP/SMU) untuk mengembangkan kebun sekolah dengan tanaman sayuran, buah dan umbi-umbian, unggas/ternak kecil/ikan. Selanjutnya membudidayakan unggas atau ternak kecil (seperti ayam, itik, kelinci) atau ikan (lele, nila, mas) sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai pangan sumber protein hewani juga mengenalkan beberapa organisme pengganggu tanaman (jamur, bakteri, virus, serangga) dan cara penanggulangannya. Setelah itu melakukan penyuluhan tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Kegiatan dapat dilakukan melalui praktek penyusunan menu dan porsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dan yang terakhir yakni demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Dari semua poin yang disebutkan, masyarakat yang menjawab tidak setuju sepakat bahwa program MKRPL ini masih belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Sedangkan menurut masyarakat yang menjawab setuju mengatakan bahwa sampai saat ini yang pernah berjalan hanya sosialisasi optimalisasi pekarangan dan pengenalan organisme pengganggu tanaman dan cara pencegahannya dengan menggunakan pestisida. Pernah juga memiliki Demplot dan Kebun Bibit Desa namun kemudian tak terurus karena masyarakatnya kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan MKRPL yang salah satunya merawat Demplot dan Kebun Bibit Desa dengan cara dibuatnya jadwal piket secara bergantian. Dengan kenyataan seperti itu di lapangan, bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Program Model Kawasan

Rumah Pangan Lestari masih belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

**Grafik 4.61**

**Hasil Pertanyaan Kedua Indikator Ketepatan**

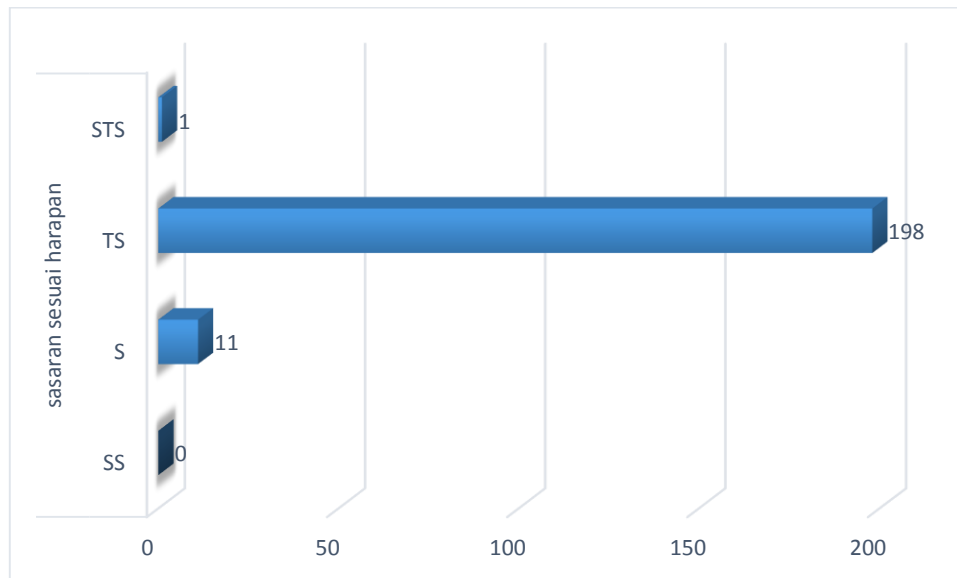


Pertanyaan kedua yakni sasaran Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari telah tercapai. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 10 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 199 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 1 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.04 dari skala 4.00. Sasaran kegiatan program MKRPL yakni meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan

lokal serta berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, dari sasaran program di atas belum ada yang tercapai hingga saat ini. Kesadaran dan peran masyarakat masih kurang untuk mewujudkan sasaran yang disebutkan. Usaha pengolahan pangan skala UMKM juga masih sulit tercapai. Masyarakat belum mendapatkan pelatihan dalam mengolah hasil panen sehingga untuk menciptakan pengolahan skala UMKM masih sulit diwujudkan. Masyarakat masih lebih memilih untuk menggunakan hasil panen untuk keperluan sehari-hari mereka karena mereka tidak tahu hendak dijadikan produk seperti apa hasil panen yang mereka dapatkan. Juga targetan pasar yang belum jelas membuat masyarakat semakin urung untuk mengolah hasil panen menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi. Sedangkan masyarakat yang menjawab setuju menilai yang belum tercapai hanyalah terbentuknya UMKM guna menjadi unit pengolahan pangan. Sementara poin-poin lainnya sudah mereka rasakan dan dirasa sudah tercapai bagi keluarga mereka.

Grafik 4.62

### Hasil Pertanyaan Ketiga Indikator Ketepatan

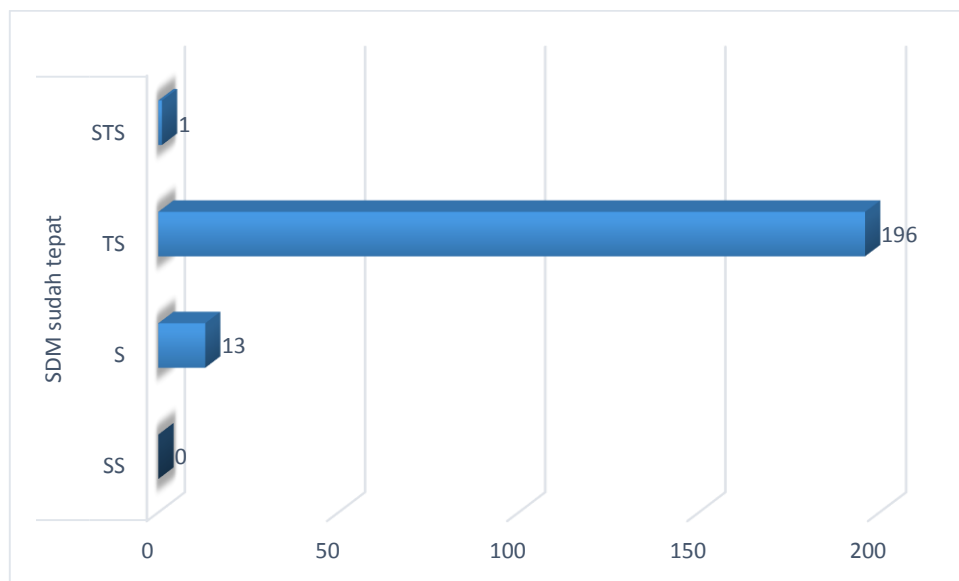


Pertanyaan ketiga yakni sasaran Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari telah sesuai harapan masyarakat. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 11 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 198 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 1 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.05 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, sasaran program MKRPL ini masih belum sesuai dengan hasil yang diharapkan masyarakat sendiri. Contohnya belum terciptanya media seperti UMKM dalam mengolah hasil panen masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka dalam perekonomian mereka masih belum terwujud lantaran kurang diberi stimulus oleh pemerintah dalam bentuk pelatihan. Pemerintah hanya mendukung dalam penyediaan peralatan saja tanpa

memberi arahan hendak dijadikan produk apa saja yang sekiranya bisa dijual ke pasar-pasar yang sudah dijadikan target oleh BPTP sendiri. Sedangkan mereka yang menjawab setuju menilai sasaran program MKRPL sudah sesuai harapan hanya saja yang tak sesuai harapan adalah partisipasi aktif yang rendah dari masyarakat sendiri sehingga secara langsung menghambat keberhasilan dari program MKRPL sendiri.

**Grafik 4.63**

**Hasil Pertanyaan Keempat Indikator Ketepatan**

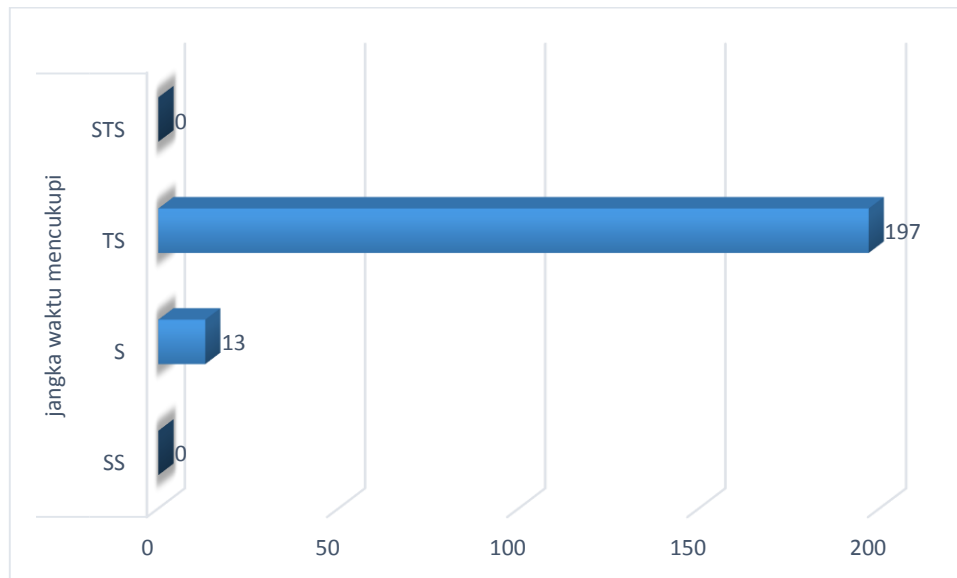


Pertanyaan keempat yakni SDM Desa Menes sudah tepat untuk menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 11 orang, jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 198 orang dan jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju yakni 1 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06

dari skala 4.00. Masyarakat yang menjawab setuju berpendapat bahwa SDM Menes sendiri sebenarnya sudah tepat dalam menjalankan program MKRPL karena mereka memiliki petani yang mencukupi jumlahnya dan didukung oleh pekarangan-pekarangan masyarakat yang cukup luas. Namun masyarakat yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju mengatakan bahwa SDM yang dimiliki Desa Menes belum siap dalam menjalankan program MKRPL. Belum siapnya menerima teknologi pangan juga dengan tingkat kesadaran dan partisipasi yang rendah menjadikan SDM Desa Menes bisa dikatakan kurang tepat dalam menjalankan program MKRPL ini.

Grafik 4.64

### Hasil Pertanyaan Kelima Indikator Ketepatan



Pertanyaan kelima yakni jangka waktu yang diberikan untuk menjalankan Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari sudah tepat (mencukupi). Jumlah responden yang menjawab setuju yakni 13 orang dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju yakni 197 orang dan memiliki nilai rata-rata 2.06 dari skala 4.00. Menurut masyarakat yang menjawab setuju, mereka diberi waktu sekitar satu tahun untuk bisa menjadi desa yang mandiri. Sebenarnya itu bisa dicapai. Namun karena intensitas pendamping yang datang untuk memantau sekaligus memberi bimbingan dan arahan sangat jarang maka masyarakat berpendapat jangka waktu satu tahun yang diberikan belum tepat dan termasuk terlalu singkat. Peran pendamping sangat vital disini mengingat pendampinglah yang terjun langsung ke lapangan sekaligus bisa mengamati apakah desa yang

menjalankan program MKRPL ini sudah bisa mandiri dalam kurun waktu satu tahun. Namun menurut masyarakat yang menjawab tidak setuju menilai nyatanya pendamping yang diharapkan bisa mengarahkan masyarakat untuk bisa mandiri malah kurang aktif dalam membimbing masyarakatnya sehingga masyarakat sendiri yang pada akhirnya menjadi belum siap untuk menjalankan program MKRPL.

#### **4.6 Interpretasi Hasil Penelitian**

Penelitian dengan judul Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari bahwa hal yang terpenting adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat peneliti pada awal penelitian. Rumusan tersebut adalah “Seberapa besarkah persentase Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang”.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, kita dapat melihat dari pembahasan yang memaparkan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus *t test* satu sampel dengan menguji pihak kiri bahwa harga *t* hitung lebih kecil (<) dari harga *t* tabel dan hal itu dapat diartikan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Karena hasil pengujian hipotesis mencapai 51.58% dari angka yang diharapkan 60%.

Sehingga dari data pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa “Hasil Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari mencapai angka 51.58% dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu 60%,”



ini artinya persentase Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang dibawah 60%.

#### **4.7 Pembahasan**

Penelitian dengan judul Evaluasi Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang menggunakan teori William N. Dunn tentang Evaluasi Kebijakan yang memiliki enam indikator yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

##### **1. Indikator Efektivitas**

Efektifitas merupakan salah satu syarat keberhasilan suatu program yang diimplementasikan oleh pemerintah. Efektifitas juga sebagai ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman Pada penelitian kali ini peneliti membagi indikator efektifitas menjadi sub indikator yakni: *pelaksanaan program sesuai prosedur*. Kegagalan suatu program bisa terjadi karena program dijalankan tidak sesuai prosedur yang ada sehingga tujuan yang ditetapkan tidak bisa tercapai dengan optimal. Selanjutnya yakni *hasil yang diharapkan*. Ketercapaian program yang dijalankan merupakan sesuatu yang diidamkan oleh masyarakat selaku objek dari pembangunan. Hasil yang diharapkan juga merupakan gambaran dari berhasilnya suatu program

yang dijalankan. Jika sesuai maka kepuasan masyarakat juga akan baik sehingga mampu menggambarkan keberhasilan program tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 10 butir pertanyaan terkait indikator efektifitas dengan nilai ideal yakni  $10 \times 4 \times 210 = 8.400$  (10 = jumlah pertanyaan yang ada, 4 = angka tertinggi dalam skala likert, 210 = jumlah responden). Setelah menemukan skor ideal maka bandingkan dengan skor riil yang diisi responden yakni 4.266 sehingga didapat  $4.266 / 8.400 \times 100\% = 50.78\%$  sehingga program ini bisa dikatakan kurang berhasil jika dilihat dari indikator efektifitasnya.

Hal ini memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Program MKRPL semakin lama berjalan semakin berkurang efektifitasnya. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program, rendahnya motivasi masyarakat, minimnya aktivitas yang dilakukan, kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan program MKRPL, belum terciptanya wadah pengembangan pangan pokok lokal, belum meningkatnya tingkat ketergantungan pangan, juga belum meningkatnya kualitas pangan masyarakat. Walaupun sebenarnya dari segi karakteristik lahan dan luasnya pekarangan, Desa Menes sudah mencukupi, namun tetap saja jika masyarakatnya masih kurang aktif program ini tidak akan berjalan dengan baik. Padahal masyarakat harusnya ditekankan bahwa program ini dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dengan kata lain masyarakat sendirilah

yang seharusnya bergerak lebih aktif dan tak terlalu mengandalkan pemerintah untuk tercapainya tujuan program MKRPL ini.

## 2. Indikator Efisiensi

Efisiensi juga merupakan salah satu faktor yang ada dalam teori evaluasi William Dunn. Efisiensi juga berarti ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi beberapa sub indikator yakni: *anggaran biaya*. Anggaran biaya tak bisa diabaikan dalam semua implementasi suatu program. Dana juga berperan dalam pengadaan alat-alat pendukung program yang dijalankan. Namun suatu program akan dikatakan efisien jika pemanfaat dana yang ada dipakai seminimal mungkin namun tetap tercapai tujuan program tersebut. Selanjutnya *usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan*. Semakin sedikit usaha yang dilakukan maka bisa dikatakan semakin efisien juga usaha yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat 16 butir pertanyaan terkait indikator efisiensi dengan nilai ideal yakni  $16 \times 4 \times 210 = 13.440$  (16 = jumlah pertanyaan yang ada, 4 = angka tertinggi dalam skala likert, 210 = jumlah responden). Setelah menemukan skor ideal maka bandingkan dengan skor riil yang diisi responden yakni 6.925 sehingga didapat 6.925 /

$13.440 \times 100\% = 51.52\%$  sehingga program ini bisa dikatakan kurang berhasil jika dilihat dari indikator efisiensinya.

Hal ini memang terjadi di lapangan. Peningkatan ketahanan pangan belum sesuai dengan tujuan program MKRPL, belum adanya peningkatan pendapatan dari menjual hasil olahan panen, belum adanya rasa saling memiliki dalam menjalankan program MKRPL, belum adanya hasil olahan dari tanaman pangan yang ditanam (keripik bayam), minimnya peran dan usaha baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri, kurang intensnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah guna meningkatkan kualitas SDM dari masyarakat, juga masyarakat sendiri masih agak kebingungan dengan tempat pasar yang dijadikan target pemasaran untuk penjualan hasil olahan tanaman pangan sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat sendiri. Sebenarnya usaha masyarakat dalam meningkatkan motivasi sudah ada, yakni dengan adanya penghargaan bagi warga yang aktif serta menanami pekarangannya dengan tanaman pangan atau toga. Pada awalnya cara ini memang berjalan baik, namun semakin lama masyarakat yang aktif semakin sedikit karena banyak masyarakat yang mulai acuh karena belum merasakan manfaat dari program ini. Saat ini hanya warga RT 03 saja yang masih aktif menanami pekarangannya. Sedangkan untuk RT lainnya hanya beberapa saja. Dari segi baiknya semua bantuan masih dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya seperti dana, polybag, pupuk, bibit, dan lain sebagainya.

### 3. Indikator Kecukupan

Kecukupan disini berarti apakah suatu program yang dijalankan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dan apakah program yang dijalankan cukup untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat selaku objek pembangunan. Peneliti membagi menjadi dua sub indikator yakni: *Pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah* dan *KRPL sesuai dengan keinginan masyarakat*. Dalam penelitian ini terdapat 9 butir pertanyaan terkait indikator kecukupan dengan nilai ideal yakni  $9 \times 4 \times 210 = 7.560$  (9 = jumlah pertanyaan yang ada, 4 = angka tertinggi dalam skala likert, 210 = jumlah responden). Setelah menemukan skor ideal maka bandingkan dengan skor riil yang diisi responden yakni 3.875 sehingga didapat  $3.875 / 7.560 \times 100\% = 51.25\%$  sehingga program ini bisa dikatakan kurang berhasil jika dilihat dari indikator kecukupannya

Program MKRPL masih dirasa belum bisa mencukupi dan belum bisa menutupi masalah pangan di Desa Menes. MKRPL belum bisa membantu dalam membantu ketahanan pangan, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, belum bisa memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, belum bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dari hasil pangan yang ditanam, serta hasil yang diharapkan dari program ini dirasa belum bisa dibilang mencukupi. Namun sebenarnya program MKRPL sudah mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan rumahnya, hanya saja karena

kurangnya stimulus dari pemerintah serta mudah jenuh dan kurangnya kreatifitas masyarakat menjadikan program MKRPL menjadi kurang terasa manfaatnya.

#### **4. Indikator Perataan**

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dengan hasil dari program yang ada. Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini indikator perataan dibuat menjadi sub indikator yakni: *Distribusi hasil program merata kepada masyarakat*. Dalam penelitian ini terdapat 7 butir pertanyaan terkait indikator perataan dengan nilai ideal yakni  $7 \times 4 \times 210 = 5.880$  (7 = jumlah pertanyaan yang ada, 4 = angka tertinggi dalam skala likert, 210 = jumlah responden). Setelah menemukan skor ideal maka bandingkan dengan skor riil yang diisi responden yakni 3.102 sehingga didapat  $3.102 / 5.880 \times 100\% = 52.75 \%$  sehingga program ini bisa dikatakan kurang berhasil jika dilihat dari indikator perataannya.

Hal ini bisa dilihat dari kurang meratanya kesejahteraan warga, kesejahteraan KK, juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya dengan

adanya program ini. Manfaat MKRPL belum terasa secara menyeluruh dan merata. Masyarakat seharusnya dituntut untuk aktif karena program ini dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Tapi nyatanya tingkat partisipasi masyarakat masih belum bisa dibilang memadai karena hanya beberapa orang saja yang aktif menjalankan program ini. Meskipun hasil dari dana bantuan didistribusikan secara merata kepada semua masyarakat, namun karena masyarakatnya banyak yang kurang aktif dalam menjalankan program inilah yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan itu terjadi.

## 5. Indikator Responsivitas

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Pada penelitian ini indikator perataan dibuat menjadi sub indikator yakni: *Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan program*. Dalam penelitian ini terdapat 8 butir pertanyaan terkait indikator responsivitas dengan nilai ideal yakni  $8 \times 4 \times 210 = 6.720$  (8 = jumlah pertanyaan yang ada, 4 = angka tertinggi dalam skala likert, 210 = jumlah responden). Setelah menemukan skor ideal maka bandingkan dengan skor riil yang diisi responden yakni 3.506 sehingga didapat  $3.506 /$

$6.720 \times 100\% = 52.17 \%$  sehingga program ini bisa dikatakan kurang berhasil jika dilihat dari indikator responsivitasnya.

Respon masyarakat dalam menjalankan program MKRPL pada awalnya memang sangat baik. Sosialisasi dari BPTP Provinsi Banten pun dihadiri oleh banyak masyarakat. Peran BPTP sangat terasa semenjak awal kegiatan MKRPL ini. Masyarakat sangat aktif dalam menjalankan program MKRPL seperti merawat demplot, merawat Kebun Bibit Desa, aktif selalu dalam kegiatan rapat mingguan, piket harian selalu ramai oleh masyarakat, juga laporan mingguan selalu rutin dibuat. Namun semenjak pendamping mulai kurang aktif perannya, hal ini ikut mempengaruhi juga terhadap respon masyarakat sendiri. Piket harian saat ini mulai ditinggalkan, saat rapat mingguan pun masyarakat yang hadir selalu sedikit dan terkesan hanya orang yang sama, namun yang paling utama yang menyebabkan responsivitas masyarakat berkurang yakni karena peran pendamping yang kurang aktif. Keberhasilan pelaksanaan Program MKRPL bergantung pada sinergi kerja sama antara aparat pemerintah Daerah dari berbagai instansi terkait, penyuluh pendamping dan penerima manfaat. Agar kegiatan dilaksanakan dengan tepat sasaran maka harus diidentifikasi dengan benar akar masalah yang ada di lapangan dan melakukan pendekatan yang menyeluruh kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sebaiknya dari kelompok-kelompok yang telah mengakar di masyarakat dan mempunyai keinginan serta komitmen sebagai perintis Program MKRPL. Secara utuh, kegiatan ini diarahkan untuk menjadi kebutuhan kelompok/masyarakat



sehingga keberadaan dan perkembangannya akan bersifat berkelanjutan dan tidak sebatas keproyekan.

Peran Pendamping MKRPL memiliki peran terdepan dalam keberhasilan gerakan MKRPL, termasuk didalamnya memperbaiki perilaku konsumsi pangan masyarakat. Kemampuan utama yang perlu dikembangkan seorang Penyuluh Pendamping MKRPL adalah dari sisi kepemimpinan (*leadership*), manajemen, dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), disamping kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, membangun jejaring, dan menjadi contoh nyata bagi masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan penyedia input intelektual. Jadi responsivitas disini memang sangat dipengaruhi oleh peran pendamping yang bisa menstimulus masyarakat.

## **6. Indikator Ketepatan**

Ketepatan pada implementasi suatu program sangat berpengaruh pada keberhasilan program. Ketepatan disini lebih menekankan kepada tepat sasaran. Artinya siapa yang menjadi objek pembangunan haruslah tepat dengan tujuan pembangunan melalui program tersebut. Pada penelitian ini indikator ketepatan dibuat menjadi sub indikator yakni: ***tujuan yang tepat sasaran***. Dalam penelitian ini terdapat 5 butir pertanyaan terkait indikator ketepatan dengan nilai ideal yakni  $5 \times 4 \times 210 = 4.200$  (5 = jumlah pertanyaan yang ada, 4 = angka tertinggi dalam skala likert, 210 = jumlah responden). Setelah menemukan skor ideal maka bandingkan dengan skor

riil yang diisi responden yakni 2.156 sehingga didapat  $2.156 / 4.200 \times 100\%$   
 $= 51.33 \%$  sehingga program ini bisa dikatakan kurang berhasil jika dilihat  
 dari indikator ketepatannya.

Pada pelaksanaannya, Program MKRPL masih belum sesuai dengan  
 petunjuk pelaksanaannya. Setiap desa terdiri dari 1 kelompok yang  
 beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang lokasinya saling  
 berdekatan dalam satu kawasan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan oleh penyuluh pendamping kepada kelompok penerima manfaat melalui metode Sekolah Lapangan (SL), yang diberikan kepada para Penerima Manfaat.
2. Melaksanakan pengembangan Demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan (LL) sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak). Fasilitas pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi, dan manajemen kelompok.
  - a. Luas demplot kelompok berkisar minimal  $36 \text{ m}^2$  atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan kelompok.
  - b. Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidak ditanami hanya satu jenis tanaman saja.
  - c. Di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternak kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangan sumber protein.
  - d. Lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal para anggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung di pekarangan.
  - e. Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok (dibuat jadwal piket secara bergantian).
3. Mengembangkan kebun bibit kelompok yang diarahkan untuk menjadi cikal bakal kebun bibit desa
  - a. Bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi umbian
  - b. Luas kebun bibit ini berkisar minimal  $25 \text{ m}^2$  atau disesuaikan dengan lahan yang tersedia
  - c. Peralatan dan media yang digunakan untuk pembibitan antara lain adalah: polybag (ukuran kecil/sedang/besar),

- pot, tanah, kompos, sekam, dll serta dapat memanfaatkan bahan daur ulang sebagai media pembibitan (barang-barang bekas).
- d. Media tanaman untuk perbenihan di kebun bibit dianjurkan untuk menggunakan campuran tanah, pasir dan pupuk kandang yang sudah matang, dengan perbandingan 1:1:1 dan atau komposisi lainnya sesuai jenis tanaman.
  - e. Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, kebun sekolah dan dapat juga untuk masyarakat sekitar. Cara distribusi bibit dilakukan sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah kelompok.
  - f. Lokasi kebun bibit diusahakan terletak pada daerah yang strategis dan tidak jauh dari anggota sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit dan memudahkan pemeliharaan kebun bibit.
  - g. Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok.
4. Mengembangkan pekarangan milik anggota Kelompok Penerima Manfaat sesuai hasil musyawarah kelompok berdasarkan potensi pekarangan dan kebutuhan tiap- tiap anggota kelompok.
    - a. Setiap anggota kelompok dapat mengusulkan kebutuhan untuk masing-masing pekarangannya dalam musyawarah kelompok yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA)
    - b. Lahan pekarangan anggota dapat ditanami berbagai jenis sayuran, buah, dan umbi-umbian; dibuat kolam ikan; kandang ternak kecil; sesuai dengan kebutuhan dan luas pekarangannya. Jenis tanaman yang ditanam bervariasi dari tanaman petik dan cabut serta tanaman semusim dan tanaman tahunan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan.
    - c. Lahan pekarangan anggota yang dimanfaatkan tidak hanya yang di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah
    - d. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dilakukan secara terus menerus yang didukung oleh ketersediaan bibit dari kebun bibit kelompok
  5. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi yang biasa dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Dalam membudidayakan tanaman, perlu menerapkan juga sistem rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah menanam tanaman secara bergilir di suatu lahan. Tujuan dari rotasi tanaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan produksi

tanaman, memanfaatkan tanah- tanah yang kosong, memperkaya variasi tanaman sehingga yang ditanam tidak itu- itu saja, memperbaiki kesuburan tanah, serta memperkecil resiko kegagalan panen

6. Membudidayakan unggas atau ternak kecil (seperti ayam, itik, kelinci) atau ikan (lele, nila, mas) sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai pangan sumber protein hewani
7. Mengenalkan beberapa organisme pengganggu tanaman (jamur, bakteri, virus, serangga) dan cara penanggulangannya
8. Melakukan pertemuan kelompok secara periodik minimal satu kali dalam sebulan.
9. Melakukan penyuluhan tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Kegiatan dapat dilakukan melalui praktek penyusunan menu dan porsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
10. Demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman

Dari semua poin di atas, hanya jumlah anggota saja yang bisa dibilang sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Untuk lahan demplot saja Desa Menes sendiri tidak memiliki lahan kosong untuk dijadikan lahan demplot. Sisanya semua poin yang disebutkan di atas masih jauh dari petunjuk pelaksanaan. Kegiatan MKRPL di Desa Menes juga masih belum bisa mencapai sasaran yang ditargetkan seperti belum meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal dan berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

Jika jumlah riil hasil kuesioner yang diisi oleh responden dibandingkan dengan semua jawaban responden yang digabungkan maka akan didapatkan hasil (hasil dari seluruh jawaban responden yang terdiri dari 210 responden, 55 butir pertanyaan, dan nilai skala likert 1 s/d 4 yang dipilih sesuai pilihan responden) dibandingkan dengan jumlah riil yakni hasil dari  $210 \times 55 \times 4$  (210 yakni jumlah responden, 55 yakni jumlah pertanyaan, dan 4 yakni nilai tertinggi skala likert) maka didapatkan hasilnya sebagai berikut:

$$= (23.830 : 46.200) \times 100 \%$$

$$= 0.5158 \times 100 \%$$

$$= 51.58 \% \text{ (hipotesis terbukti } < 60 \%)$$

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian yang peneliti buat dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Menes paling tinggi hanya mencapai angka 51.58% saja. Hal ini memang berbanding lurus dengan kenyataan dimana program MKRPL ini hanya bagus diawal pembentukannya saja, tetapi tidak diikuti dengan perkembangan program ini. Kualitas dan kuantitas hasil yang adapun masih bisa disebut kurang memadai. Karena itu perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh seluruh anggota Kelompok Wanita Tani dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas produksi sehingga bisa mencukupi dan mencapai target yang dicanangkan sebelumnya.

#### **5.2 Saran**

Dari penelitian penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran pendamping harusnya lebih aktif lagi dalam membimbing ibu-ibu Kelompok Wanita Tani selaku implementor program MKRPL karena ibu-ibu di Desa Menes banyak yang mengeluh kurang aktifnya pendamping dari BPTP.

2. Posisi pemerintah dalam program ini hanyalah sebagai penggerak awal dan pendamping yang ikut membimbing dan mendukung terbentuknya MKRPL namun pada nyatanya dilapangan jarang sekali pemerintah turun langsung sebagai perangsang masyarakat untuk mau bergerak. Implementor terkait harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya program ini karena itu bisa berpengaruh terhadap mau atau tidaknya ibu-ibu untuk menjalankan program ini.
3. Masyarakat dan pemerintah harus intens dalam berkoordinasi demi tercapainya tujuan MKRPL seperti memenuhi Kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari, Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, serta diversifikasi pangan, Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan, dan Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.
4. Mengadakan sosialisasi yang intens tentang MKRPL karena pada dasarnya MKRPL harus direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif (dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat)

dan tidak selalu mengandalkan pemerintah. Sosialisasi juga dibutuhkan oleh masyarakat tentang penggunaan teknologi pertanian saat ini agar SDM yang ada bisa mengolah SDA yang ada lebih efektif dan lebih efisien.

5. Adanya peningkatan kapasitas SDM meliputi Training of Trainers (TOT) dan pelatihan-pelatihan lainnya yang diperlukan sesuai hasil diskusi dan identifikasi kebutuhan, seperti pelatihan pembibitan, penyemaian benih, pembuatan media tanam, dan lain sebagainya.
6. Adanya monitoring dan evaluasi secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat kooperator dan tim pendamping secara berkala. Selanjutnya dilakukan modifikasi dan perbaikan segala hal yang dianggap kurang baik.

Program MKRPL di Desa Menes masih bisa dilanjutkan karena masih memiliki potensi. Selain luasnya lahan pertaniannya juga pekarangan masyarakatnya pun bisa terbilang luas. Artinya peneliti masih merekomendasikan program MKRPL di Desa Menes ini agar terus berlanjut namun harus adanya perbaikan mendasar seperti poin-poin sebelumnya yang peneliti sebutkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. 2014. *Pandeglang dalam Angka 2014*. Pandeglang: BPS Kabupaten Pandeglang
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Mustofa. 2012. *Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin dan Modal Sosial di Provinsi DIY*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarwan Danim. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_, 2004. *Motivasi, Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* Jakarta. PT. Rhineka Cipta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_ - 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.

Surachmanto, Ari. 2013. *Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Provinsi Banten*. Serang: BPTP Provinsi Banten

Usman, Husaini, & Purnomo Setiady A. 2008. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

**Jurnal:**

Sukandar, Dadang. Jurnal Teknologi Pangan dan Industri. *Model Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga Pada Desa Hortikultur. 1-3*

**Dokumen:**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pangan berdasarkan pada azas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, keadilan, keberlanjutan dan keadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan

**Sumber lain:**

Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Gatot Irianto,  
(<http://wartaekonomi.co.id> dikutip pada tanggal 21 maret pukul 12.30 WIB)

<http://digilib.its.ac.id> (dikutip pada tanggal 21 maret 2015 pukul 11.35 WIB)

<http://jogjalib.com> (dikutip pada tanggal 21 maret 2015 pukul 11.35 WIB)

<http://karyailmiah.fp.ub.ac.id> Nilam Pranita Ayuning Putri, Nurul Aini dan Y.B  
Suwasono Heddy (dikutip pada tanggal 21 maret 2015 pukul 11.35 WIB)

<http://www.antaraneews.com/berita> (dikutip pada tanggal 21 maret 2015 pukul  
11.35 WIB)

<http://www.bkpp.bantenprov.go.id> (dikutip pada tanggal 21 maret 2015 pukul  
11.35 WIB)

<http://www.kemenkeu.go.id> oleh Syahrir Ika (dikutip pada tanggal 21 maret  
2015 pukul 11.35 WIB)

[www.banten.litbang.deptan.go.id](http://www.banten.litbang.deptan.go.id) (dikutip pada 8 april 2015 pada pukul 16.00)